

Naskah Sumber Arsip

Jejak Demokrasi Pemilu 1955





Naskah Sumber Arsip

Jejak Demokrasi Pemilu 1955



Arsip Nasional Republik Indonesia

2019



Tim Penyusun :

Pengarah

Dr. Mustari Irawan, MPA
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Dr. M. Taufik, M.Si
Deputi Bidang Konservasi Arsip

Penanggung Jawab

Drs. Agus Santoso, M.Hum
Direktur Layanan dan Pemanfaatan

Penanggung Jawab Teknis

Eli Ruliawati, S.Sos, MAP
Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Arsip

Narasumber

Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A.

Koordinator

Bayu Patriasari, SAP

Penulis

Mudanto Pamungkas, S.S

Anggota

Abdul Cholik, S.Hum
Dewi Mayang Sari, SEI, M.AP
Eviani Yusnita, S.IP
Hanif Aulia Rahman, A.Md
Dra.Nurarta Situmorang, M.Si
Sapta Sunjaya, S Kom, M.MSI
Siti Fatimah
Suharti, S.Hum
Wasir Sugiyanto

Desain & Layout

Beny Oktavianto, S.Kom



Naskah Sumber Arsip
**Jejak Demokrasi
Pemilu 1955**

Penerbit

Arsip Nasional Republik Indonesia
Jalan Ampera Raya No.7, Jakarta Selatan 12560
Telp. (+6221) 780 5851 Fax. (+6221) 781 0280

ISBN 978-602-6503-15-2



Hak Cipta © 2019

Hak Publikasi pada Arsip Nasional Republik Indonesia
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.



**SEKAPUR SIRIH
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Pemilihan umum (pemilu), sebuah kata yang tidak asing lagi bagi telinga warga negara Indonesia. Bagi warga negara Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun ke atas, pasti pernah berpartisipasi dalam pemilu tersebut. Pada 17 April 2019 nanti, bangsa Indonesia akan melaksanakan pemilu yang ke-12 (dua belas) dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebelumnya telah dilaksanakan pemilu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014.

Ada catatan yang menarik mengenai pemilu yang telah dilaksanakan pada tahun 1955 dengan pemilu sesudahnya. Pada pemilu tahun 1955, azas pemilu yang dipergunakan kepada para pemilih ada 6 (enam) seperti jujur, umum, berkesamaan, rahasia, bebas, dan langsung. Azas ini terus dipergunakan pada pelaksanaan pemilu tahun 1971 hingga 2014, kecuali azas berkesamaan (bahwa semua warga negara yang telah mempunyai hak pilih mempunyai hak suara yang sama, yaitu masing-masing satu suara) yang dihilangkan, tetapi mempergunakan istilah baru yaitu LUBER – langsung, umum, bebas, dan rahasia.



Dalam penulisan naskah sumber arsip ini, penulisan berfokus pada memilih DPR dan Konstituante (lembaga negara Indonesia yang ditugaskan untuk membentuk undang-undang dasar baru untuk menggantikan Undang-undang Dasar Sementara 1950). Selain itu, dikemukakan juga mengenai proses pelaksanaan pemilu yang dimulai dari tahap persiapan antara lain pihak-pihak yang terlibat penyelenggaraan pemilu, biaya penyelenggaraan, pendataan dan pendaftaran pemilih, pencetakan surat suara dan lain-lain hingga hasil perolehan suara untuk DPR dan Konstituante.

Ada hal yang lain yang akan dikemukakan dalam penulisan naskah sumber ini, yaitu mengenai demokrasi, budaya politik, etika politik, dan pendidikan politik. **Demokrasi** adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Abraham Lincoln); **budaya politik** suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Salah satu wujud pengambilan keputusan secara kolektif adalah melalui pemilu di mana rakyat berpartisipasi secara langsung dalam proses tersebut; **etika politik** adalah sarana yang diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik, serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan golongan; dan **pendidikan politik** adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



Dengan penulisan naskah sumber ini, kami berharap dapat memberikan pelajaran yang baik bagi semua komponen masyarakat dalam menambah wawasan pengetahuan dan pendidikan agar mereka tidak buta dengan politik. Sungguh luar biasa apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita dalam memberikan pelajaran yang baik dalam berpolitik.

Kami menyampaikan selamat atas diterbitkannya naskah sumber arsip *Jejak Demokrasi Dalam Pemilu 1955*. Selain itu, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan naskah sumber arsip ini. Semoga naskah sumber arsip ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan bermanfaat untuk kepentingan pendidikan bagi generasi kini dan mendatang.

Jakarta, 10 April 2019

Kepala,

Dr. Mustari Irawan, MPA

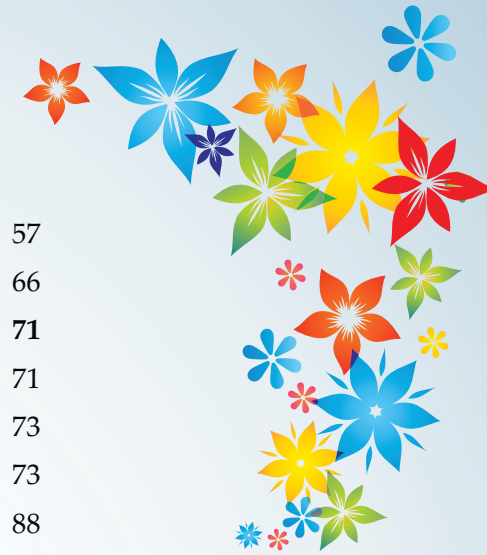


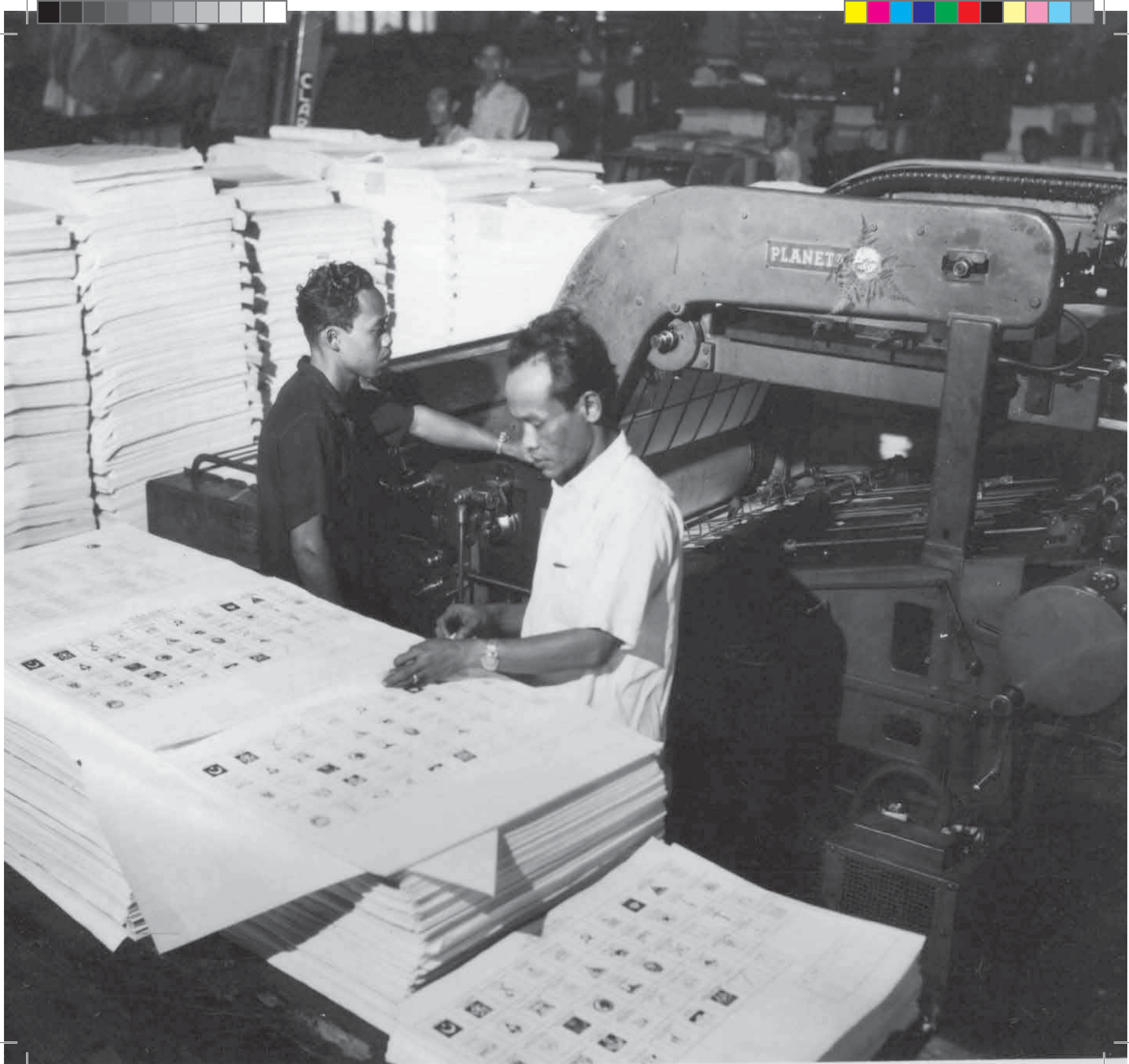
Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
SEKAPUR SIRIH KEPALA ARSIP NASIONAL RI	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Kondisi Indonesia Pada Masa Demokrasi Parlementer	2
a. Budaya dan Etika Politik	4
b. Harmoni dan Kohesivitas Sosial	6
2. Partai Politik di Indonesia	6
a. Permasalahan Partai Politik	8
b. Partai Politik dan Nasionalisme	9
c. Fungsi Representasi Partai Politik	9
B. Tujuan dan Urgensi Penulisan	10
C. Arsip Sebagai Sumber	10
D. Sistematika Penulisan	11
BAB II PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU 1955	13
A. <i>Stakeholder</i> Terkait Penyelenggaraan Pemilu 1955	15
1. Lembaga Penyelenggara Pemilu 1955	15
2. Peran <i>Civil Society</i>	26
3. Media Massa	28
4. Kontestan Pemilu 1955	30
B. Biaya Penyelenggaraan Pemilu 1955	34
C. Pendataan dan Pendaftaran Pemilih	36
D. Pencetakan Surat Suara dan Distribusi Logistik Pemilu 1955	40
E. Sosialisasi dan Kampanye Pemilu 1955	49
1. Sosialisasi Pemilu 1955	49



2. Kampanye Pemilu 1955	57
F. Situasi Keamanan Menjelang Pemilu 1955	66
BAB III PELAKSANAAN PEMILU 1955	71
A. Pencoblosan	71
1. Pemilu DPR	73
a. Hak Suara Sipil	73
b. Hak Suara APRI	88
2. Pemilu Konstituante	92
a. Hak Suara Sipil	94
b. Hak Suara APRI	105
B. Suasana di Sekitar TPS	107
1. Antusiasme Masyarakat Dalam Memilih Cukup Tinggi	107
2. Budaya Antre Dalam Menggunakan Hak Suara di TPS	110
C. Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu 1955	118
D. Masalah yang Muncul Selama Pelaksanaan Pemilu 1955	125
BAB IV HASIL PEMILU 1955	133
A. Perolehan Suara untuk DPR dan Konstituante	133
1. Perolehan Suara untuk DPR	133
2. Perolehan Suara untuk Konstituante	145
B. Pelantikan Anggota DPR dan Konstituante	149
1. Pelantikan Anggota DPR	149
2. Pelantikan Anggota Konstituante	154
C. Anggota DPR dan Konstituante yang Diangkat	164
D. Dampak Pemilu 1955	172
BAB V PENUTUP	179
DAFTAR PUSTAKA	182







BAB I *Pendahuluan*

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga kearsipan nasional menyimpan berbagai khazanah arsip, termasuk di dalamnya arsip yang berkaitan dengan pemilihan umum (pemilu). Mengingat pemilu merupakan suatu peristiwa penting tingkat nasional maka ANRI perlu menerbitkan naskah sumber arsip tentang pemilu. Hal ini dalam rangka merawat memori kolektif bangsa mengenai suatu peristiwa bersejarah. Pada kesempatan ini ANRI mengangkat tema mengenai Pemilu 1955. Sebab Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang berhasil dilaksanakan secara demokratis dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pemilu selanjutnya.

A. Latar Belakang

Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Sukarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan negara demokrasi. Pada sebuah negara demokrasi kedaulatan berada di tangan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah yang menjalankan hak dan wewenangnya atas nama rakyat. Salah satu pilar negara demokrasi adalah adanya pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif (trias politika). Ketiga lembaga tersebut memiliki kedudukan yang sama sehingga dapat saling mengontrol dan mengawasi (*check and balance*).

Ciri negara demokrasi antara lain: adanya legitimasi pemerintah, partai politik, adanya pemilu yang bebas dan adil, serta pers yang bebas. Legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Salah satu cara menciptakan pemerintahan yang memiliki legitimasi adalah melalui pemilu. Dalam pemilu partai-partai politik berlomba-lomba untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Pihak yang memenangi pemilu akan tampil sebagai



pihak yang memerintah. Sedangkan salah satu alat kontrol dalam pemilu adalah adanya pers yang bebas memberitakan kejadian yang sebenarnya.

Sebenarnya pemerintah telah merencanakan pelaksanaan pemilu pada bulan Januari 1946, namun karena kondisi keamanan belum memungkinkan maka pemilu belum dapat dilaksanakan. Seluruh komponen bangsa pada waktu itu memahami kondisi tersebut dan mereka bersatu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

1. Kondisi Indonesia Pada Masa Demokrasi Parlementer

Pasca pengakuan kedaulatan oleh pihak Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bentuk negara berubah menjadi negara serikat yang bernama Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun RIS berumur kurang dari setahun, atas kesepakatan dari tokoh-tokoh nasional RIS dibubarkan dan kembali ke bentuk negara kesatuan yang bernama Republik Indonesia. Perubahan itu juga disertai perubahan konstitusi, yang semula Konstitusi RIS diubah menjadi Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Sedangkan sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem parlementer di mana pemerintahan dipimpin seorang perdana menteri.

Kegairahan dalam berdemokrasi di Indonesia diwujudkan dalam berbagai partai politik dan organisasi massa yang terbagi dalam berbagai aliran politik. Jumlah partai yang demikian banyak ditambah dengan semangat untuk mengutamakan kepentingannya masing-masing telah menyebabkan terjadinya instabilitas politik. Instabilitas politik tersebut ditandai dengan pergantian kabinet yang berlangsung sangat cepat. Mosi tidak percaya dari pihak oposisi yang ada di parlemen dengan mudah menjatuhkan kabinet yang berkuasa.



Meski kabinet yang berkuasa merupakan kabinet koalisi, namun kekuatan utama dalam kabinet-kabinet tersebut adalah dua partai besar, yaitu PNI dan Masyumi. Sedangkan partai-partai menengah dan kecil hanya menempatkan kadernya untuk mengisi jabatan menteri. Hanya Kabinet Juanda saja yang menjadi perkecualian pada masa ini. Kabinet Juanda merupakan *zaken kabinet* yang diisi oleh para profesional di luar partai politik. Berikut ini kabinet-kabinet yang pernah berkuasa pada masa Demokrasi Parlementer: Kabinet Natsir (September 1950 – Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951 – Februari 1952), Kabinet Wilopo (April 1952 – Juni 1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953 – Agustus 1955), Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956 – Maret 1957), dan Kabinet Juanda (Maret 1957 – Juli 1959).

Konflik antara pemerintah dengan kelompok oposisi di parlemen diperparah dengan pertentangan antara politisi di parlemen dengan Angkatan Darat. Mosi-mosi yang dikeluarkan oleh parlemen dianggap pimpinan Angkatan Darat sebagai tindakan intervensi di dalam masalah internal Angkatan Darat. Puncak dari konflik antara parlemen dan Angkatan Darat terjadi pada tanggal 17 Oktober 1952. Saat itu 30.000 orang yang digerakkan oleh Angkatan Darat menduduki gedung parlemen dan kemudian berunjuk rasa di depan Istana Merdeka. Bukan itu saja, nampak beberapa pucuk meriam diarahkan ke Istana Merdeka. Kemudian sekelompok perwira Angkatan Darat menemui Presiden Sukarno di Istana Merdeka dan meminta presiden untuk membubarkan parlemen dan dilaksanakannya pemilu secepatnya. Tuntutan dilaksanakan pemilu secepatnya secara prinsip disetujui oleh Presiden Sukarno, namun tuntutan pembubaran parlemen ditolak karena Presiden Sukarno tidak mau menjadi seorang diktator. Meskipun demikian Presiden Sukarno meresahkan parlemen pada hari



itu juga (Ulf Sundhaussen: 1986, 123 – 130). Fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parlemen yang diangkat tanpa melalui pemilu itu sangat rendah. Oleh karena itu, muncul desakan dari beberapa komponen masyarakat agar segera dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota parlemen.

Solusi yang ditempuh Perdana Menteri Wilopo terhadap Peristiwa 17 Oktober 1952 ada dua, yaitu mengupayakan rekonsiliasi di dalam tubuh Angkatan Darat dan mengupayakan pemilu dalam waktu secepatnya. Upaya untuk menyatukan perpecahan dalam tubuh Angkatan Darat tidak berhasil dilaksanakan oleh kabinet ini hingga Perdana Menteri Wilopo mengembalikan mandatnya. Meskipun demikian tugas mempersiapkan pemilu berhasil dilaksanakan oleh Kabinet Wilopo, hal itu ditandai dengan disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 4 April 1953 oleh Presiden Sukarno. Tidak lama setelah pengesahan undang-undang tersebut Kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya dan digantikan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo. Proses persiapan pemilu kemudian dilanjutkan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo, namun pemilu baru dapat dilaksanakan pada masa pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap.

a. Budaya dan Etika Politik

Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat



diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Salah satu wujud pengambilan keputusan secara kolektif adalah melalui pemilu di mana rakyat berpartisipasi secara langsung dalam proses tersebut.

Pada masa Demokrasi Parlementer budaya politik yang berkembang di Indonesia adalah budaya politik partisipatif. Hal itu ditunjukkan ketika pemerintah mengumumkan rencana pelaksanaan Pemilu 1955, rakyat secara antusias menyambut rencana tersebut. Bukan hanya partai politik yang antusias, namun organisasi massa dan tokoh perorangan pun mengambil bagian sebagai kontestan dalam Pemilu 1955.

Etika politik adalah sarana yang diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik, serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan golongan. Etika politik mutlak diperlukan bagi perkembangan kehidupan politik. Etika politik merupakan prinsip pedoman dasar yang dijadikan sebagai fondasi pembentukan dan perjalanan roda pemerintahan yang biasanya dinyatakan dalam konstitusi negara.

Etika politik yang ideal belum berjalan pada masa Demokrasi Parlementer. Pada masa itu yang menonjol justru semangat untuk mengutamakan kepentingan kelompok, akibatnya parlemen dengan mudah menjatuhkan pemerintah. Hal ini tidak lepas dari konflik ideologi yang muncul pada saat itu. Meski pada saat itu masih ada elite-elite politik yang memiliki integritas tinggi seperti Sukarno, Mohammad Hatta, Mohammad Natsir, Sutan Sjahrir, dan yang lainnya, tapi mereka tetap tidak bisa meredam konflik kepentingan antar kelompok.



b. Harmoni dan Kohesivitas Sosial

Harmoni sosial merupakan kondisi perpaduan berbagai unsur dalam masyarakat yang dapat menjadikan para masyarakat hidup sejalan dengan tujuan masyarakat yang telah terbentuk sebelumnya. Ini berarti harmoni akan terjadi saat masyarakat hidup rukun dan saling menghormati atau toleran satu sama lain.

Bangsa Indonesia telah ditakdirkan hidup dalam berbagai macam tradisi, suku, dan agama. Meskipun demikian secara umum bangsa Indonesia hidup dalam sebuah harmoni yang didasarkan pada nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang. Dalam masyarakat tradisional nilai-nilai luhur warisan nenek moyang masih terjaga dengan baik. Bentuk harmoni sosial yang nampak dalam masyarakat adalah budaya gotong royong.

Kohesivitas adalah kesatuan yang terjalin dalam kelompok di mana di dalamnya terjadi interaksi satu sama lain. Dalam negara yang baru merdeka seperti Indonesia kohesivitas tercipta dari persamaan pengalaman pernah dijajah oleh bangsa lain dalam waktu lama. Penderitaan saat dijajah oleh bangsa asing telah menimbulkan kesadaran kolektif untuk menjadi bangsa merdeka.

2. Partai Politik di Indonesia

Partai politik pertama kali lahir di negara-negara Eropa Barat pada akhir abad ke-19. Semangat awal dari kemunculan partai politik di negara-negara Eropa Barat adalah untuk memperjuangkan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan raja. Namun pada masa selanjutnya keanggotaan partai politik semakin luas dan menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Menurut Miriam Budihardjo partai politik adalah



suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Miriam Budihardjo: 2007, 160 – 161).

Semangat untuk memiliki partai politik yang akan memperjuangkan nasib rakyat agar menjadi lebih baik telah ada pada diri bangsa Indonesia sejak masa penjajahan Belanda. Hal itu diwujudkan dengan berdirinya *De Indische Partij* pada tanggal 25 Desember 1912. Partai tersebut didirikan oleh tiga serangkai tokoh intelektual Indonesia, yaitu E.F.E. Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Pada tahun 1923 berdiri Partai Sarekat Islam (PSI) yang merupakan penerus dari organisasi SI yang dibesarkan oleh H.O.S. Cokroaminoto, guna lebih menegaskan sikap nasionalismenya maka PSI berganti nama menjadi PSII pada tahun 1929. Pada tahun 1924 berdiri Partai Komunis Indonesia (PKI) yang merupakan penerus dari *Indische Sociaal Democratische Vereeniging* (ISDV) yang didirikan oleh Henk Sneevliet pada tahun 1914. Selanjutnya pada tahun 1927 berdiri pula Partai Nasional Indonesia (PNI) yang digagas oleh dr. Cipto Mangukusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskaq Tjokroadisurjo, Mr. Sunaryo, dan Ir. Sukarno. Meski partai-partai tersebut berbeda ideologi, namun mereka memiliki semangat yang sama, yaitu meraih kemerdekaan dan anti kolonialisme Belanda. Oleh karena itu, banyak di antara tokoh partai-partai politik tersebut yang kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara atau pengasingan.

Pada awal masa kemerdekaan, pemerintah atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh komponen masyarakat untuk mendirikan partai politik. Kebijakan itu dituangkan dalam Maklumat Wakil



Presiden Nomor X tanggal 3 November 1945. Tujuan pendirian partai politik saat itu antara lain sebagai sarana menampung segala paham dan aliran politik dalam masyarakat, serta menunjukkan kepada dunia luar bahwa Indonesia merupakan negara yang berdemokrasi. Selain itu keberadaan partai-partai politik diharapkan turut memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

a. Permasalahan Partai Politik

Permasalahan mendasar pada partai politik di awal kemerdekaan Indonesia adalah kerasnya pertentangan ideologi. Pada waktu itu, setiap partai politik berusaha untuk mempengaruhi setiap individu agar mau bersikap dan mempunyai orientasi pikiran yang sesuai dengan ideologi partai tersebut. Sosialisasi yang bersifat indoktrinasi pada masyarakat yang pendidikannya relatif kurang tanpa disadari telah menyebabkan militansi berlebihan. Pada sisi yang lain, kondisi bangsa Indonesia sedang menghadapi ancaman dari dalam dan luar negeri menjadikan militansi tersebut salah satu modal perjuangan di tengah segala keterbatasan.

Pada awal kemerdekaan partai-partai politik di Indonesia terbagi dalam beberapa ideologi, seperti kebangsaan/nasionalis, agama, sosialis, dan komunis. Partai-partai yang berideologi kebangsaan/nasionalis antara lain PNI, Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), dan Partai Rakyat Jelata (PRJ). Partai-partai yang muncul berdasarkan agama antara lain Masyumi, PSII, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI). Partai-partai yang berideologi sosialis antara lain Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan



Partai Rakyat Sosialis (PRS). Sedangkan partai politik yang berideologi komunis antara lain PKI dan Musyawarah Rakyat Banyak (Murba).

Perbedaan ideologi menjadi salah satu penyebab terjadinya pertikaian politik pada masa itu. Sebagai contoh antara PNI dengan Masyumi yang berbeda dalam hal yang menyangkut peran Islam dalam negara. Kemudian pertentangan ideologi juga terjadi antara PKI dengan partai-partai agamis, terutama partai-partai Islam.

b. Partai Politik dan Nasionalisme

Meski partai-partai politik tersekat-sekat berdasarkan garis-garis ideologi, namun semangat nasionalismenya sangat tinggi. Hal itu tercermin dari dukungan partai-partai politik terhadap semangat untuk menentang kolonialisme. Hal itu dimungkinkan karena sebagian besar pengurus dan kader partai politik adalah orang-orang yang turut berjuang pada era Perang Kemerdekaan 1945-1949 atau masa-masa pergerakan nasional.

c. Fungsi Representasi Partai Politik

Dalam negara demokrasi partai politik memiliki fungsi representasi, yaitu merespon dan mengartikulasi keinginan dari kader dan pemilihnya untuk disampaikan kepada pihak pemerintah. Partai politik juga akan menjadi pengawal yang akan memastikan pemerintah melaksanakan apa yang diinginkan oleh masyarakat luas. Partai politik yang ikut pemilu dan memenangkan sejumlah suara akan menempatkan wakilnya di dalam parlemen. Anggota partai yang masuk ke dalam parlemen ini membawa fungsi representasi dari warga negara yang memilih partai tersebut.



B. Tujuan dan Urgensi Penulisan

Tujuan penulisan naskah sumber arsip *Jejak Demokrasi Pemilu 1955* adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai khazanah arsip pemilu yang ada di ANRI, khususnya arsip yang berkaitan dengan Pemilu 1955. Dengan demikian, masyarakat pengguna arsip dapat lebih mudah mengakses tanpa perlu melakukan penelusuran arsip dalam waktu yang lama.

Urgensi penulisan naskah sumber arsip *Jejak Demokrasi Pemilu 1955* adalah agar masyarakat luas dapat memahami dan meneladani nilai-nilai demokrasi yang tercermin dalam Pemilu 1955. Diharapkan kisah sukses pelaksanaan Pemilu 1955 dapat menjadi inspirasi bagi pelaksanaan pemilu di Indonesia pada saat ini dan masa yang akan datang.

C. Arsip Sebagai Sumber

Arsip dalam berbagai medianya merupakan sumber primer dalam penulisan sejarah. Dalam penerbitan naskah sumber arsip *Jejak Demokrasi Pemilu 1955* ini dilakukan penelusuran tentang arsip-arsip yang berkaitan dengan kehidupan politik dan tata pemerintahan di era Demokrasi Parlementer. Arsip-arsip tersebut terdapat dalam khazanah arsip Kabinet Presiden Republik Indonesia 1950 – 1959, Sekretariat Negara: Kabinet Perdana Menteri Jilid I & II, Kementerian Penerangan 1954 – 1956 dari berbagai daerah, Nahdlatul Ulama (NU) 1948 – 1979, serta berita *Antara*.

Arsip yang ditampilkan dalam terbitan ini berupa arsip tekstual dan foto yang penyajiannya disertai dengan uraian tentang konteks peristiwanya. Diharapkan melalui



uraian itu arsip lebih dapat “berbicara” sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam. Meskipun demikian, arsip-arsip yang ditampilkan tetap memiliki bobot dan kredibel sehingga dapat dijadikan referensi pada tulisan ilmiah.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada naskah sumber arsip *Jejak Demokrasi Pemilu 1955* sebagai berikut: Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan dan urgensi penulisan, arsip sebagai sumber, dan sistematika penulisan. Bab II menjelaskan mengenai *stakeholder* terkait penyelenggaraan Pemilu 1955, biaya penyelenggaraan Pemilu 1955, pendataan dan pendaftaran pemilih, pencetakan surat suara dan distribusi logistik Pemilu 1955, serta sosialisasi dan kampanye Pemilu 1955, serta situasi keamanan menjelang Pemilu 1955. Bab III membahas mengenai pelaksanaan Pemilu 1955 di seluruh Indonesia berikut proses pencoblosan dan penghitungan suara, suasana di sekitar tempat pemungutan suara (TPS), partisipasi perempuan dalam Pemilu 1955, serta masalah yang muncul selama Pemilu 1955. Bab IV menjelaskan mengenai perolehan suara anggota DPR dan Konstituante pada Pemilu 1955. Sedangkan Bab V berisi penutup yang menjelaskan dampak Pemilu 1955 terhadap kehidupan politik bangsa Indonesia.



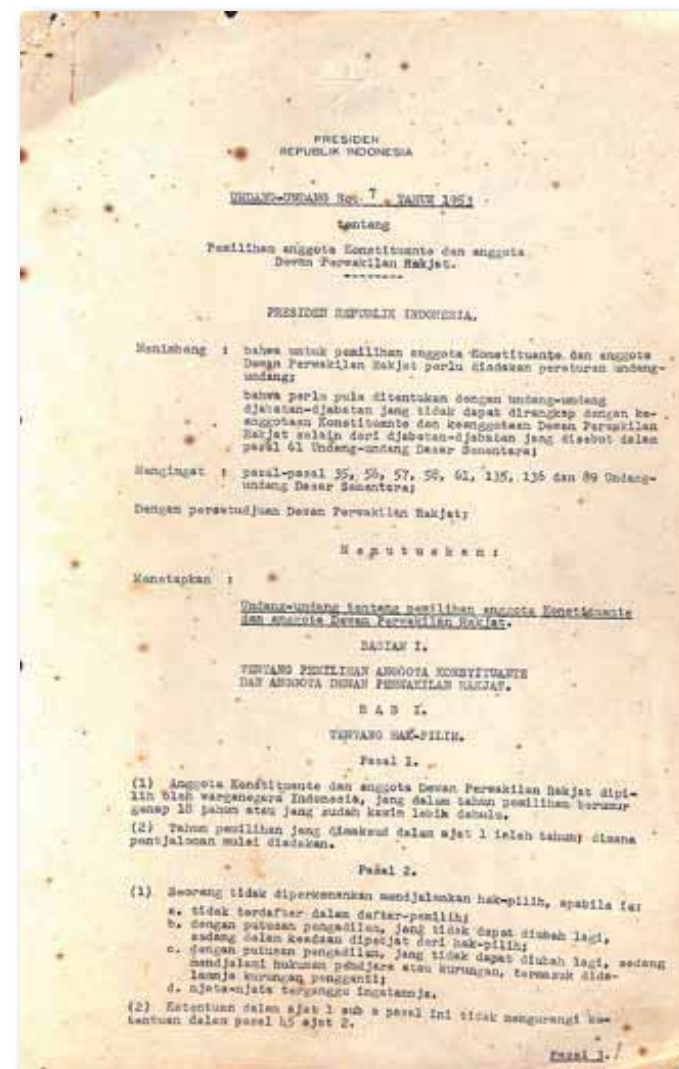
BAB II

Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 1955


Salah satu tolok ukur sebuah negara demokrasi adalah dilaksanakannya sebuah pemilu yang jujur dan adil. Pemilu merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat di mana rakyat mempunyai peran dalam suksesi kepemimpinan nasional. Bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu secara nasional untuk pertama kali pada tahun 1955 guna memilih anggota DPR dan Konstituante. Pemilu 1955 dilaksanakan dalam dua tahap, tahap pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 September untuk memilih anggota DPR dan tahap kedua yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember untuk memilih anggota Konstituante.

Dasar hukum pelaksanaan Pemilu 1955 adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan azas yang dianut dalam Pemilu 1955 adalah:

1. Jujur, artinya bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Umum, artinya setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan minimal dalam usia, mempunyai hak memilih dan dipilih.
3. Berkesamaan, artinya bahwa semua warga negara yang telah mempunyai hak pilih mempunyai hak suara yang sama, yaitu masing-masing satu suara.



Undang-undang No. 7 Tahun 1953 ▲
tentang Pemilihan Anggota Konstituante
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Sumber: ANRI, Sekretariat Negara Seri Produk
Hukum 1949-2005

- 
4. Rahasia, artinya bahwa setiap pemilih dalam memberikan suara dijamin tidak akan diketahui oleh siapa pun dan dengan cara apa pun mengenai siapa yang dipilihnya.
 5. Bebas, artinya bahwa setiap pemilih bebas menentukan pilihannya menurut hati nuraninya, tanpa ada pengaruh, tekanan, paksaan dari siapa pun dan dengan cara apa pun.
 6. Langsung, artinya bahwa pemilih langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya, tanpa perantara, dan tanpa tingkatan.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953, Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta Raya, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara-Tengah, Sulawesi Tenggara-Selatan, Maluku, Sunda Kecil Timur, Sunda Kecil Barat, dan Irian Barat.

Sedangkan sistem yang dipakai dalam Pemilu 1955 adalah perwakilan proporsional. Artinya setiap daerah pemilihan akan mendapat sejumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya, dengan ketentuan setiap daerah berhak mendapat jatah minimum 6 kursi untuk Konstituante dan 3 kursi untuk DPR. Jumlah anggota Konstituante adalah hasil bagi antara total jumlah penduduk Indonesia dengan 150.000 dibulatkan ke atas. Sedangkan jumlah anggota DPR seluruh Indonesia adalah total jumlah penduduk Indonesia dibagi 300.000 dan dibulatkan ke atas. Dengan demikian ada 260 kursi DPR yang diperebutkan dan 520 kursi Konstituante yang diperebutkan. Khusus untuk anggota Konstituante ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat oleh pemerintah.



A. Stakeholder Terkait Penyelenggaraan Pemilu 1955

Dalam menjamin suksesnya sebuah pemilu diperlukan kerja sama antar *stakeholder*, baik itu institusi pemerintah maupun institusi di luar pemerintah, termasuk di dalamnya masyarakat. Berikut ini *stakeholder* yang berperan serta dalam menyukseskan Pemilu 1955.


1. Lembaga Penyelenggara Pemilu 1955

Tulang punggung pemerintah dalam pelaksanaan Pemilu 1955 adalah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehakiman. Kedua kementerian tersebut berupaya menyusun perangkat hukum dan struktur kepanitiaan pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehakiman bekerja sama dengan Kantor Pemilihan Pusat (KPP) yang dibentuk melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1948.

Kementerian Kehakiman mengeluarkan beberapa keputusan dalam rangka menyusun struktur panitia Pemilu 1955. Menteri Kehakiman mengeluarkan instruksi No.JB.2/9/3 tanggal 7 Juli 1953 tentang penggantian nama Kantor Pemilihan Pusat (KPP), Kantor Pemilihan (KP), dan Kantor Pemungutan Suara (KPS) diganti menjadi Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), Panitia Pemilihan (PP), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman No.JB.2/9/4 Und. tanggal 23 April 1953 dan 5/11/37/KDN tanggal 30 Juli 1953 susunan kepanitiaan dalam Pemilu 1955 seperti berikut:

- a. PPI bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR. Keanggotaan PPI sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang dengan masa kerja 4 (empat) tahun.

- 
- b. PP dibentuk di setiap daerah pemilihan untuk membantu persiapan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR. Susunan keanggotaan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota dengan masa kerja 4 (empat) tahun.
 - c. Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) dibentuk di setiap kabupaten oleh Menteri Dalam Negeri yang bertugas membantu PP mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR.
 - d. PPS dibentuk di setiap kecamatan oleh Menteri Dalam Negeri dengan tugas mengesahkan daftar pemilih, membantu persiapan pemilihan anggota Konstituante dan anggota DPR, serta menyelenggarakan pemungutan suara. Keanggotaan PPS sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dan camat karena jabatannya menjadi Ketua PPS merangkap anggota. Wakil ketua dan anggota diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas nama Menteri Dalam Negeri.

Pada tanggal 3 Desember 1953 dilakukan serah terima tugas persiapan pemilu dari KPP kepada PPI. Upaya pembentukan PPI sebenarnya telah diupayakan oleh Kabinet Wilopo. Pada saat itu PPI diketuai oleh Mr. Asaat (non partai), tetapi terkatung-katung karena tidak dicapai kata sepakat dari partai-partai koalisi yang ada di kabinet mengenai susunan kepengurusannya. Baru ketika Kabinet Ali Sastroamidjojo berkuasa dilakukan penggantian kepengurusan PPI. PPI kemudian diketuai oleh S. Hadikusumo (PNI), jabatan wakil ketua dipegang oleh Rustam Sutan Palindih (PNI), Sudarnadi (PIR-Hazairin), Surjaningprodjo (NU), Sudibjo (PSII), H. Sofjan Siradj (Perti), Sumarto (Parkindo), Hartojo (PKI), dan Asraruddin (Partai Buruh). Susunan kepengurusan PPI ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1953 tentang Pengangkatan PPI tanggal 7 November 1953. Sayangnya partai-partai yang berposisi terhadap Kabinet Ali Sastroamidjojo tidak memiliki wakil dalam PPI.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.188 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk menjelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat perlu dibentuk Panitia Pemilihan Indonesia;
- Mengingat : pasal 17, dan 20 Undang-undang No.7 tahun 1953, tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 18 pada tanggal 3 Nopember 1953;

Memutuskan :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 7 Nopember 1953 mengangkat pada Panitia Pemilihan Indonesia:

- I. sebagai anggota:
1. S. Hadikusumo
 2. Rustam Sutan Palindih
 3. Sudarnadi
 4. Surjaningrodjo
 5. Sulibiyo
 6. H. Sofjan Siradj
 7. Sumarto
 8. Hartojo
 9. Asrarudin
- II. sebagai Ketua:
S. Hadikusumo
- III. sebagai Wakil Ketua:
Rustam Sutan Palindih.

Salinan kepada :

1. Perdana Menteri dan para Menteri,
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat,
 3. Dewan Pengawas Keuangan,
 4. Djawatan Perdjalanan,
 5. Kantor Pusat Perbendaharaan,
 6. Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia
- dan yang bersangkutan untuk diketahu dan didjelaskan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Nopember 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Suwarno

SUWARNO
MENTERI KEKAWAHAN,

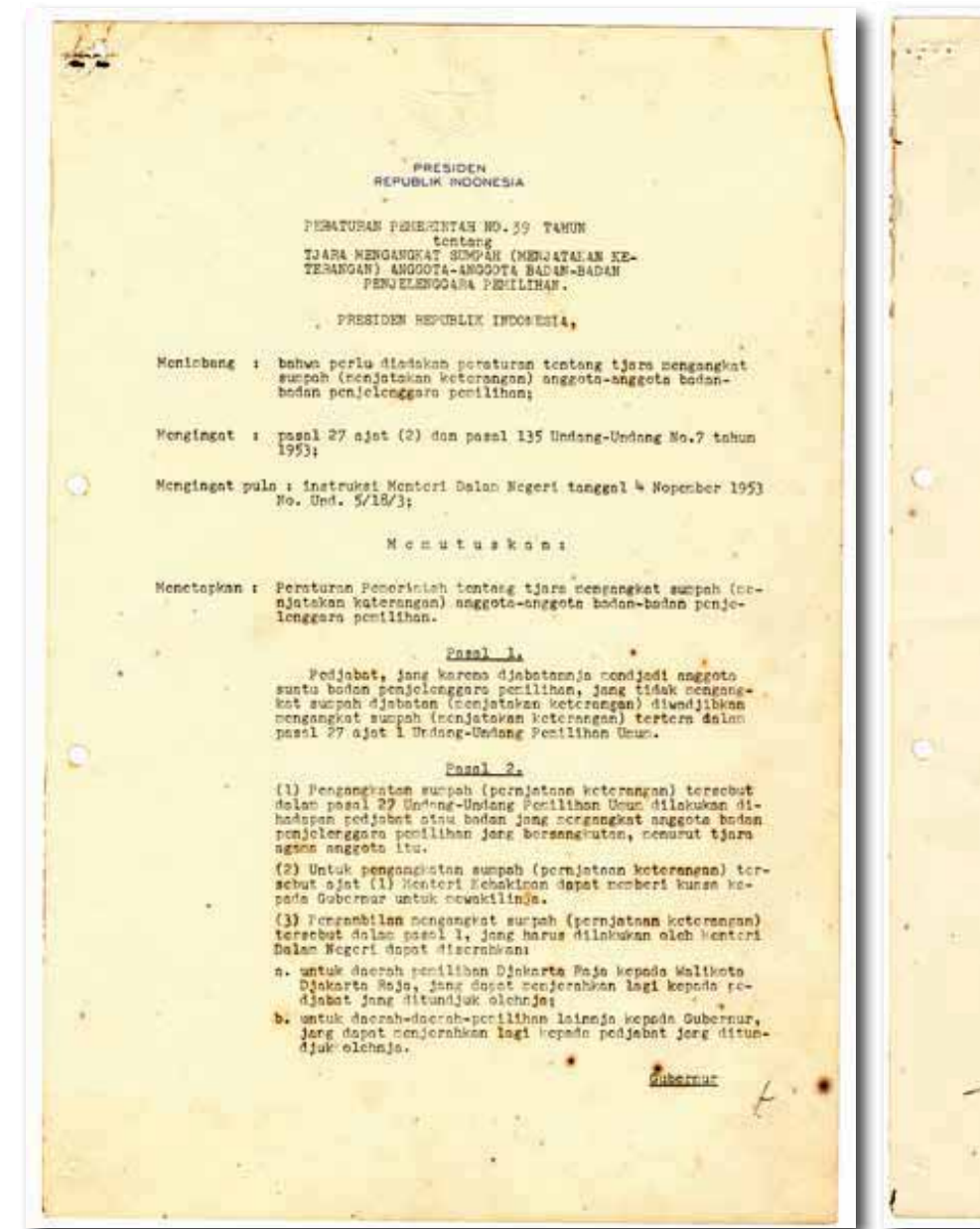
Sudikusumo
DJOJO GONDOKUSUMO

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 188 Tahun 1953 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia tanggal 7 November 1953

Sumber: ANRI, Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum Tahun 1949-2005 No. 5434

Pada tanggal 27 November 1953, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1953 tentang Cara Mengangkat Sumpah (Menyatakan Keterangan) Anggota-anggota Badan-badan Penyelenggara Pemilihan. Peraturan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan pelantikan PP, PPK, dan PPS di daerah-daerah.

Peraturan Pemerintah No. 39 tentang Cara Mengangkat dan Sumpah (Menyatakan Keterangan) Anggota-anggota Badan-badan Penyelenggara Pemilihan, 27 November 1953
Sumber: ANRI, Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum Tahun 1949-2005 No. 15434



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Gubernur dapat memberi kuasa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten untuk mengambil pengangkatan sumpah (pernyataan keterangan) anggota Panitia Pemilihan Kabupaten.
Panitia Pemilihan Kabupaten dapat memberi kuasa kepada Ketua Panitia Pengawasan Suara untuk mengambil sumpah (pernyataan keterangan) anggota Panitia Pengawasan Suara.
Tjapat dapat memberi kuasa kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih untuk mengambil sumpah (pernyataan keterangan) anggota Panitia Pendaftaran Pemilih.

Pasal 3.

Pengangkatan sumpah (pernyataan keterangan) yang dilakukan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 4 November 1953 No.Und.5/18/3 dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 diakhiri dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai hari diundangkan dan berlaku surut sampai dengan 7 April 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan memuatkannya dalam Lembaran-Negara.-

Disehkan di Djakarta
pada tanggal 27 November 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soekarno

(SOEKARNO).

MENTERI KEHAKIMAN,

Gondokoesono

(DJODY GONDOKOESONO).

MENTERI DALAM NEGERI,

Hazairin

(HAZAIRIN).

Diundangkan
pada tanggal 27 November 1953.

MENTERI KEHAKIMAN,

Gondokoesono

(DJODY GONDOKOESONO).

LEMBARAN-NEGARA No.71 TAHUN 1953.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No. 39 TAHUN
tentang
TJARA MENGAANGKAT SUMPAH (AENJATAKAN KETERANGAN)
ANGGOTA-ANGGOTA BADAN-BADAN PENJELANGGARA PEMILIHAN.

Pengangkatan sumpah pada pokoknya dilakukan dihadapan instansi yang mengangkat badan penyelenggara pemilihan yang bersangkutan, akan tetapi berhubung dengan jarak-djarak yang djauh, maka instansi itu boleh menguaskannya kepada instansi lain yang berhak djuga menggunakan hal itu lebih lanjut kepada pedjabat yang ditundjuknja.

Seorang pedjabat yang karena kedudukannya diserahi tugas dalam penyelenggaraan pemilihan umum ini, yang sudah mengangkat sumpah djabatan, tidak perlu mengangkat sumpah lagi menurut Peraturan Pemerintah ini.

Apabila pedjabat ternaksud belum mengangkat sumpah djabatannya, sedangkan sumpah djabatan itu ada, maka ia diharuskan mengangkat sumpah djabatan itu, dan kalau tidak ada, ia diharuskan mengangkat sumpah menurut Peraturan Pemerintah ini.

MENTERI KEHAKIMAN,

Gondokoesono

(DJODY GONDOKOESONO).

MENTERI DALAM NEGERI,

Hazairin

(HAZAIRIN).

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No.472.



Sejak bulan Januari 1954, struktur PP di daerah-daerah mulai dibentuk. Demikian pula di wilayah Jakarta Raya, PP Jakarta Raya dilantik dan diambil sumpahnya oleh Menteri Kehakiman Mr. Djody Gondokusumo. Ketua PP Jakarta Raya dijabat oleh seorang tokoh perempuan Ny. S. Pudjobuntoro. Sedangkan PPK untuk kabupaten di Jakarta Raya dilantik oleh Walikota Syamsuridjal. Pada gambar nampak Walikota Syamsuridjal sedang mengambil sumpah PPK untuk Kabupaten Jakarta Selatan, Kabupaten Jakarta Timur, dan Kabupaten Jakarta Tengah.





◀ Pelantikan anggota PP Jakarta Raya,
oleh Menteri Kehakiman Mr.Djody
Gondokusumo, Jakarta, 30 Januari 1954;
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 540130 FG 2

▲ Pelantikan PPK Kabupaten Jakarta
Selatan, Timur, dan Tengah oleh Walikota
Syamsuridjal, Jakarta Januari 1954
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 540129 FG 1-3



Pada tanggal 29 - 31 Maret 1954, PPI mengadakan konferensi di Jakarta untuk membahas langkah-langkah kerja pelaksanaan Pemilu 1955. Hadir sebagai pembicara dalam konferensi tersebut antara lain Presiden Sukarno, Ketua PPI S. Hadikusumo, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, dan Menteri Dalam Negeri Prof. Dr. Hazairin.



▲ Presiden Sukarno tengah memberikan amanat dalam pembukaan konferensi PPI tanggal 29 Maret 1954
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 540329 FG 2



▲ Ketua PPI S. Hadikusumo sedang menyampaikan pidato pada pembukaan konferensi PPI, Jakarta 29 Maret 1954
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 540329 FG 8



Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo ►
 tengah memberikan sambutan pada
 penutupan konferensi PPI tanggal
 31 Maret 1954
*Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 540331
 FG 2-2*

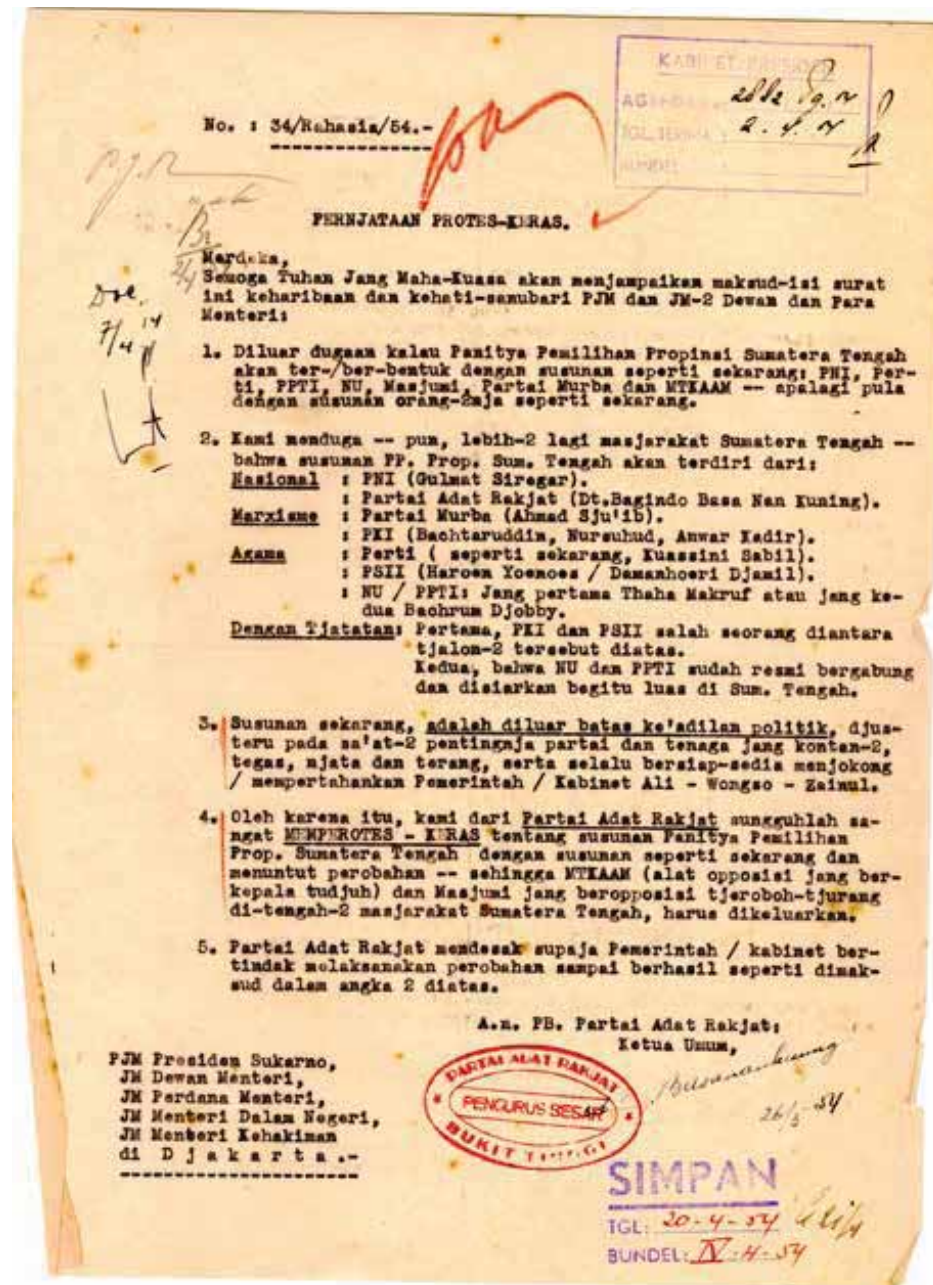


Menteri Dalam Negeri Prof. Dr. Hazairin ►
 tengah memberikan sambutan pada penutupan
 konferensi PPI, Jakarta, 31 Maret 1954
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 540331 FG 2-6

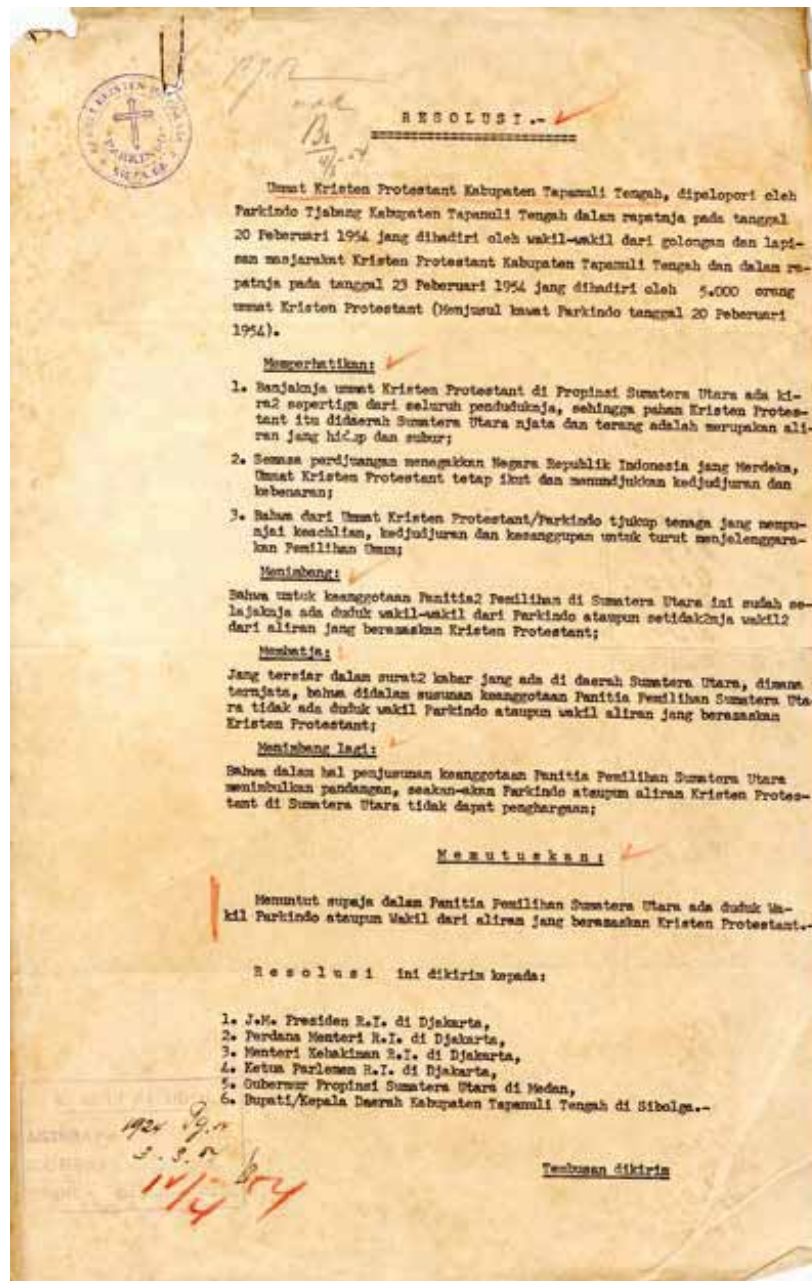
Dalam penyusunan PP di tingkat provinsi, sering diwarnai protes dari partai-partai yang tidak terwakili dalam PP. Hal ini terjadi dalam penyusunan PP di Provinsi Sumatera Tengah dan Sumatera Utara. Dalam kasus di Sumatera Tengah, Partai Adat Rakyat memprotes keras susunan PP di provinsi tersebut yang dianggap hanya menguntungkan koalisi Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro-Zainul Arifin.

Sedangkan di Sumatera Utara, Parkindo Cabang Tapanuli Tengah menuntut agar partai tersebut diberi kedudukan atau setidaknya ada wakil dari aliran yang berazaskan Kristen Protestan duduk dalam PP Sumatera Utara. Tuntutan tersebut didasarkan bahwa penganut agama Kristen Protestan jumlahnya sangat besar, yaitu sepertiga dari penduduk Sumatera Utara. Selain itu, umat Kristen Protestan Sumatera Utara juga memiliki kemampuan dan kejujuran dalam menyelenggarakan Pemilu 1955.

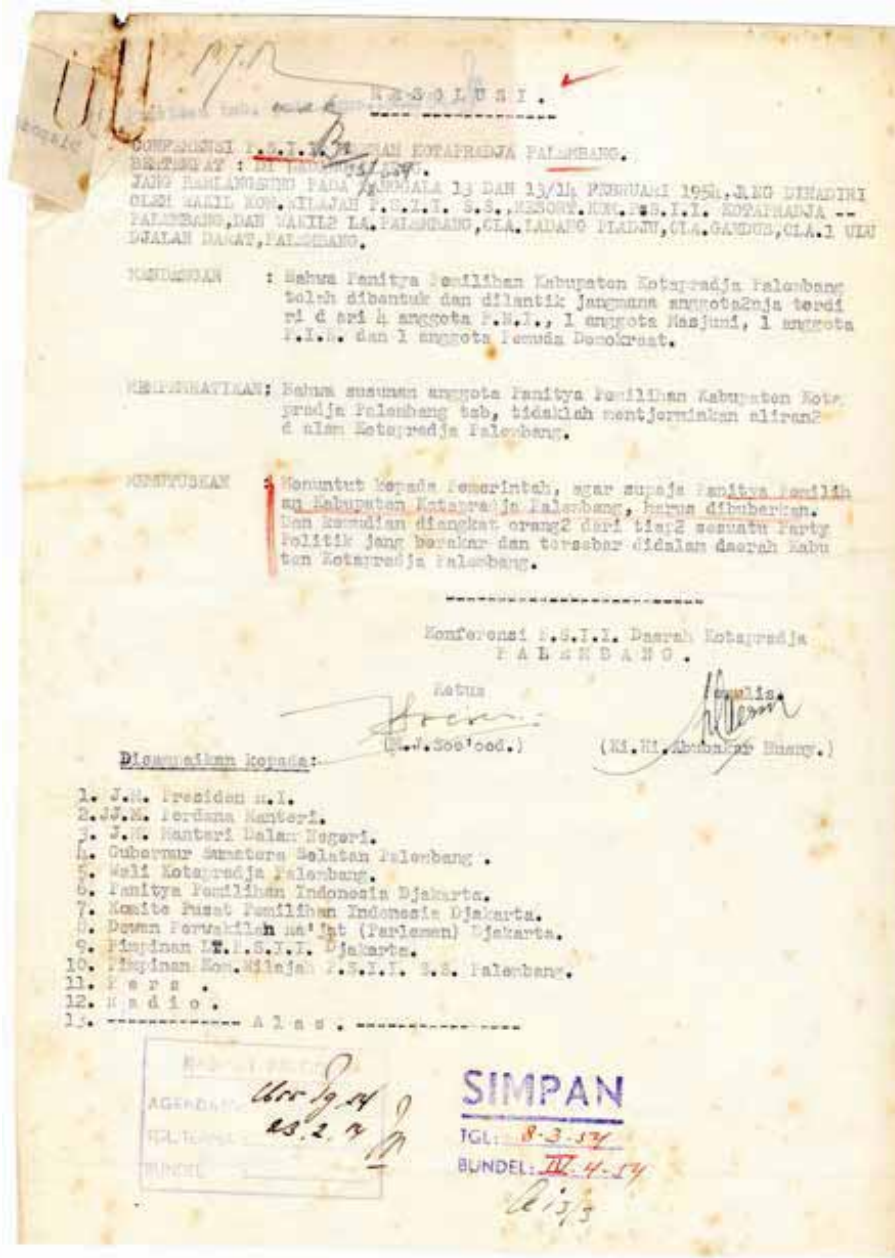
Pada kasus di Kotapraja Palembang, PSII cabang setempat mengeluarkan resolusi agar PP Kotapraja Palembang dibubarkan. Hal itu dikarenakan susunan PP Kotapraja Palembang yang terdiri atas 4 wakil PNI, 1 wakil Masyumi, 1 wakil PIR, dan 1 wakil Pemuda Demokrat tidak mencerminkan aliran-aliran politik yang ada di daerah tersebut. PSII Cabang Palembang menghendaki agar PP Kotapraja Palembang diisi oleh partai-partai yang memiliki pengaruh besar di Palembang.



▲ Pernyataan protes keras pengurus besar Partai Adat Rakyat Bukittinggi tanggal 26 Maret 1954 terhadap susunan PP Propinsi Sumatera Tengah yang telah terbentuk
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden 1950-1959 No. 963



▲ Resolusi Partai Kristen Indonesia (Parkindo) yang menuntut supaya dalam PP Sumatera Utara duduk wakil dari Parkindo
 Sumber: ANRI, Kabinet Presiden 1950-1959 No. 963

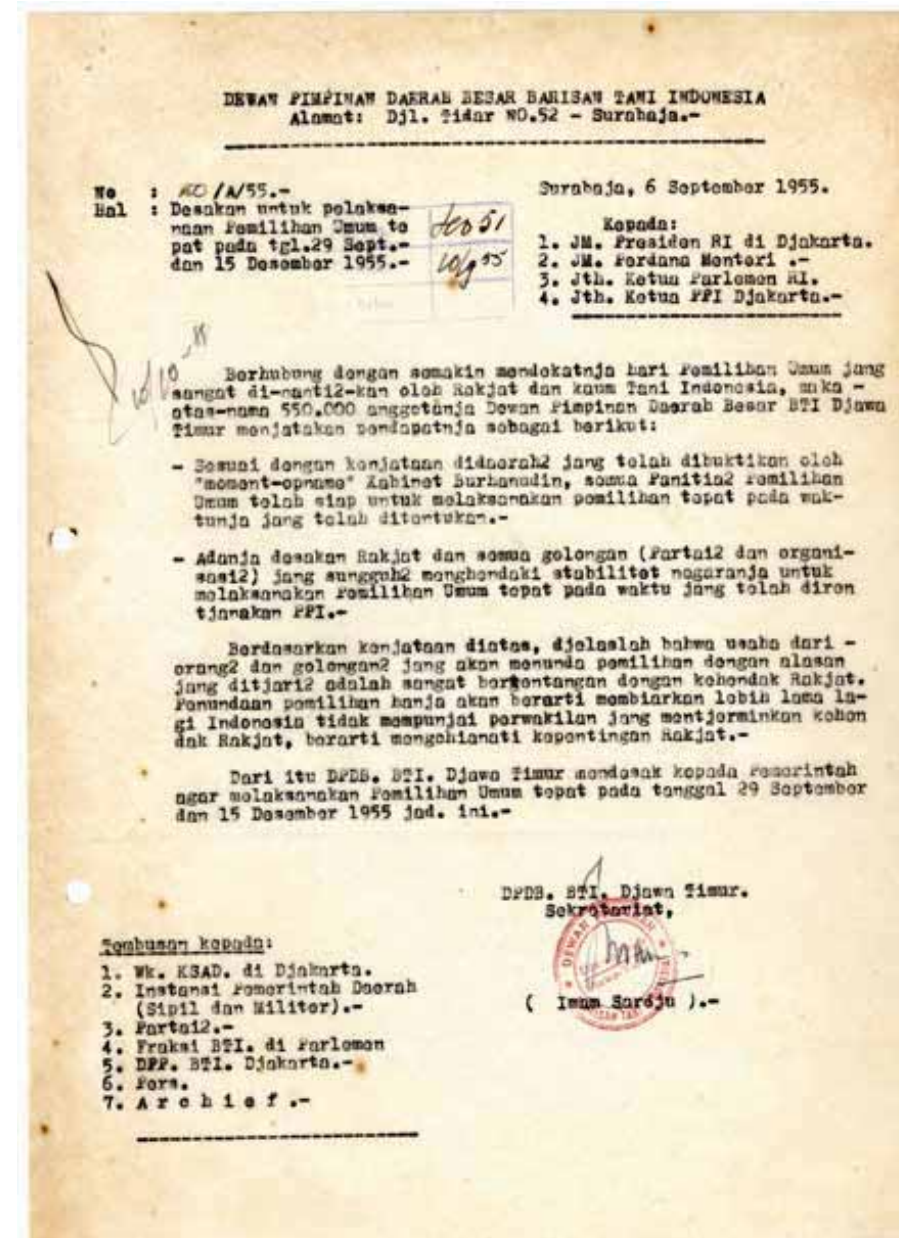


▲ Resolusi hasil konferensi PSII daerah Kotapraja Palembang tanggal 13-14 Februari 1954 yang memutuskan menuntut kepada pemerintah agar PPK Kotapraja Palembang dibubarkan
 Sumber: ANRI, Kabinet Presiden 1950-1959 No. 963

2. Peran Civil Society

Masyarakat menganggap pemilu merupakan cara yang terbaik untuk mengakhiri krisis politik pada saat itu. Bahkan muncul desakan masyarakat di berbagai daerah melalui organisasi massa dan partai politik agar mempercepat pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, ketika PPI mengumumkan pemilu untuk anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September dan pemilu untuk anggota Konstituante 15 Desember 1955 masyarakat menyambut gembira. Salah satunya organisasi massa BTI Jawa Timur yang mengeluarkan resolusi agar Pemilu 1955 dilaksanakan tepat waktu.

Selain menggunakan hak pilihnya, masyarakat juga turut aktif menjadi panitia dan menyediakan lokasi TPS di daerahnya masing-masing. Sedangkan anggota masyarakat yang menjadi kader partai politik atau organisasi massa peserta pemilu turut aktif memasang alat peraga kampanye di sekitar tempat tinggalnya. Nampak pada gambar masyarakat di suatu desa di Cirebon sedang bergotong royong membangun TPS untuk pemilu Konstituante. Dalam pembangunan TPS di kampung-kampung semua warga terlibat tanpa membedakan aliran politiknya.



▲ Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Besar BTI mengenai desakan untuk melaksanakan pemilu tepat waktu, 6 September 1955

Sumber: ANRI, *Nahdlatul Ulama tahun 1948-1979* No. 2307



Suasana pembangunan TPS untuk pemilu ▲
Konstituante di Cirebon, Desember 1955
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta KR 560322 FG 2-25



3. Media Massa

Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya media massa yang bebas. Dalam Pemilu 1955 media massa cetak dan elektronik memainkan peran penting baik dalam proses sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan pemilu di seluruh Indonesia. Kegiatan pemantauan bukan hanya dilakukan oleh media massa Indonesia, namun juga media massa luar negeri baik cetak maupun elektronik.

Guna memberi pemahaman kepada seluruh warga masyarakat mengenai kegiatan PPI dalam penyelenggaraan Pemilu 1955, PPI secara berkala mengadakan konferensi pers. Para awak media sedang mendengarkan keterangan Ketua PPI S. Hadikusumo dalam sebuah konferensi pers pada tanggal 12 Maret 1954. Pada kesempatan lain nampak reporter RRI Darmo Sugondo sedang mewawancarai Ketua Umum PSI Sutan Sjahrir dan Ny. Poppy Sjahrir yang sedang mengantre di TPS tanggal 29 September 1955.



▲ Ketua PPI S.Hadikusumo sedang memberikan keterangan pada acara konferensi pers, Jakarta, 13 Maret 1954
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 540312 FG 2



Ketua Umum PSI Sutan Sjahrir sedang ▲
diwawancarai oleh reporter RRI Darmo
Sugondo, Jakarta 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 2-22

Pada saat itu, partai-partai politik juga memiliki media massa dalam bentuk surat kabar seperti *Suluh Indonesia* di bawah PNI, *Harian Rakyat* di bawah PKI, *Duta Masyarakat* di bawah NU, dan *Abadi* di bawah Masyumi. Surat kabar tersebut berperan melakukan sosialisasi program-program partai kepada kader dan simpatisannya di seluruh Indonesia. Ketika tensi politik semakin meningkat menjelang Pemilu 1955 peran surat kabar sebagai media agitasi dan propaganda juga meningkat. Surat kabar milik partai politik digunakan sebagai sarana untuk menjatuhkan partai lawan dan membentuk opini publik. Dalam opini publik tersebut dibangun citra partai sendiri lebih baik dari partai lawan.

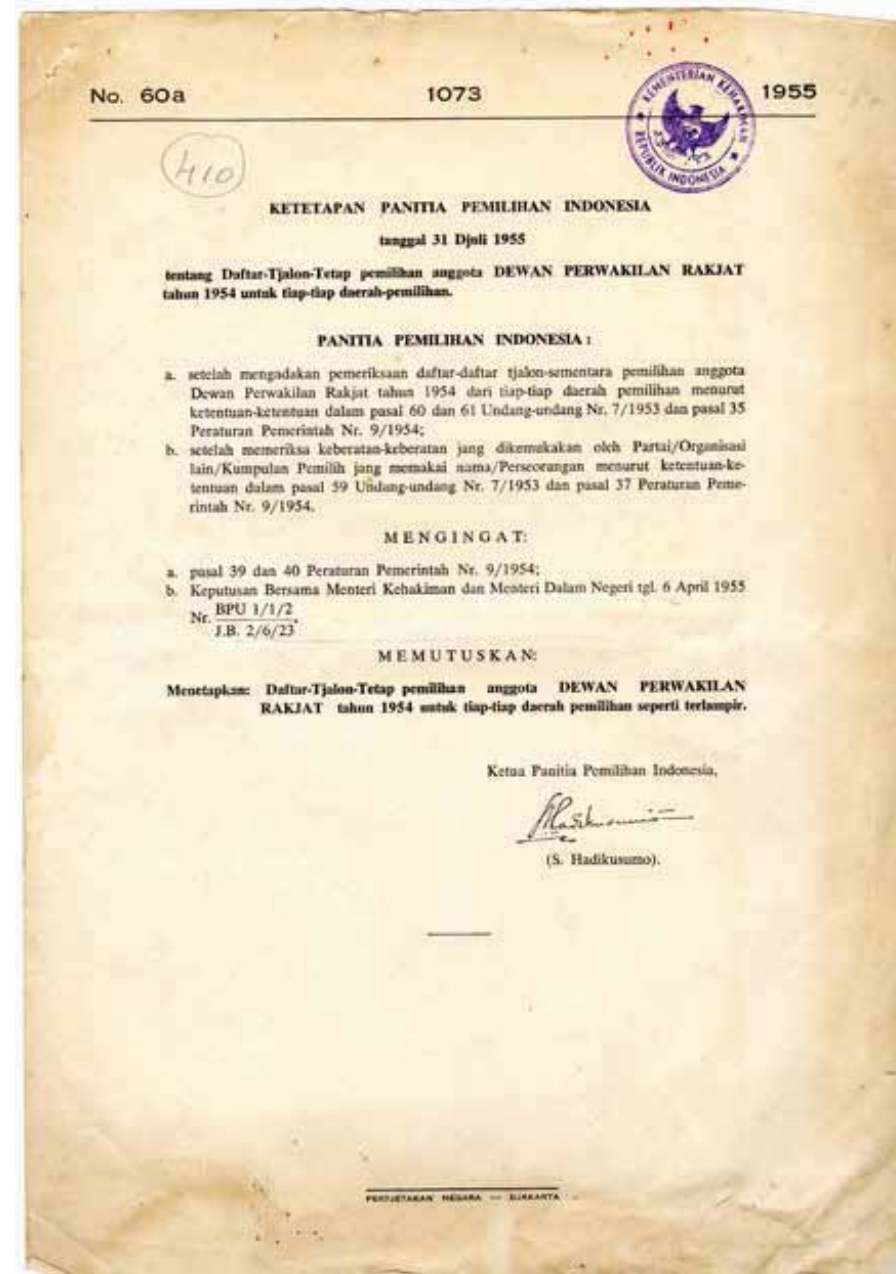


4. Kontestan Pemilu 1955

Pada Pemilu 1955 kontestan tidak hanya berasal dari partai politik, namun juga organisasi massa dan calon perorangan (orang tidak berpartai). Pemilihan anggota DPR diikuti oleh 36 partai politik, 34 organisasi massa, dan 48 calon perorangan. Mereka memperebutkan 260 kursi di DPR. Sedangkan pemilihan anggota Konstituante diikuti oleh 39 partai politik, 23 organisasi massa, dan 29 calon perorangan. Mereka memperebutkan 520 kursi Konstituante. Para peserta Pemilu 1955 bisa mengajukan nama-nama calon anggota DPR dan Konstituante pada bulan Desember 1954.

Guna keperluan administrasi pemilu, PPI telah mengeluarkan daftar para calon tetap anggota DPR berikut dengan keterangan mengenai tanda gambarnya.

Ketetapan PPI tentang daftar calon tetap pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 1954 untuk tiap-tiap daerah pemilihan, 31 Juli 1955
Sumber: ANRI, Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri RI 1950-1959 No.1923





No. 60A 1061 1955

No.	Party Name	Symbol	Registration Date	Headquarters	Chairman	Secretary	Member	Branch	Other
1	Indonesian National Party								
2	Indonesian Muslim Party								
3	Indonesian Communist Party								
4	Indonesian Socialist Party								
5	Indonesian National Front								
6	Indonesian National Front								
7	Indonesian National Front								

No. 60A 1064 1955

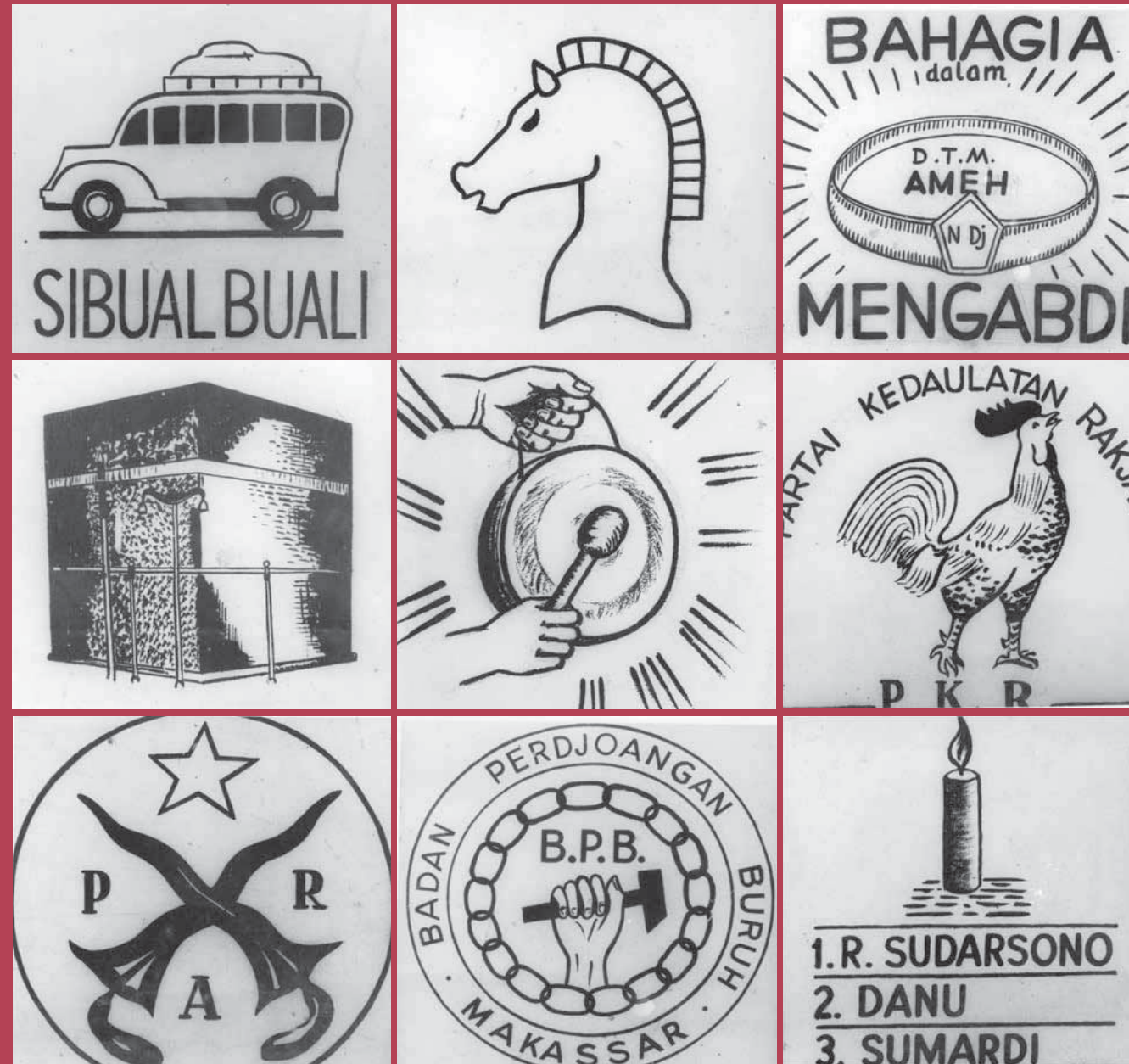
No.	Party Name	Symbol	Registration Date	Headquarters	Chairman	Secretary	Member	Branch	Other
1	Indonesian National Party								
2	Indonesian Muslim Party								
3	Indonesian Communist Party								
4	Indonesian Socialist Party								
5	Indonesian National Front								
6	Indonesian National Front								
7	Indonesian National Front								

No. 60A 1062 1955

No.	Party Name	Symbol	Registration Date	Headquarters	Chairman	Secretary	Member	Branch	Other
1	Indonesian National Party								
2	Indonesian Muslim Party								
3	Indonesian Communist Party								
4	Indonesian Socialist Party								
5	Indonesian National Front								
6	Indonesian National Front								
7	Indonesian National Front								
8	Indonesian National Front								
9	Indonesian National Front								

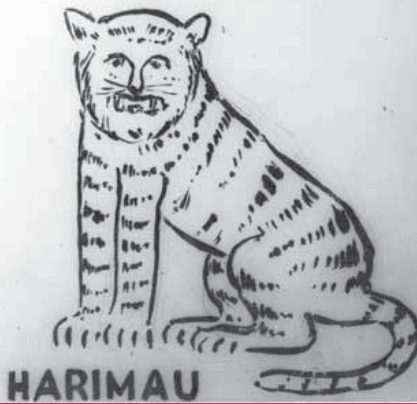
No. 60A 1063 1955

No.	Party Name	Symbol	Registration Date	Headquarters	Chairman	Secretary	Member	Branch	Other
1	Indonesian National Party								
2	Indonesian Muslim Party								
3	Indonesian Communist Party								
4	Indonesian Socialist Party								
5	Indonesian National Front								
6	Indonesian National Front								
7	Indonesian National Front								
8	Indonesian National Front								



▲ Beberapa tanda gambar kontestan Pemilu 1955, baik itu partai politik, organisasi massa, maupun perorangan
 Sumber: ANRI, Kempen Jakarta 1955

R.O. SURAMIHARDJA

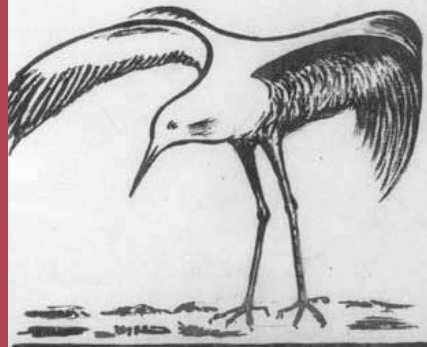


HARIMAU



ISHAK EFFENDY

TJUPU MANIK
ASTA GINA

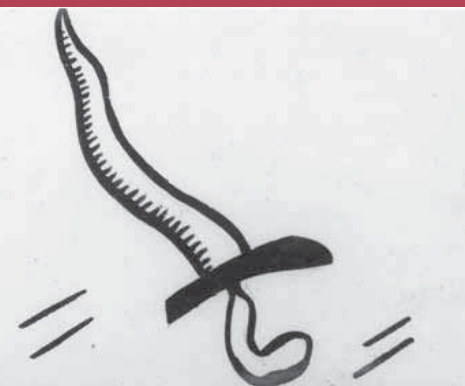


M. KAMIL

BAHAGIA



GULMAT
BAHAGIA



R. WIRJODIHARDJO





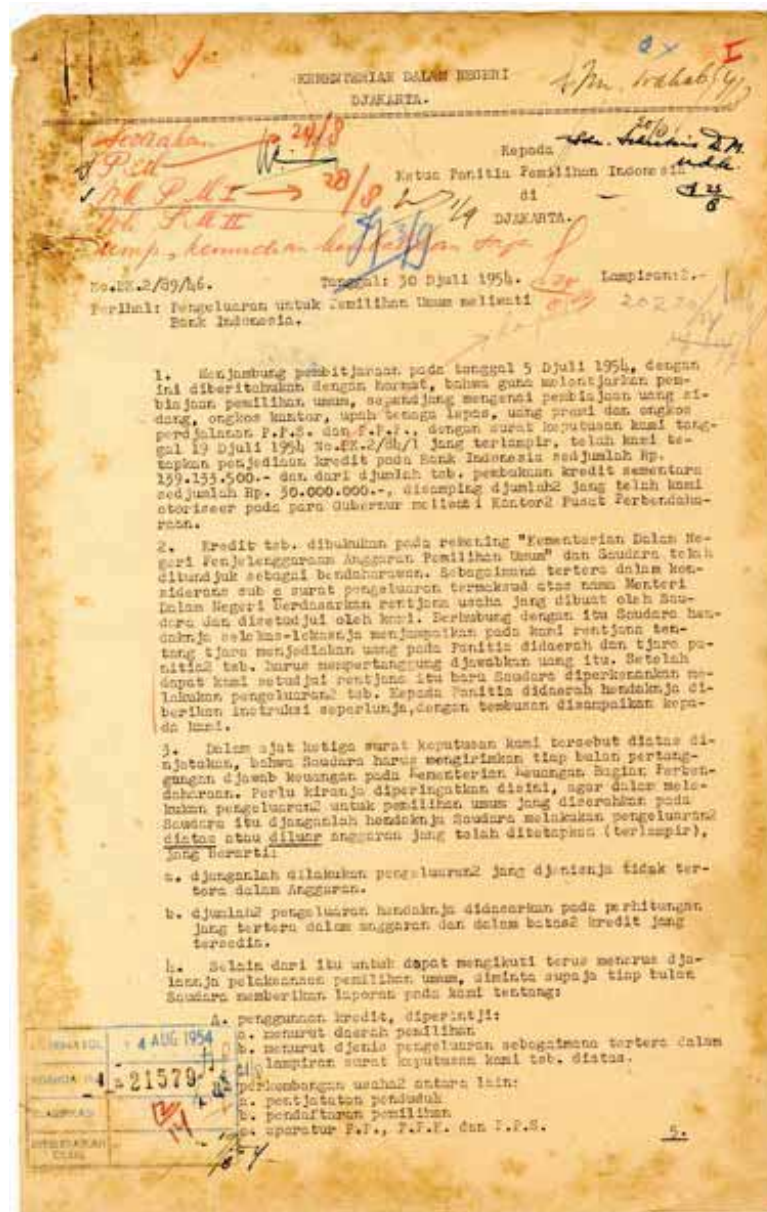
B. Biaya Penyelenggaraan Pemilu 1955

Meski dalam kondisi perekonomian yang sulit, namun pemerintah berupaya menyelenggarakan Pemilu 1955 dengan baik. Penyelenggaraan Pemilu 1955 menelan biaya sebesar Rp 479.891.729. Dana sebesar itu digunakan untuk membiayai honor para panitia penyelenggara, sosialisasi pemilu, pencetakan surat suara, pembuatan bilik-bilik pencoblosan, serta distribusi surat suara ke seluruh Indonesia.

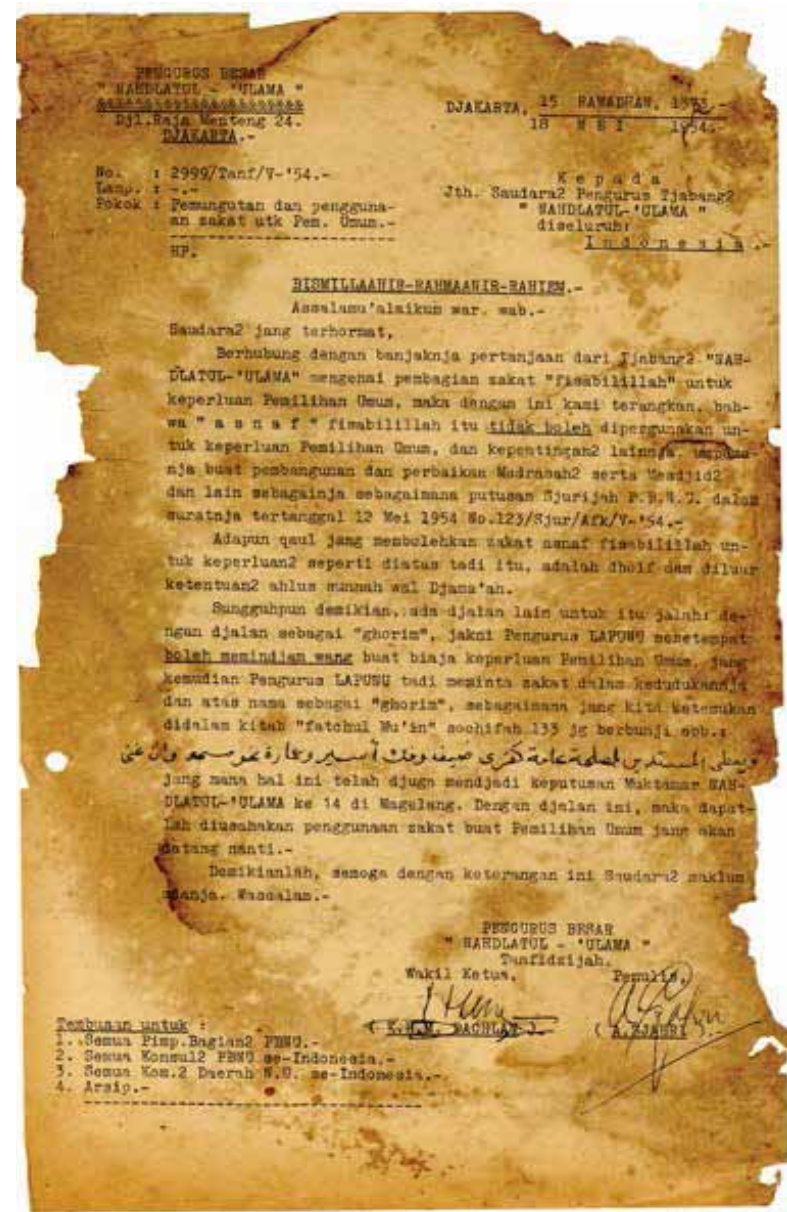
Semua pengeluaran untuk membiayai Pemilu 1955 dianggarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan penyalurannya melalui Bank Indonesia. PPI bertanggung jawab mengelola dana tersebut, termasuk di dalamnya memberi panduan kepada PP di daerah tentang penggunaan dana tersebut. Selain itu, Ketua PPI secara berkala harus membuat laporan kepada Menteri Dalam Negeri.

Sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh para kontestan pemilu tidak ada data yang pasti. Namun secara umum dana yang digunakan oleh partai politik dan organisasi kemasyarakatan peserta pemilu berasal dari iuran anggotanya dan sumbangan-sumbangan dari simpatisan atau perusahaan. Pada masa ini muncul isu-isu yang menyatakan bahwa partai-partai Islam seperti Masyumi dan NU yang menggunakan dana zakat untuk membiayai kegiatan kampanye politiknya. Demikian juga PNI sebagai partai penguasa memperoleh keuntungan dari kadernya yang duduk di institusi pemerintahan.

Menjawab kegelisahan para pengurus NU di daerah mengenai dalil penggunaan zakat untuk membiayai kegiatan pemilu maka PB NU mengeluarkan pernyataan yang dapat dijadikan pedoman bagi pengurus NU di daerah. Para pengurus NU di daerah boleh meminjam dana zakat untuk pemilu asal para pengurus dalam kedudukan sebagai *ghorim* (orang yang berhutang).



▲ Surat Menteri Dalam Negeri kepada PPI tentang pengeluaran untuk pemilu melalui Bank Indonesia, 30 Juli 1954
 Sumber: ANRI, Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri RI 1950-1959 No. 1121



▲ Surat PB NU mengenai pemungutan dan penggunaan zakat untuk pemilu, 18 Mei 1954
 Sumber: ANRI, Nahdlatul Ulama tahun 1948-1979 No. 2301

C. Pendataan dan Pendaftaran Pemilih

Proses pendataan dan pendaftaran pemilih dimulai pada bulan Mei dan selesai pada bulan November 1954. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih minimal telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Pada saat itu tercatat 43.104.464 pemilih dari total 77.987.879 penduduk Indonesia. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut maka ditetapkan kursi yang diperebutkan untuk anggota Konstituante sebanyak 520 kursi dan DPR 260 kursi.

Pendataan dan pendaftaran pemilih di Jakarta dimulai pada bulan Mei 1954. Guna mengejar target maka pendataan dilakukan siang dan malam. Pada gambar di samping tampak warga kampung Kebon Sirih Timur Gang XIII tengah didata oleh petugas Panitia Pendaftaran Pemilih. Terlihat warga sangat antusias mendaftarkan diri sebagai calon pemilih dalam Pemilu 1955.

Tabel daerah pemilihan dan jumlah perwakilan untuk duduk dalam Konstituante/DPR di seluruh Indonesia
Sumber: ANRI, Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri 1950-1959 No. 1920

- 1 -

PENDUDUK MARGA NEGERA INDONESIA
UNTUK SELURUH NEGERA DAN UNTUK Masing-Masing DAERAH
PEMILIHAN DAN HASIL PENETAPAN DJumlah ANGGOTA KON-
STITUANTE DAN DJumlah ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAK -
JAT JANG BOLEH DIPILIH UNTUK SELURUH NEGERA DAN UN-
TUK Masing-Masing DAERAH PEMILIHAN.

Nr.	Untuk daerah pemilihan	Djumlah anggota KONSTITUANTE yang boleh di pilih.	Djumlah anggota D.P.R. yang boleh dipilih.	Djumlah penduduk Marga Negara Indonesia
1.	2	3	4	5
1.	Djawa-Timur	117	58	17.950.818
2.	Djawa-Tengah	115	57	17.602.101
3.	Djawa-Barat	94	47	14.419.993
4.	Djakarta Raya	11	6	1.664.640
5.	Sumatera-Selatan	20	10	3.155.898
6.	Sumatera-Tengah	22	11	3.360.546
7.	Sumatera-Utara	32	16	4.894.787
8.	Kalimantan-Barat	8	4	1.108.929
9.	Kalimantan-Selatan	11	6	1.629.298
10.	Kalimantan-Timur	6	3	353.979
11.	Sulawesi-Utara-Tengah	11	6	1.605.850
12.	Sulawesi-Tenggara-Selatan	29	14	4.459.295
13.	M a l u k u	6	3	685.704
14.	Susa-Tenggara-Timur	15	8	2.163.545
15.	Susa-Tenggara-Barat	17	8	2.579.107
16.	I r i a n - B a r a t	6	3	333.387
Djumlah untuk seluruh Negara:		520	260	77.987.879

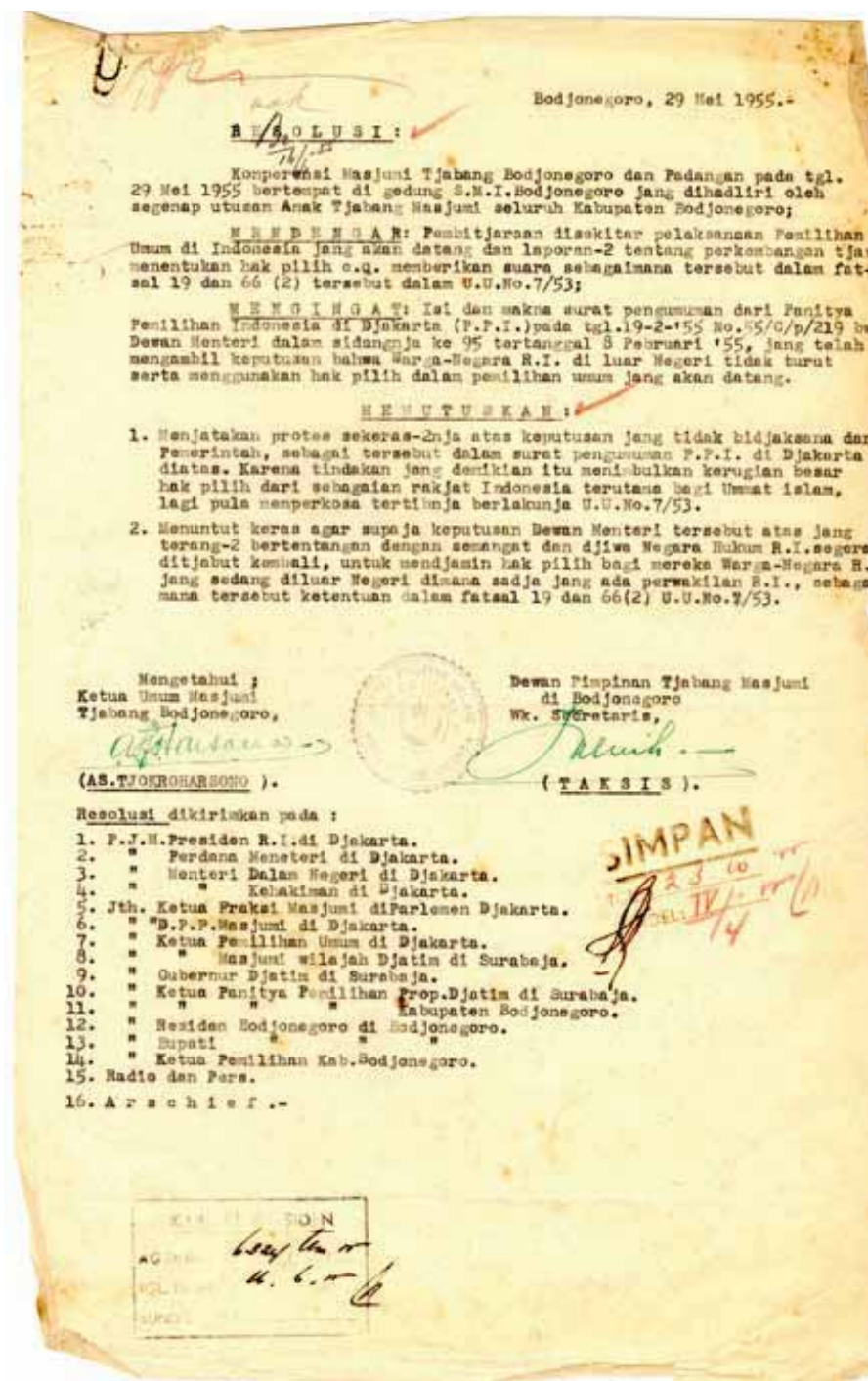


Pendaftaran untuk pemilu di daerah Jakarta ▲
Raya, para petugas tengah mencatat nama
penduduk Kampung Kebon Sirih Timur
Gang XIII, Jakarta, 3 Mei 1954
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 540503 FG 1

Bagi WNI yang berada di luar negeri tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam Pemilu 1955. Hal tersebut diputuskan dalam rapat Dewan Menteri ke-95 tanggal 8 Februari 1955 dan termuat dalam Surat Pengumuman PPI Nomor 55/C/p/219 bw tanggal 19 Februari 1955. Menanggapi pengumuman tersebut Dewan Pimpinan Masyumi Cabang Bojonegoro mengeluarkan resolusi yang mengancam kebijakan itu. Karena kebijakan tersebut berpotensi merugikan umat Islam. Dewan Pimpinan Masyumi Cabang Bojonegoro menuntut seharusnya di negara-negara yang ada perwakilan pemerintah RI diselenggarakan pemilu untuk WNI.

Resolusi DPC Masyumi Cab. Bojonegoro tentang isi dan makna pengumuman dari PPI, yaitu WNI yang di luar negeri tidak turut serta menggunakan hak pilih dalam pemilu, 29 Mei 1955

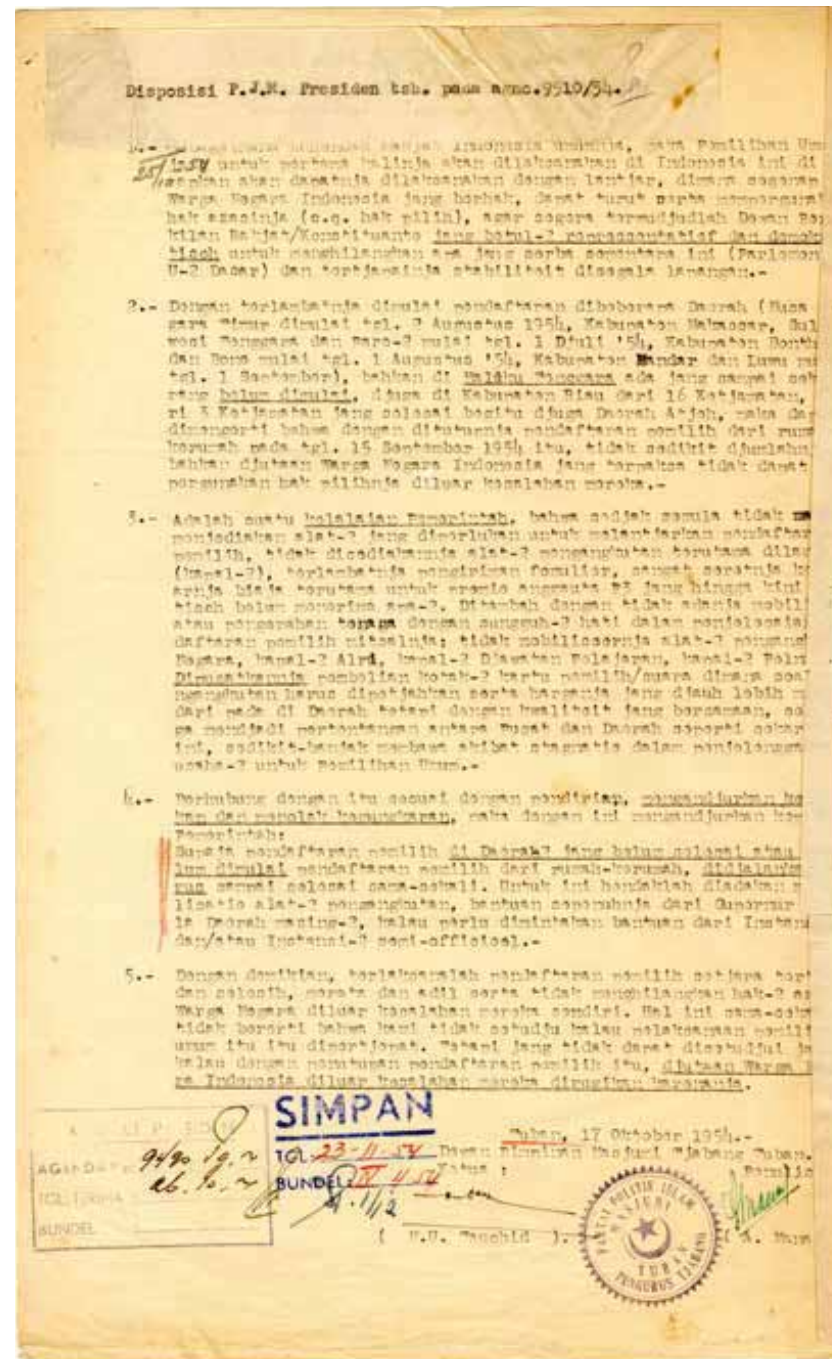
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI No. 987





Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala di berbagai daerah, seperti keterlambatan pendataan dan pendaftaran pemilih. Hal itu terungkap dalam surat Dewan Pimpinan Masyumi Cabang Tuban kepada Presiden Sukarno pada tanggal 17 Oktober 1954. Dewan Pimpinan Masyumi Cabang Tuban kemudian meminta pemerintah pusat dan daerah bersangkutan agar lebih proaktif melakukan pendataan dan pendaftaran pemilih dengan mengerahkan seluruh sarana yang ada.

Pernyataan DPC Masyumi Tuban tentang keterlambatan pendataan calon pemilih pemilu di berbagai daerah, 17 Oktober 1954
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 No. 975





D. Pencetakan Surat Suara dan Distribusi Logistik Pemilu 1955

Mengenai pencetakan surat suara, PPI menargetkan akan selesai pada tanggal 31 Juli 1955. Proses pencetakan surat suara dilaksanakan oleh Percetakan Negara dengan dibantu oleh 21 percetakan swasta di Jakarta dan Bandung. Percetakan Negara dan rekanannya mencetak 1.948.000 daftar calon tetap, serta 96.000.000 surat suara dan dokumen lainnya. Dalam proses pencetakan tersebut dibutuhkan 2.250 ton kertas HVS. PPI juga telah mengucurkan dana sebesar Rp 5 juta untuk biaya pembuatan peti-peti surat suara, pengepakan, serta distribusi logistik pemilu ke berbagai daerah.

Kegiatan pencetakan surat suara di Percetakan Negara dilakukan siang-malam. Setelah surat suara dicetak kemudian dilipat dan dipak ke dalam peti, selanjutnya ditimbang dan didistribusikan ke berbagai daerah.



Suasana di Percetakan Negara, di mana ▲
formulir-formulir tanda gambar untuk
pemilu sedang dicetak, 23 Juli 1955
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 550723 FG 3-8



▲ Formulir-formulir tanda gambar untuk pemilu sedang dicetak di Percetakan Negara Jakarta, 23 Juli 1955
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 550723 FG 3-7



Formulir tanda-tanda gambar sedang dilipat dan dihitung ▲
untuk dikirimkan ke daerah-daerah, 23 Juli 1955
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 550723 FG 3-6, 550723 FG 3-11



▲ Formulir-formulir tanda gambar untuk pemilu tengah dimasukkan ke dalam peti untuk dikirim ke daerah-daerah, 23 Juli 1955
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 550723 FG 3-12

Seorang petugas sedang mendata peti-peti surat suara, 23 Juli 1955
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 550723 FG 3-13









◀ Ruang pengiriman formulir tanda-tanda gambar untuk pemilu 23 Juli 1955
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 550723 FG 3-10

◀ Kertas suara untuk pemilu yang telah dikemas ke dalam peti kayu untuk didistribusikan ke daerah-daerah, 23 Juli 1955
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 550723 FG 3-14

Proses pendistribusian logistik pemilu merupakan tantangan tersendiri bagi PPI dan perangkat di bawahnya mengingat wilayah Indonesia sangat luas. Namun demikian telah diupayakan kerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI). Pihak Kementerian Perhubungan akan menggerakkan Jawatan Kereta Api, Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), dan Garuda Indonesia Airways (GIA). Sedangkan AURI akan menggerakkan pesawat udara yang dimilikinya ke daerah-daerah terpencil yang berada di luar jangkauan GIA.

Pengiriman alat-alat pengangkutan surat suara ► melalui darat, laut, dan udara, 15 Juli 1955
 Sumber: ANRI, Berita Antara Juli 1955

No. 126/L.- - 7 - DALAM WISUDA, DJAKARTA, 15-7-1955 (ASR).-

(13). PPI DJAMIN PEMILIHAN UMUM DAPAT DILAKUKAN
PADA WAKTU
"Kembali dike ada hal2 diluar tugas
dan Kekuasaan PPI"

Djakarta, 15/7 (Antara).-

Bertempat diadakan Panitia Pemilihan Indonesia, Djakarta pagi ini diadakan konferensi pers, dimana ketua PPI, S. Hadikusumo, menerangkan, bahwa pemungutan suara untuk DPR dan Konstituante pasti dapat dilaksanakan pada tanggal 29 September dan 15 Desember tahun ini, seperti apa yang sudah ber-kali2 dikabarkan, katjuski kalau terhalang oleh hal2 yang berada diluar tugas dan kekuasaan PPI selalu penjalangannya.

Ditanya, apa yang dikehendaki dengan "hal2 yang berada diluar tugas dan kekuasaan PPI" itu, Hadikusumo menjawab, misalnya gempa bumi, banjir, dan lain2 yang mungkin terjadi pada hari pemungutan suara disesuai dengan. Hadikusumo tidak bersedia menjawab, bagaimana pelaksanaan pemilihan umum kalau kabinet jatuh, karena - menurut Hadikusumo - PPI dalam melaksanakan tugasnya tidak mengutamakan pemusatan pada perkembangan politik.

Selanjutnya ketua PPI itu menerangkan, bahwa tertajapnya hasil2 pemilihan yang sudah dilakukan diakhirnya, sehingga pemungutan suara akan dapat dilakukan pada waktunya, sebagian besar disebabkan oleh kerendahan yang baik antara pemerintah dan PPI.

Tentang kerangka2 tetapan yang diperlukan untuk pemilihan umum, ketua PPI mengatakan, bahwa kerangka2 itu dijamin akan selesai pada tanggal 31 Juli yang akan datang dan diterangkan, bahwa untuk membuat 1.300.000 daftar pilihan-tetapan dan 90.000.000 surat2 suara dan lain2 sebagainya (buat Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante) dibutuhkan 2.250 ton kertas H.V.S.; kertas2 itu sudah tersedia dan sudah dipertemukan, sedang untuk pembukitan part2 untuk pemirisan kertas-kertas, proses mengopak dan sebagainya sebesar Rp. 5.000.000,- sudah ditentukan kepada Partai-partai Negara.

Kesulitan2 teknis yang mungkin dapat menjadi penghalang, ternyata dapat diatasi, bahkan terdapat kesanggupan yang merupakan jaminan dari Direktur Persefakan Negara, bahwa semua kerangka2 tetapan yang dibutuhkan untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat seluruhnya dapat disediakan pada tanggal 31 Juli yang akan datang. Sedangkan ini sebenarnya sudah selesai dikardjikan dan sudah dikirim untuk Maluku Utara, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat; untuk Nusa Tenggara Timur, Maluku Selatan, Kalimantan Selatan dan sebagainya (daerah2 yang jauh letaknya dari pusat) akan menyusul dalam beberapa hari ini juga.

Tentang alat2 perhubungan/pengangkutan

Untuk mendijera semua surat2 suara dan sebagainya dengan terlambat dikirim di daerah-daerah, maka telah dimulai adanya "pengangkutan" alat2 pengangkutan melalui darat, laut dan udara. Dalam hal ini nampak adanya koordinasi yang teratur dibawah pimpinan Komandemen Perhubungan Nasional Djawatan Kereta Api, Djawatan Persewaan, Pelni, GIA dan sebagainya. Untuk tempat2 yang dipandang sulit ditinjau dari sudut perhubungan, telah didapat kesanggupan dari KAU dan adanya untuk memberi bantuan melalui perantara AURI dan melakukan "droping" disana perlu.

Ditanyakan dengan hasil2 yang diperoleh sudah dari tingkat persiapan sampai sekarang, setelah kira-kira, bahwa soal2 teknis, organisasi dan administratif yang menjadi tugas dari badan2 penjalangannya dapat diselesaikan dan sebagainya pastinya. Oleh karena itu, maka kekhawatiran kalau terdapat tindakan2 yang dipikirkan (proceed) adalah bertentangan dengan kenyataan.

(13.30).
 Lebih....



E. Sosialisasi dan Kampanye Pemilu 1955

1. Sosialisasi Pemilu 1955

Salah satu tahapan dalam pemilu adalah sosialisasi dan kampanye. Kegiatan sosialisasi Pemilu 1955 bertujuan untuk memberi gambaran kepada masyarakat luas mengenai proses pelaksanaan pemilu berikut tujuannya. Melalui kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 1955 menjadi besar. Sosialisasi Pemilu 1955 dilakukan dalam berbagai media, termasuk melalui pemasangan baliho, pamflet, dan poster di berbagai tempat strategis.



▲ Baliho sosialisasi Pemilu 1955
Sumber: ANRI, *Kempen DIY 1950-1965 No. 5035, No. 550724 FL 5*

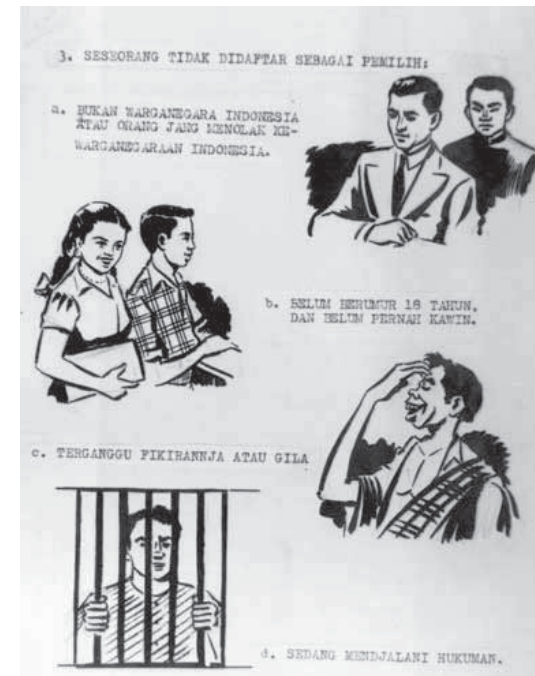


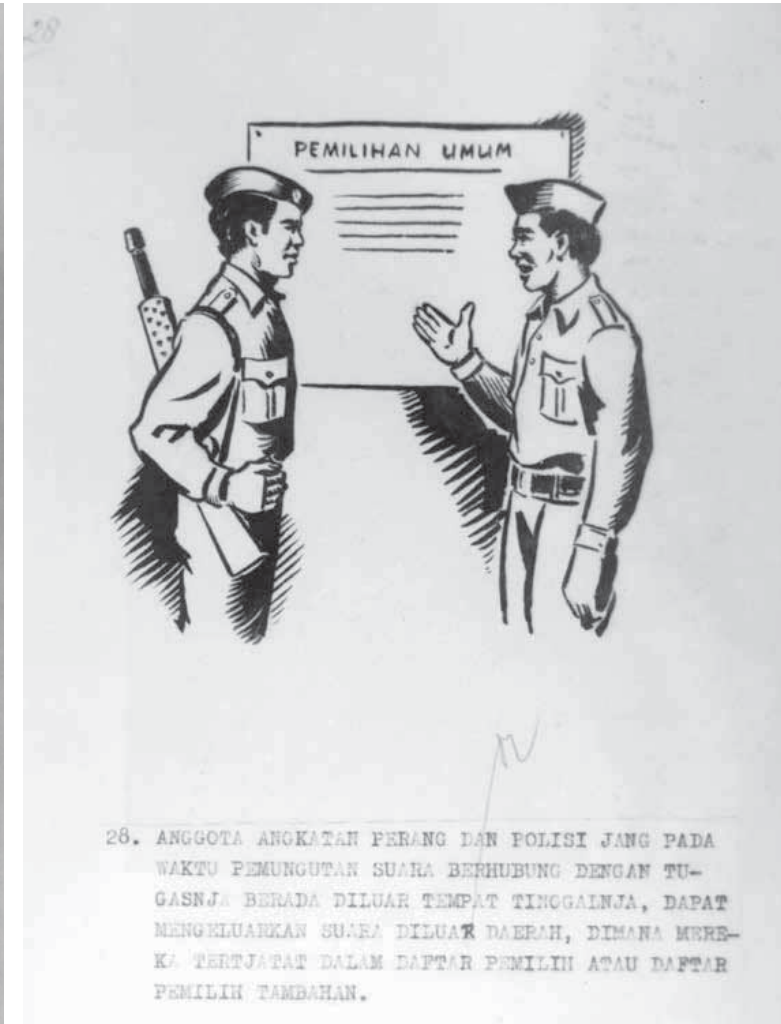
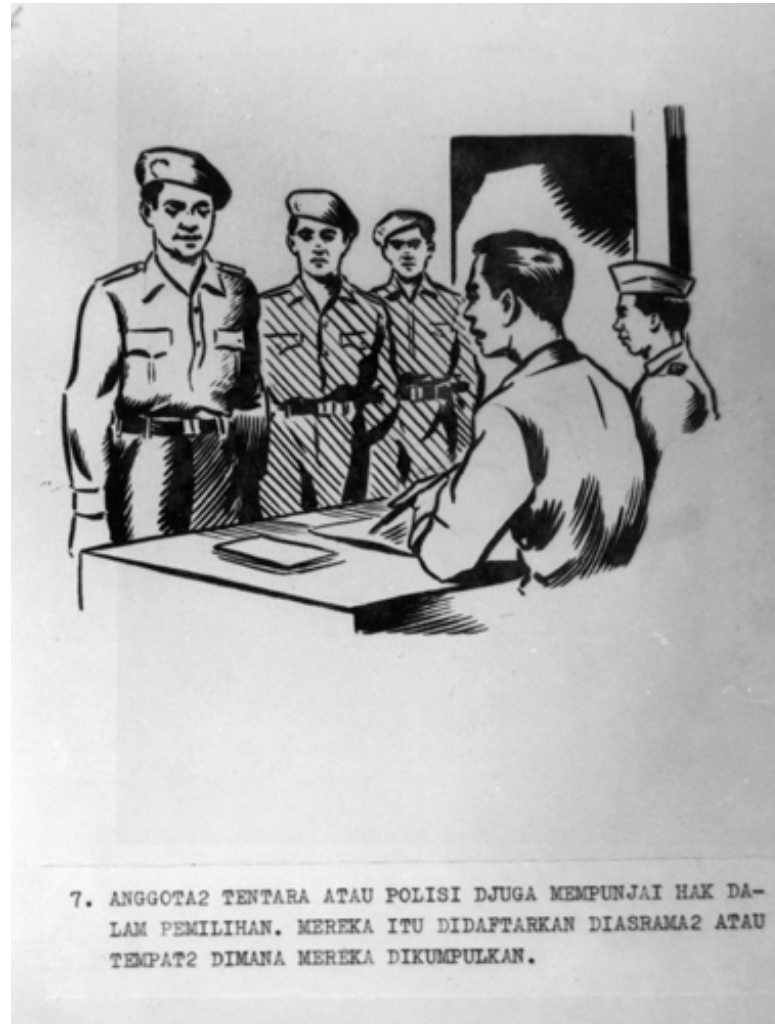
Mengenai siapa saja yang memiliki hak pilih dan yang tidak memiliki hak pilih disosialisasikan dalam berbagai media, termasuk dalam bentuk poster. Orang yang memiliki hak pilih adalah WNI baik laki-laki maupun perempuan, telah berusia 18 tahun atau sudah/pernah kawin, berpikiran sehat, dan tidak sedang menjalankan hukuman. Sedangkan orang yang tidak memiliki hak pilih adalah seseorang yang tidak didaftar sebagai pemilih, bukan WNI atau menolak menjadi WNI, belum berusia 18 tahun, terganggu pikirannya atau gila, dan sedang menjalani hukuman.

Persyaratan seseorang dapat dicalonkan sebagai anggota legislatif sebagai berikut: WNI laki-laki/perempuan, sudah berusia 25 tahun, tidak kehilangan hak pilih, tidak sedang menjalani hukuman, tidak terganggu ingatannya. Selain itu yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan dan menyetujui posisinya dalam urutan daftar calon legislatif.

Anggota APRI dan Polisi juga memiliki hak pilih, mereka didaftar di asramanya masing-masing. Jika pada saat hari pemilihan mereka sedang melaksanakan tugasnya di daerah lain, mereka tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Poster sosialisasi Pemilu 1955
 Sumber: ANRI, *Kempen Jakarta KR 540909 FG 1-2; KR 540909 FG 1-19*





Poster sosialisasi Pemilu 1955 untuk anggota APRI ▲
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. KR 540909 FG 1-6; 540909 FG 1-14



Meski baru pertama kali diadakan, indikasi adanya politik uang telah terjadi pada Pemilu 1955. Oleh karena itu masyarakat diingatkan untuk menolak politik uang karena bukan saja akan merusak hak azasinya, namun juga melanggar hukum.

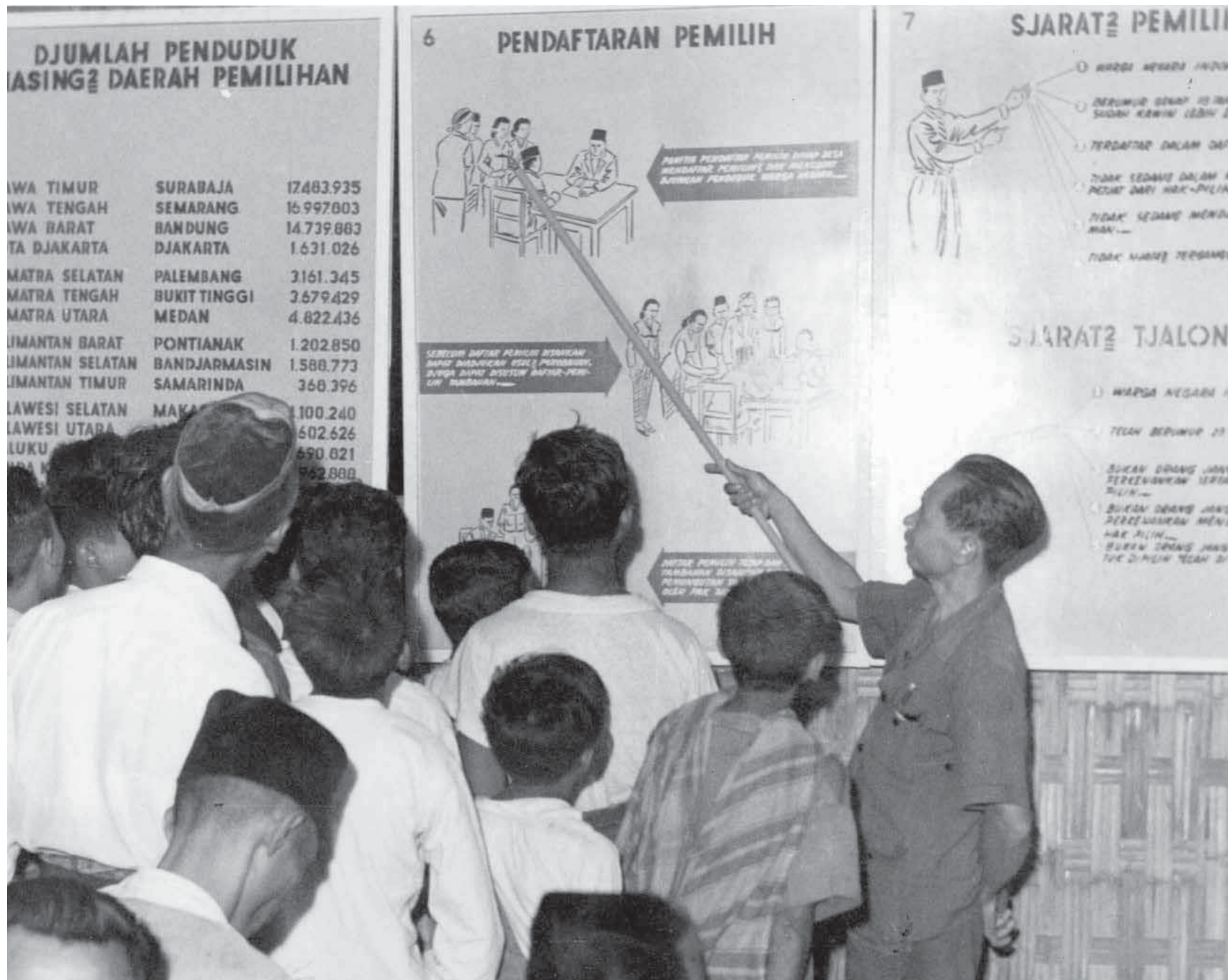
Sosialisasi juga dilakukan secara langsung melalui penyuluhan oleh panitia pemilihan atau petugas jawatan penerangan kepada masyarakat calon pemilih. Seorang petugas dari Jawatan Penerangan Kabupaten Nganjuk sedang memberikan penjelasan mengenai urutan pemilu. Meski anak-anak belum memiliki hak pilih, mereka tetap ingin tahu urutan pemilu.

Poster sosialisasi Pemilu 1955 ►
tentang bahaya politik uang
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. KR 540909 FG 1-1



Sosialisasi pemilu oleh petugas Jawatan Penerangan ►
Kabupaten Nganjuk, 10 Agustus 1955
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. R 550810 FG 2-4





**DJUMLAH PENDUDUK
Masing-masing DAERAH PEMILIHAN**

DAERAH IWA TIMUR	SURABAJA	17.483.935
DAERAH IWA TENGAH	SEMARANG	16.997.803
DAERAH IWA BARAT	BANDUNG	14.739.883
DAERAH IWA DJAKARTA	DJAKARTA	1.631.026
MATRA SELATAN	PALEMBANG	3.161.345
MATRA TENGAH	BUKIT TINGGI	3.679.429
MATRA UTARA	MEDAN	4.822.436
SUMATERA BARAT	PONTIANAK	1.202.850
SUMATERA SELATAN	BANDJARMASIN	1.588.773
SUMATERA TIMUR	SAMARINDA	368.396
RIAU SELATAN	MAKASSAR	1.100.240
RIAU UTARA		602.626
CELEBES LUTU		690.821
CELEBES UTARA		742.888

6 PENDAFTARAN PEMILIH

PARTISIPASI PEMILIH HARUS DIMULAI DARI
 PENDAFTARAN PEMILIH DAN MELAKUKAN
 KEMUNGKINAN MENYERAH...

SEBELUM DAFTAR PEMILIH BISMILAH
 HARUS DIBERIKAN USUL PERUBAHAN
 SUPAYA DAFTAR DAFTAR DAFTAR-PEMI-
 LIH BERTERUS...

DAFTAR PEMILIH TERUSMUL
 TERUSMUL TERUSMUL TERUSMUL
 TERUSMUL TERUSMUL TERUSMUL...

7 SYARAT-SYARAT PEMILIH

1. WARGA NEGARA INDONESIA
 2. BERUMUR SEMPURN 21 TAHUN
 3. SUDAH MENIKAH (LEBIH DARI 10 TAHUN)
 4. TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH
 5. TIDAK SEDANG DALAM KEHIMPUNAN
 6. TIDAK SEDANG MENYERAHKAN HAK PEMILIHAN
 7. TIDAK SEDANG MENYERAHKAN HAK PEMILIHAN
 8. TIDAK SEDANG MENYERAHKAN HAK PEMILIHAN

SYARAT-SYARAT TETAPAN

1. WARGA NEGARA INDONESIA
 2. BERUMUR SEMPURN 21 TAHUN
 3. SUDAH MENIKAH (LEBIH DARI 10 TAHUN)
 4. SUDAH MENIKAH (LEBIH DARI 10 TAHUN)
 5. SUDAH MENIKAH (LEBIH DARI 10 TAHUN)
 6. SUDAH MENIKAH (LEBIH DARI 10 TAHUN)
 7. SUDAH MENIKAH (LEBIH DARI 10 TAHUN)
 8. SUDAH MENIKAH (LEBIH DARI 10 TAHUN)



Sebagai pemilik hak suara anggota Angkatan Darat Republik Indonesia (ADRI) juga memperoleh sosialisasi pemilu. Pemandangan sosialisasi pemilu di lingkungan ADRI di Jakarta pada tanggal 4 Mei 1954. Jawatan Penerangan Jakarta melakukan sosialisasi pemilu secara berkeliling dari kampung ke kampung dengan menggunakan mobil berpengeras suara.



▲ Sosialisai pemilu untuk anggota ADRI, Jakarta 4 Mei 1954
Sumber: Kempen Jakarta No. 540504 FG 1



▲ Penerangan keliling untuk para penduduk menjelang hari pemilu, Jakarta, 10 Agustus 1955
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. R 550810 FG 2-2



Sosialisasi Pemilu 1955 juga dilakukan dengan cara penyebaran pamflet dari udara menggunakan pesawat L4J Piper Cub milik AURI. Pesawat tersebut terbang dari Lanud Cililitan (Halim Perdanakusuma) dan menyebarkan pamflet di atas kota Jakarta.



Penyebaran pamflet sosialisasi Pemilu ▲
1955 dengan menggunakan pesawat
AURI, Jakarta 28 April 1954
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. 540428 FL 1-3



Tanda gambar partai politik yang terpasang di bundaran Kebayoran Baru, 29 September 1955
Sumber: ANRI, *Kempen Jakarta No. 550929 FL 2-26*



2. Kampanye Pemilu 1955

Kampanye politik merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh para kontestan pemilu untuk mempengaruhi pemilih agar memilihnya. Tidak ada tanggal pasti mengenai kapan dimulainya kampanye Pemilu 1955, namun Herbert Feith berpendapat bahwa kampanye tahap pertama dimulai pada tanggal 4 April 1953 ketika RUU Pemilu disahkan menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab sejak saat itu telah ada keyakinan bahwa pemilu akan dilaksanakan pada waktu dekat dan akibatnya para kontestan segera berlomba-lomba mensosialisasikan programnya ke masyarakat. Penanda dimulainya kampanye yang kedua adalah tanggal 31 Juli 1954, pada tanggal itu PPI mengesahkan tanda gambar untuk para kontestan.

Sebagai ibu kota negara, Jakarta merupakan pusat perebutan pengaruh antar partai. Oleh karenanya pada masa kampanye di seluruh penjuru kota terpampang gambar-gambar partai politik peserta Pemilu 1955.

- ▲ Papan tanda-tanda gambar partai-partai dalam pemilihan umum yang dipasang di tepi jalan, di Jalan Prapatan Kwitang Jakarta, 24 Juli 1955
Sumber: ANRI: Kempen Jakarta No. 550724 FG 1-1
- ◀ Papan tanda gambar dari PSI dan Gerakan Pembela Pancasila yang dipasang di tepi Jalan Pejambon, 24 Juli 1955
Sumber: ANRI: Kempen Jakarta No. 550724 FG 1-4



Bukan hanya melalui pemasangan baliho di tempat-tempat strategis, kampanye di Jakarta juga dilakukan melalui pengerahan massa dan orasi politik di tempat terbuka. Pada masyarakat yang sebagian besar masih buta huruf kampanye dengan cara orasi lebih efektif.

Partai Masyumi yang merupakan partai Islam modern memiliki basis massa yang kuat di wilayah Yogyakarta. Oleh karena itu Masyumi mengadakan kampanye besar-besaran di alun-alun utara Yogyakarta dan memasang tanda gambar Masyumi di berbagai tempat strategis.



▲ Pemandangan dalam rapat umum seorang pemimpin partai tengah berpidato, Jakarta 10 April 1955
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. K 550410 FG 1-1



▲ Para simpatisan PNI dengan membawa spanduk menghadiri rapat umum di lapangan Merdeka Selatan, Jakarta 1 Mei 1955
Sumber: ANRI, Kempen Jakarta No. K 550501 FG 1-2



Tanda gambar Partai Masyumi di Yogyakarta , 25 September 1955
 Sumber: ANRI, Kempen DIY 1950-1965 No. 4867



Rapat umum oleh Partai Masyumi di alun-alun utara Yogyakarta, 25 September 1955
 Sumber: ANRI, Kempen DIY 1950-1965 No. 5034





Nuansa kedaerahan muncul dalam alat peraga kampanye di luar Pulau Jawa. Seperti yang tertulis pada spanduk kampanye PKR di Makassar yang menyatakan “nasib Sulawesi serahkan pada putra Sulawesi.” Memang pada saat itu pembangunan belum merata di seluruh Indonesia dan Sulawesi masih menjadi daerah tertinggal.



▲ Spanduk kampanye PKR di Makassar
Sumber: ANRI, Kempen No. KR 560322 FG 2-14



Partai-partai lokal yang ada di daerah juga aktif melakukan kampanye, seperti Partai Manguni yang berada di Sulawesi Utara. Partai yang memiliki basis massa di etnis Minahasa ini memasang alat peraga kampanye di sepanjang Jalan Manado-Tondano.



Tanda gambar Partai Manguni yang dipasang ▲
di tepi Jalan Manado-Tondano, 3 Desember 1955
Sumber: ANRI, *Kempen Sulawesi Utara 1951-1965 No. K 551203 TT 2*

Salah satu strategi yang digunakan PKI untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilu 1955 adalah mencantumkan orang tak berpartai (calon perorangan) ke dalam tanda gambar palu arit PKI. Dalam kasus di Yogyakarta PKI memasukkan nama Prof. Ir. Purbodiningrat seorang guru besar dari Universitas Gadjah Mada, Ny. S.D. Susanto seorang pengurus Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari), dan Djadi Wirjosubroto seorang pengurus Dewan Pimpinan Pusat Barisan Tani Indonesia (DPP BTI).

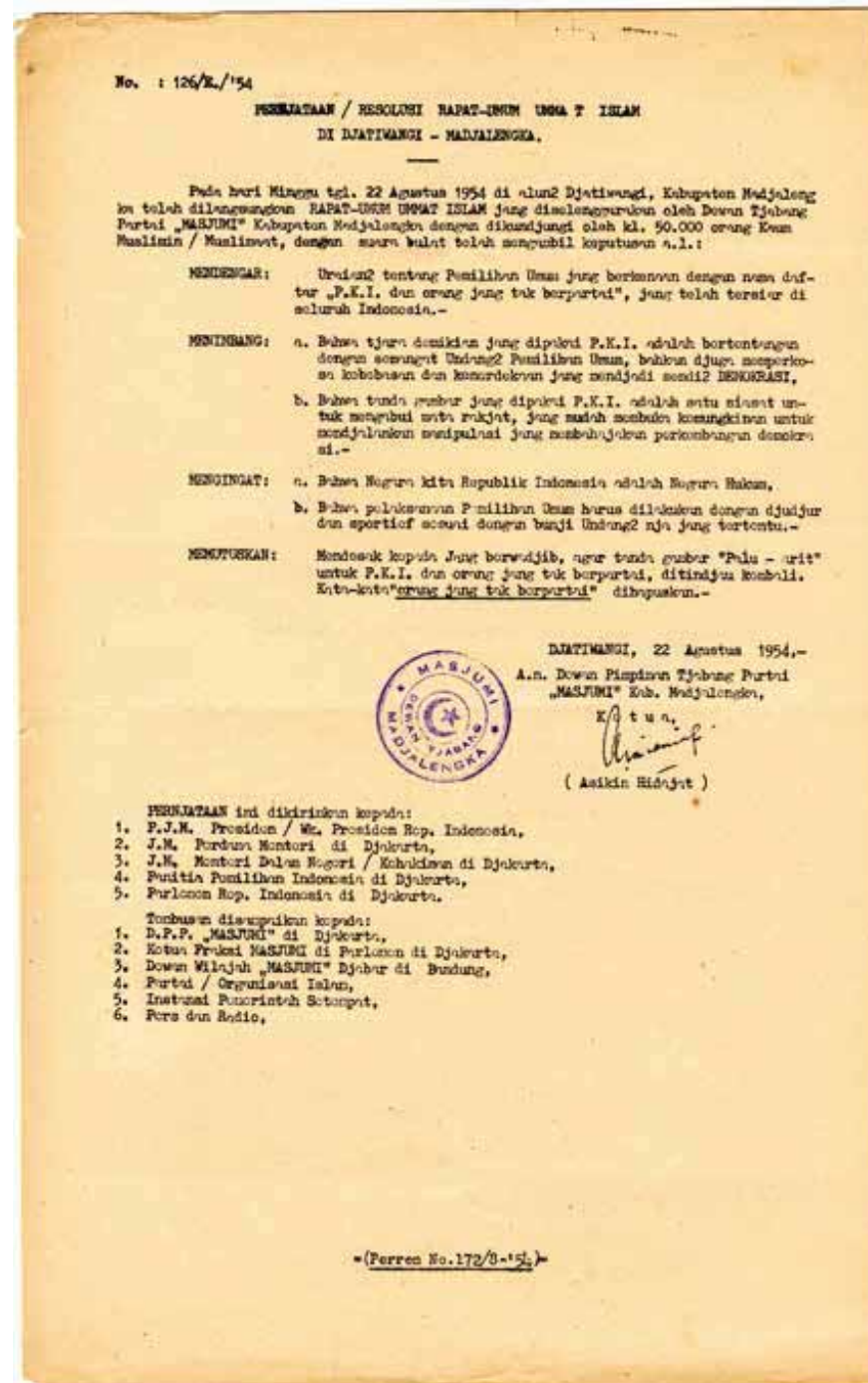


▲ Alat peraga kampanye PKI di Yogyakarta, 29 September 1955
Sumber: ANRI, *Kempen DIY 1950-1965 No. 5033*

Strategi PKI yang memasukkan nama-nama orang tak berpartai ke dalam tanda gambar palu arit ditentang oleh partai-partai Islam. Dewan Cabang Masyumi Majalengka bahkan mengadakan Rapat Umum Umat Islam di Jatiwangi tanggal 22 Agustus 1954 yang menghasilkan sebuah resolusi kepada pihak berwajib agar meninjau kembali tanda gambar palu arit bagi PKI dan menghapus kalimat "orang yang tak berpartai."

Resolusi umat Islam di Jatiwangi Majalengka tanggal 22 Agustus 1954 yang memutuskan untuk mendesak pihak berwajib supaya meninjau kembali tanda gambar palu arit bagi PKI dan orang-orang yang tak berpartai, serta penghapusan kata-kata "orang yang tak berpartai"

Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 no. 963



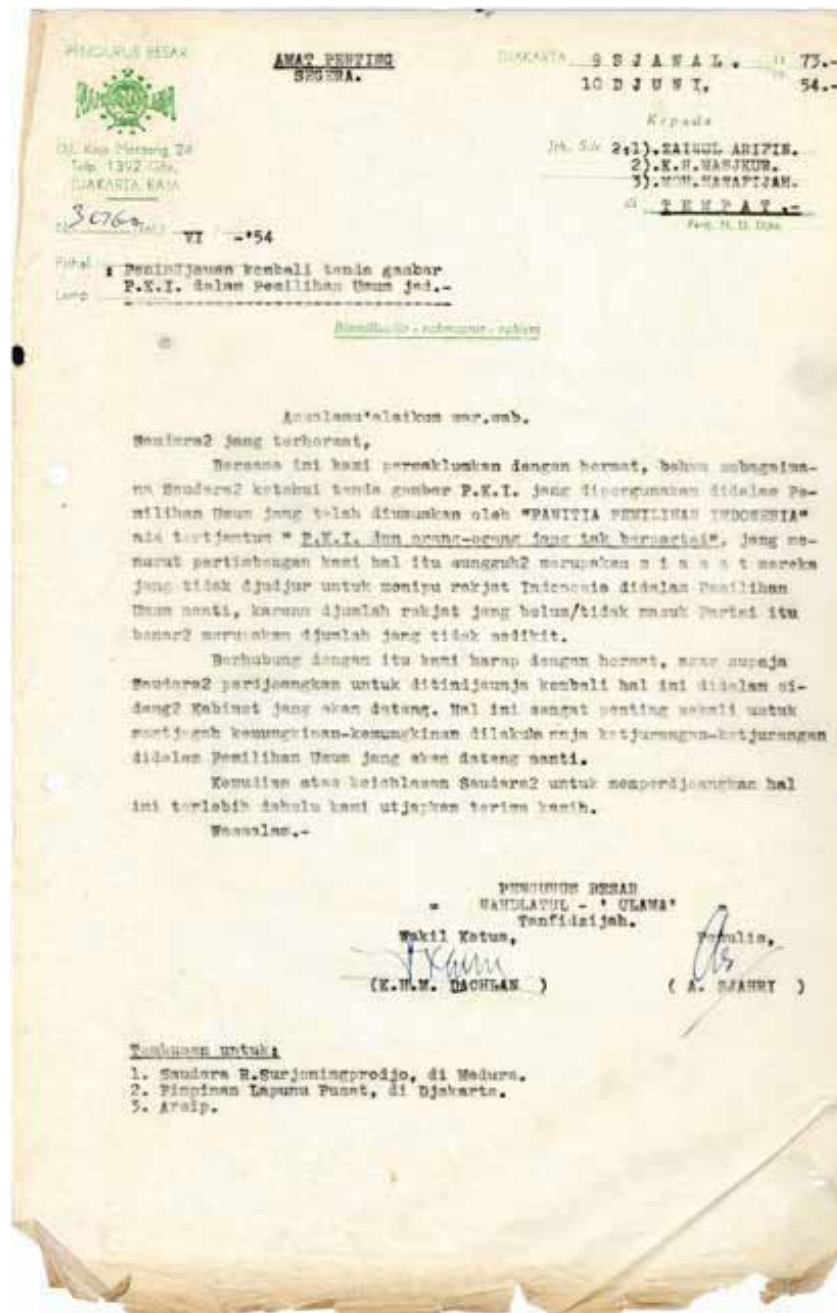
PB NU juga mengeluarkan pernyataan menentang digunakannya kalimat “PKI dan orang-orang yang tak berpartai” dalam papan peraga kampanye PKI. PB NU menganggap strategi PKI tersebut sebagai upaya untuk menipu rakyat Indonesia dalam Pemilu 1955. Kekhawatiran PB NU sangat beralasan mengingat rakyat Indonesia yang belum/tidak berpartai jumlahnya cukup besar.

Seperti halnya NU dan Masyumi, Pimpinan Pergerakan Pusat Angkatan Muda Islam (AMI) juga memprotes kalimat “dan orang yang tak berpartai” yang ditempatkan di bawah tanda gambar palu arit (PKI). Sebab hal itu menimbulkan pengertian bahwa orang-orang yang tidak berpartai harus memilih PKI. Pimpinan Pergerakan Pusat AMI meminta kepada pemerintah agar kalimat tersebut dihilangkan dari alat peraga kampanye PKI sebelum akhir bulan Januari 1955.

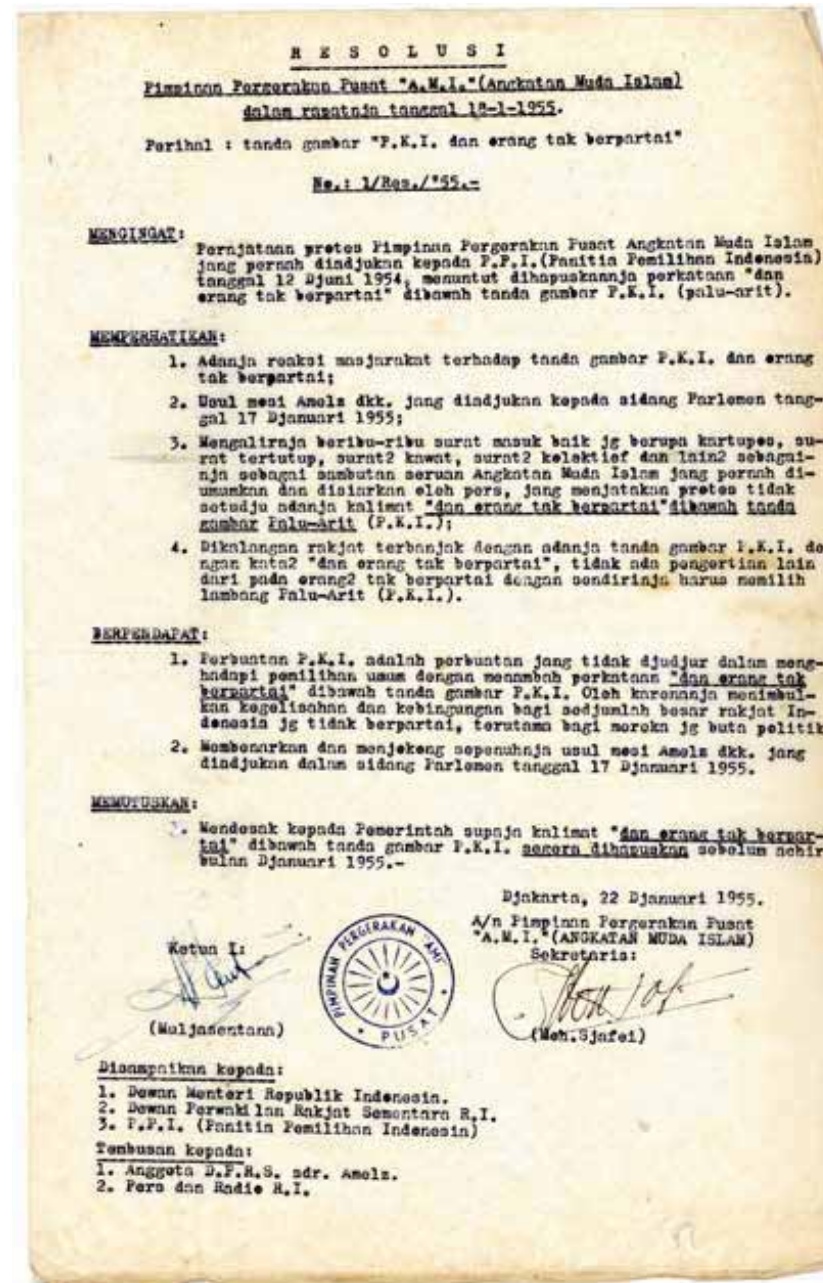
Semangat untuk memperjuangkan harkat dan martabat kaum perempuan tidak dapat dihalangi oleh sekat-sekat ideologi. Hal itu terlihat dalam sebuah alat peraga kampanye di Yogyakarta. Dalam alat peraga tersebut tertulis nama Ny. Surjohadi dari PNI, Ny. S.D. Susanto dari PKI, dan Ny. Sahir dari Gerakan Pembela Pancasila.



◀ Perbedaan ideologi tidak menjadi penghalang untuk memperjuangkan nasib perempuan, 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen Jogja, no. 5032



Protes PB NU terhadap penggunaan tanda gambar ▲
 PKI bagi orang-orang tak berpantai, 10 Juni 1954
 Sumber: ANRI, Nahdlatul Ulama tahun 1948-1979 No. 2302



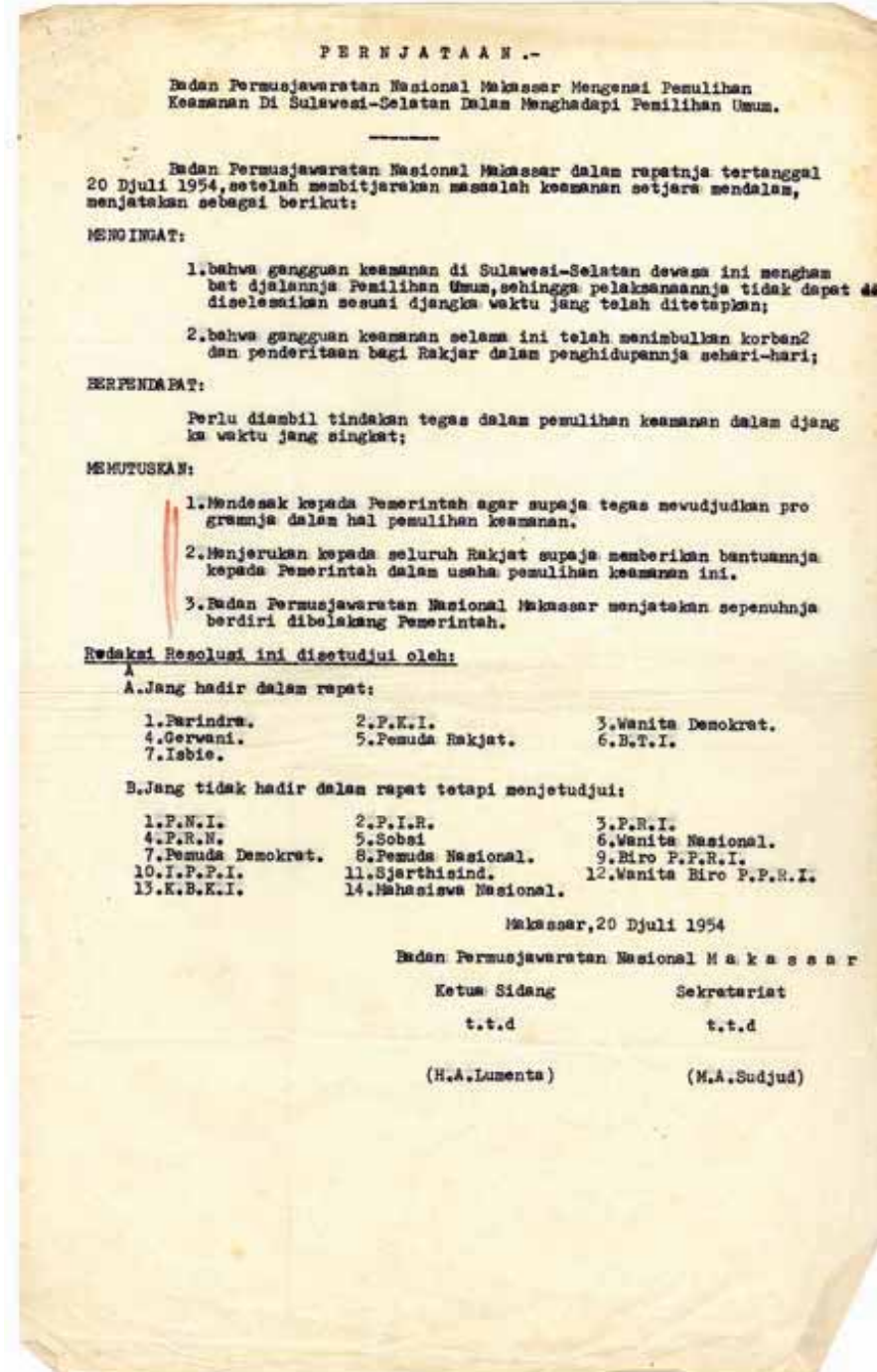
Surat Angkatan Muda Islam kepada Dewan Menteri RI tanggal 22 ▲
 Januari 1955 perihal resolusi menentang kalimat "dan orang tak
 berpantai" di bawah tanda gambar PKI
 Sumber: ANRI, Sekretariat Negara KPM RI 1950-1959 No. 1918

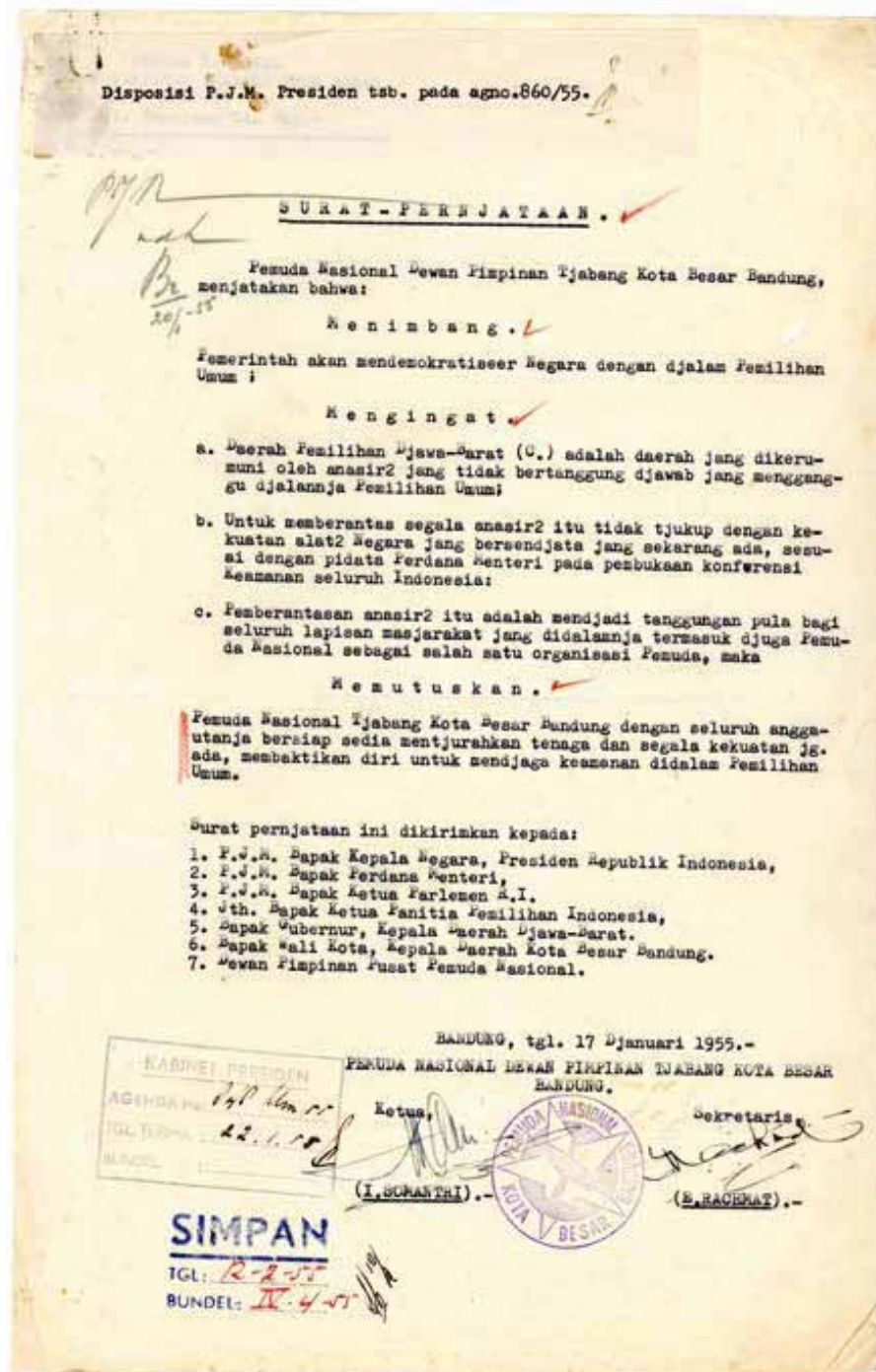
F. Situasi Keamanan Menjelang Pemilu 1955

Pelaksanaan Pemilu 1955 dibayang-bayangi adanya gangguan keamanan di beberapa daerah yang disebabkan oleh pemberontakan DI/TII dan kegiatan kelompok kriminal. Oleh karena itu, beberapa organisasi masyarakat dan partai politik meminta jaminan keamanan kepada pemerintah selama masa persiapan hingga pemilu dilaksanakan.

Badan Permusyawaratan Nasional Makassar mengeluarkan pernyataan yang meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk memulihkan keamanan di wilayah Sulawesi Selatan dalam rangka pemilu. Pernyataan tersebut dikeluarkan dalam sebuah rapat tanggal 20 Juli 1954 yang dihadiri dan didukung oleh 7 partai politik/organisasi massa, selain itu ada 14 partai politik/organisasi massa yang tidak hadir namun mendukung pernyataan tersebut.

Surat dari Sekretaris Badan Permusyawaratan Nasional Makassar kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Agustus 1954 tentang penyampaian keputusan sidang Badan Permusyawaratan Nasional Makassar tanggal 20 Juli 1954 mengenai pemulihan keamanan di Sulawesi Selatan dalam menghadapi pemilu
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 No. 1914





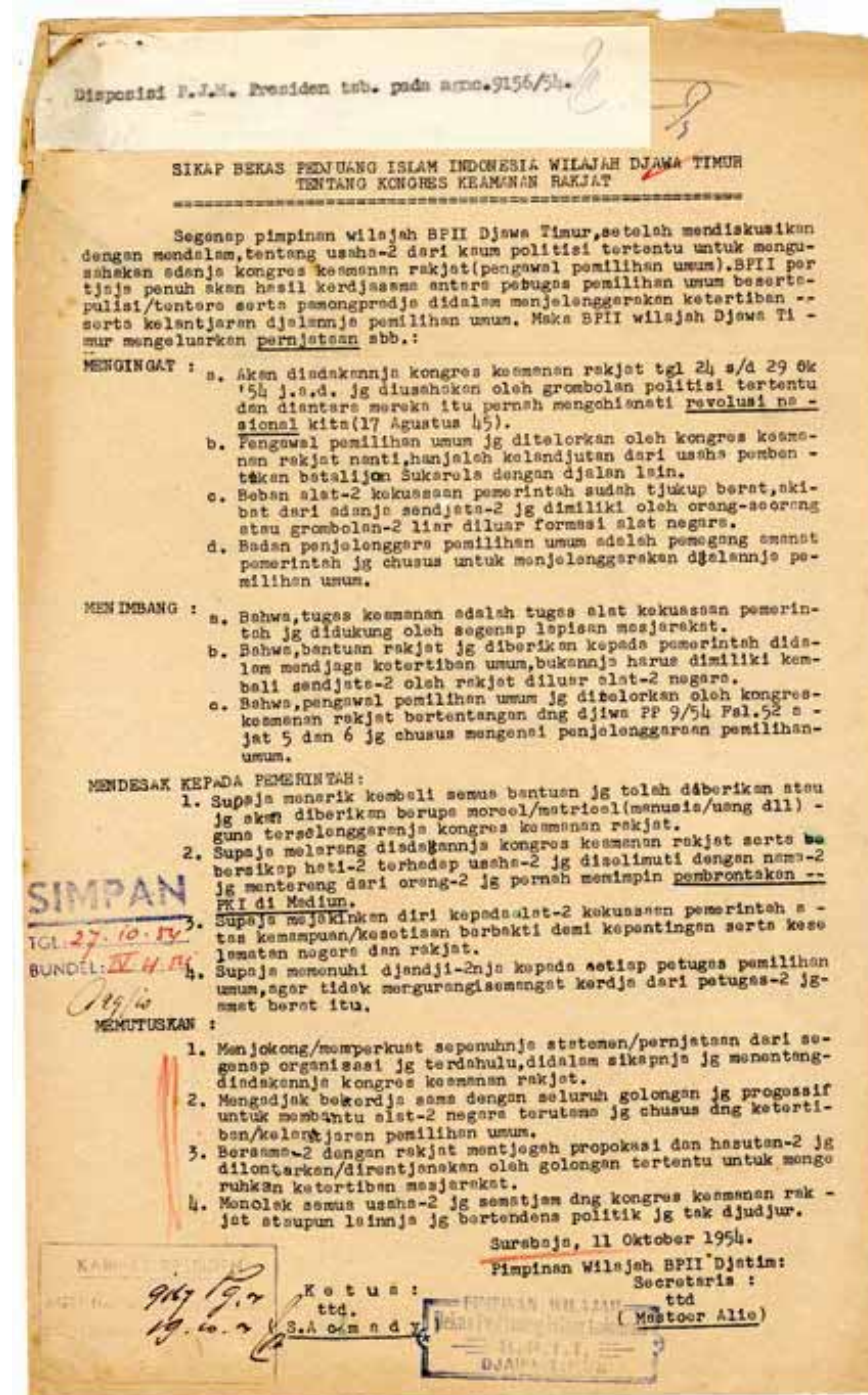
Dalam menghadapi situasi keamanan di Jawa Barat, Pemuda Nasional Cabang Kota Besar Bandung mengeluarkan surat pernyataan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia yang intinya bersedia terlibat secara langsung dalam pengamanan Pemilu 1955. Hal itu sesuai dengan kondisi keamanan Jawa Barat yang masih belum stabil karena gangguan pemberontak DI/TII Kartosuwiryo.

◀ Surat Pernyataan Pemuda Nasional Dewan Pimpinan Cabang Kota Besar Bandung tanggal 17 Januari 1955 tentang kesediaan menjaga keamanan dalam Pemilu 1955.
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 No. 1914

Guna menyukseskan Pemilu 1955 muncul inisiatif dari kelompok-kelompok tertentu untuk mengadakan Kongres Keamanan Rakyat. Melalui kongres tersebut akan dibentuk Barisan Pengawal Pemilihan Umum untuk membantu pengamanan Pemilu 1955. Namun gagasan itu ditentang oleh organisasi Bekas Pejuang Islam Indonesia (BPII) Jawa Timur. Mereka menduga otak di balik Kongres Keamanan Rakyat adalah orang-orang yang dulu terlibat pemberontakan PKI Madiun. Oleh karena itu, BPII mendesak kepada pemerintah agar menarik bantuannya untuk pelaksanaan Kongres Keamanan Rakyat, baik berupa bantuan personel maupun materiel.

Hal senada juga dinyatakan oleh beberapa partai politik dan organisasi massa di Banjarmasin. Mereka menentang pembentukan Barisan Pengawal Pemilihan Umum. Partai politik dan organisasi massa di Banjarmasin berpendapat bahwa masalah keamanan telah menjadi tanggung jawab dan wewenang alat negara.

Pernyataan sikap Bekas Pejuang Islam Indonesia Wilayah Jawa Timur tentang Kongres Keamanan Rakyat, 11 Oktober 1954
 Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 No. 1914



PERNYATAAN BERSAMA (STATEMEN)

Antara Partai2 Politik/Organisasi di Kota Besar
Bandjarmasin, terdiri dari :

1. Masjumi Wilayah Kalimantan Selatan.
2. Masjumi Tj. Kab. Kota Besar Bandjarmasin.
3. Nahdatul Ulama Wilayah Kalimantan Selatan.
4. Nahdatul Ulama Tj. Kab. Kota Besar Bandjarmasin.
5. Muslimat Masjumi Wilayah Kalimantan Selatan.
6. Muslimat Masjumi Tj. Kab. Kota Besar Bandjarmasin.
7. P.S.I.I. Wilayah Kalimantan Selatan.
8. P.S.I.I. Tj. Kab. Kota Besar Bandjarmasin.
9. Partai Katolik Wilayah Kalimantan Selatan.
10. Partai Katolik Tj. Kab. Kota Besar Bandjarmasin.
11. P.S.I. Wilayah Kalimantan Selatan.
12. P.S.I. Tj. Kab. Kota Besar Bandjarmasin.
13. Parkindo Wilayah Kalimantan Selatan.
14. Parkindo Tj. Kab. Kota Besar Bandjarmasin.
15. P.P.T.I. Wilayah Kalimantan Selatan.
16. P.P.T.I. Tj. Kab. Kota Besar Bandjarmasin.
17. G.P.I.I. Wilayah Kalimantan Selatan.
18. G.P.I.I. Tj. Kab. Kota Besar Bandjarmasin.
19. GP. Ansor Wilayah Kalimantan Selatan.
20. GP. Ansor Tj. Kab. Kota Besar Bandjarmasin.
21. Nahdatul Muslimat Wilayah Kalimantan Selatan.

Pada hari Selasa malam tgl. dua belas bulan Oktober tahun-seoribu sembilan ratus lima puluh empat, kami wakil2 partai/organisasi yang tersebut, telah menglanggungkan rapat bersama bertempat di Gedung Masjumi di Bandjarmasin.

I. M e n i m b a n g :

Setelah mempelajari setjara mendalam dan seksama tentang maksud dari sementara golongan yang telah mengadakan Panitia guna menjiapkan Kongres Keamanan Rakjat untuk Pemilihan Umum, maka

II. B e r p e n d a p a t :

Bahwa maksud dari sementara golongan tadi dengan adanya Kongres Keamanan rakjat untuk pemilihan umum yang akan membentuk Barisan Bersendjata buat menjaga keamanan pada waktu pemilihan umum itu, seolah-olah tidak mempertajam atas kemampuan dari alat2 Negara R.I. untuk menjaga keamanan.

III. M e n g i n g a t :

- Bahwa:
- a. Negara R.I. adalah Negara Hukum.
 - b. Adanya alat2 Negara berupa Tentara dan Polisi sudah tjukup-dapat menjamin berlakunya keamanan dan ketertiban di bumi - Indonesia.
 - c. Adanya Barisan Pengawal Pemilihan ini hanya akan menambah - beban Negara saja.
 - d. Pula dapat menjatuhkan prestige Negara di mata Dunia Inter - nasional.
 - e. Akan menjadi suatu kebiasaan buruk (politik chaos) se - tiap diadakan Pemilihan umum dibelakang hari.
 - f. Adanya Barisan Pengawal Pemilihan umum yang bersendjata itu dapat pula menimbulkan kekawatiran yang akan lebih menjulit - kan pelaksanaan Pemilihan umum.

Oleh sebab itu maka dengan tegas kami

P E R N Y A T A A N :

1. Tidak dapat menyetujui adanya maksud dari sementara golongan yang akan membentuk Barisan Pengawal Pemilihan Umum.
2. Dengan jalan yang sah akan menentang setiap usaha pembentuk - an Barisan Pengawal Pemilihan Umum ini.
3. Akan berusaha dengan setjara luas guna menginjatkan dan memberi pene - rangsan2 kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia betapa bahaya2 - yang terkandung didalamnya bila rentjana pembentukan Barisan Pengawal Pemilihan Umum ini terlaksana.
4. Menjampaikan pernyataan ini kepada :
 1. S.J.M. Presiden R.I. di Djakarta.
 2. P.M. Menteri R.I. di Djakarta.

3.

lanjutan 3.

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Djakarta.
2. Menteri Kehakiman R.I. di Djakarta.
3. Menteri Pertahanan R.I. di Djakarta.
4. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Kalimantan di Bandjarmasin.
5. Residen Kalimantan Selatan/Timur dan Barat.
6. Dewan Partai2/Organisasi masing2.
7. Seluruh Praksi D.P.R. seluruh Indonesia.
8. Pawa dan Radio untuk disiarkan.
9. A r s i p, masing2 Partai2/Organisasi yang menanda tangani Statemen ini.

Bandjarmasin, 12 Oktober 1954.
Partai2 Politik/Organisasi tersebut diatas,

- | | |
|--|--|
| 1. Masjumi Wilayah Kal.Sel. | 2. Masjumi Tj. Kab. Kota Besar Bjm. |
| 3. Nahdatul Ulama Wilayah Kal.Sel. | 4. Nahdatul Ulama Tj. Kab. Kota Besar. |
| 5. Muslimat Masjumi Wilayah Kal.Sel. | 6. Muslimat Masjumi Tj. Kab. Kota Besar Bjm. |
| 7. P.S.I.I. Wilayah Kal.Sel. | 8. P.S.I.I. Tj. Kab. Kota Besar Bjm. |
| 9. Partai Katolik Wilayah Kal.Sel. | 10. Partai Katolik Tj. B'masin. |
| 11. P.S.I. Wilayah Kal.Sel. | 12. P.S.I. Tj. Kab. Kota Besar B'masin. |
| 13. Parkindo Tj. Kab. Kota Besar Bjm. | 14. Parkindo Wilayah Kal.Sel. |
| 15. P.P.T.I. Wilayah Kal.Sel. | 16. P.P.T.I. Tj. Kab. Kota Besar Bjm. |
| 17. G.P.I.I. Wilayah Kal.Sel. | 18. G.P.I.I. Tj. Kab. Kota Besar Bjm. |
| 19. GP. Ansor Wilayah Kal.Sel. | 20. GP. Ansor Tj. Kab. Kota Besar Bjm. |
| 21. Nahdatul Muslimat Wilayah Kal.Sel. | 21. Nahdatul Muslimat Wilayah Kal.Sel. |

Pernyataan bersama antara partai-partai politik/ organisasi ▲
masa di Kota Besar Banjarmasin, 12 Oktober 1954
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 No. 1914



BAB III

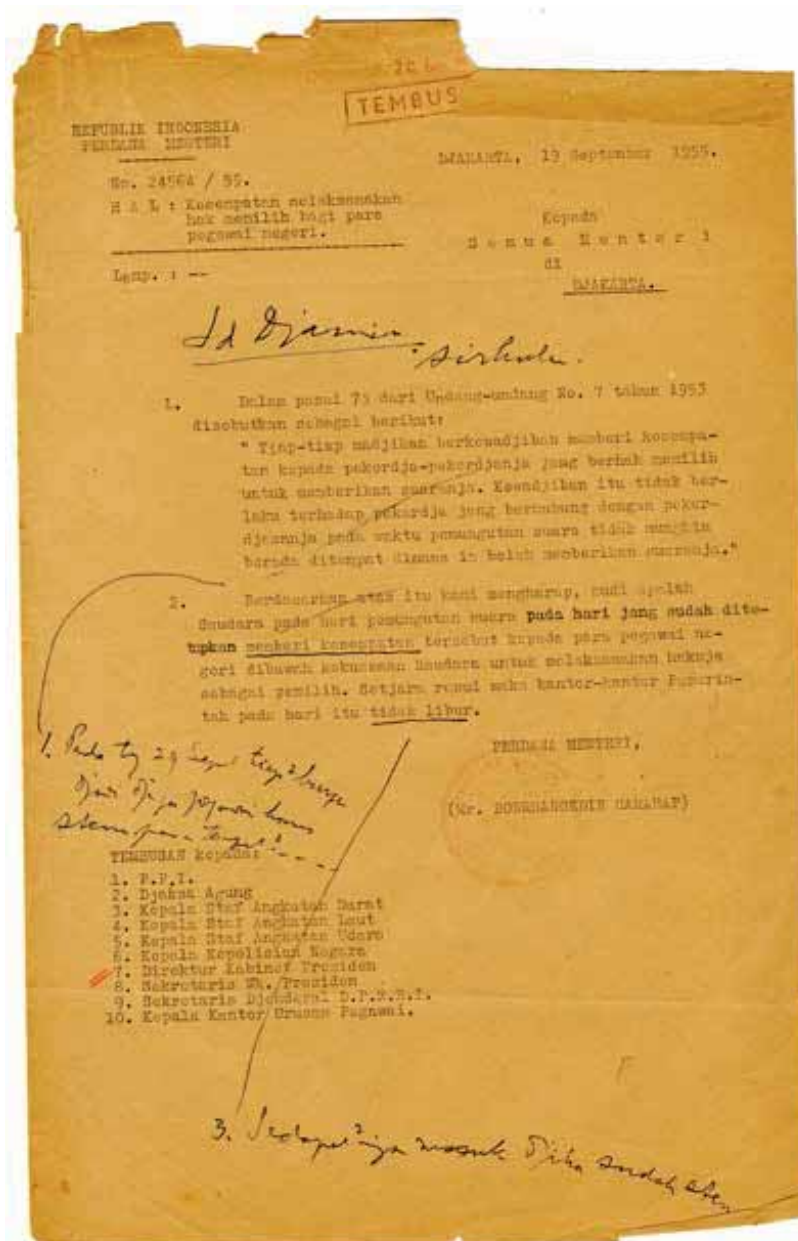
Pelaksanaan Pemilu 1955

A. Pencoblosan

Puncak dari rangkaian pesta demokrasi tahun 1955 adalah hari pencoblosan yang jatuh pada tanggal 29 September dan 15 Desember. Pada hari itu jutaan rakyat Indonesia berbondong-bondong menyalurkan hak pilihnya di bilik-bilik pencoblosan. Mereka berharap melalui hak suara yang diberikan akan dapat mengubah kondisi politik negara menjadi lebih baik.

Dalam kaitan itu, Perdana Menteri Burhanudin Harahap mengeluarkan surat edaran kepada semua menteri agar memberi kesempatan kepada pegawai negeri di bawah jajarannya untuk menyalurkan hak pilihnya. Meskipun demikian, kantor-kantor pemerintah pada hari pemilihan tetap masuk seperti biasa. Pada kenyataannya hal itu sulit dilaksanakan karena banyak pegawai negeri yang menjadi Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara (PPPS). Hal itu menyebabkan mereka meninggalkan kantor selama hari pemungutan suara.

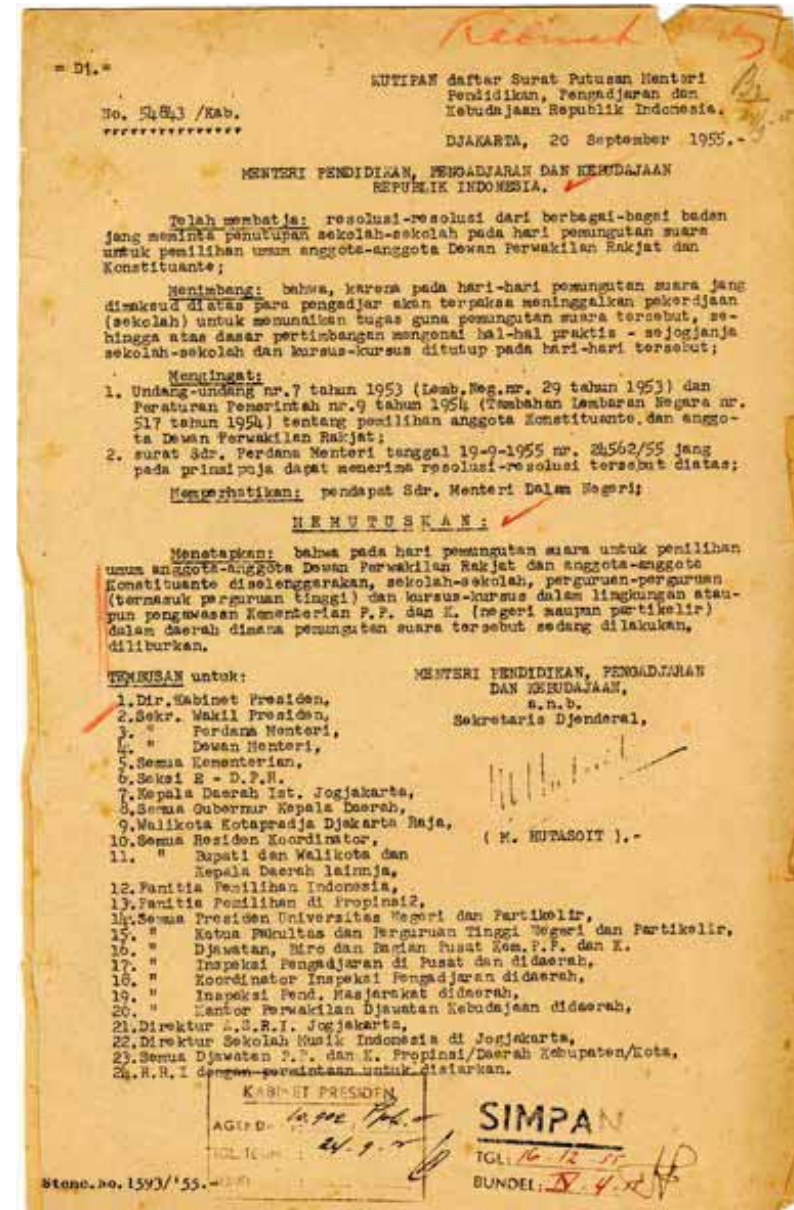
Surat dari Perdana Menteri Burhanudin Harahap kepada semua menteri tentang kesempatan melaksanakan hak memilih bagi semua pegawai negeri, 19 September 1955
Sumber: ANRI, Kabpres 957



Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K) mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan seluruh sekolah negeri dan swasta, perguruan tinggi, dan kursus-kursus yang berada di lingkungan atau di bawah pengawasan Kementerian PP dan K pada hari pemungutan suara diliburkan. Selain untuk memberi kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk melaksanakan haknya dalam kaitan pemungutan suara, juga karena banyak sekolah yang digunakan sebagai TPS.

Kutipan Daftar Surat Putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 54843/Kab tentang diliburkannya sekolah-sekolah, perguruan-perguruan (termasuk perguruan tinggi) dan kursus-kursus dalam lingkungan ataupun pengawasan Menteri PP & K (negeri maupun swasta) dalam daerah pada waktu pemungutan suara sedang berlangsung, 20 September 1955

Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 no. 1176



1. Pemilu DPR

Pemungutan suara anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Pada hari itu sebagian besar dari 39 juta rakyat Indonesia menyalurkan hak suaranya, sedangkan sebagian kecil yang lainnya tidak dapat memberikan hak suaranya pada hari itu. Hal seperti itu terjadi di Pulau Bali yang mayoritas masyarakatnya beragama Hindu, tanggal 29 September 1955 bertepatan dengan hari raya Galungan. Oleh karena itu, pemungutan suara untuk anggota DPR di Bali baru dapat dilaksanakan dua hari kemudian. Total suara yang sah dalam pemilihan anggota DPR sebanyak 37.875.299 atau 87,65% dari jumlah total pemilih 43.104.464.

a. Hak Suara Sipil

Tanda seseorang memiliki hak pilih adalah adanya surat pemberitahuan pencoblosan yang dikeluarkan oleh Ketua PPS setempat. Dalam surat pemberitahuan tersebut tertulis nama pemilih, nomor pemilih, serta TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Seorang warga keturunan Tionghoa bernama Tan Piang Soen yang tinggal di kawasan Jalan Hayam Wuruk memperoleh surat pemberitahuan pencoblosan di TPS Kebon Jeruk, Jakarta Pusat.

1850

PEMBERITAHUAN

tentang tempat-pemberian-suara dan pemungutan-suara untuk pemilihan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 1954.

Nama pemilih: Tan Piang Soen Djl. Hayam Wuruk

Nomor pemilih: 20786

Tempat-pemberian-suara: K. U. Keb. J. / 108 / I / IX
K. Sebolah Kebon Jeruk s.w/bi

Waktu pemberian-suara: Hari Kamis tanggal 29 September 1955
antara pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00.

Tanggal 20 September 1955.

Ketua Penjelenggara Pemungutan Suara.

[Signature]

St. 3274-'55

Surat pemberitahuan pencoblosan, Jakarta, 20 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen KR 551005 FG 2-1



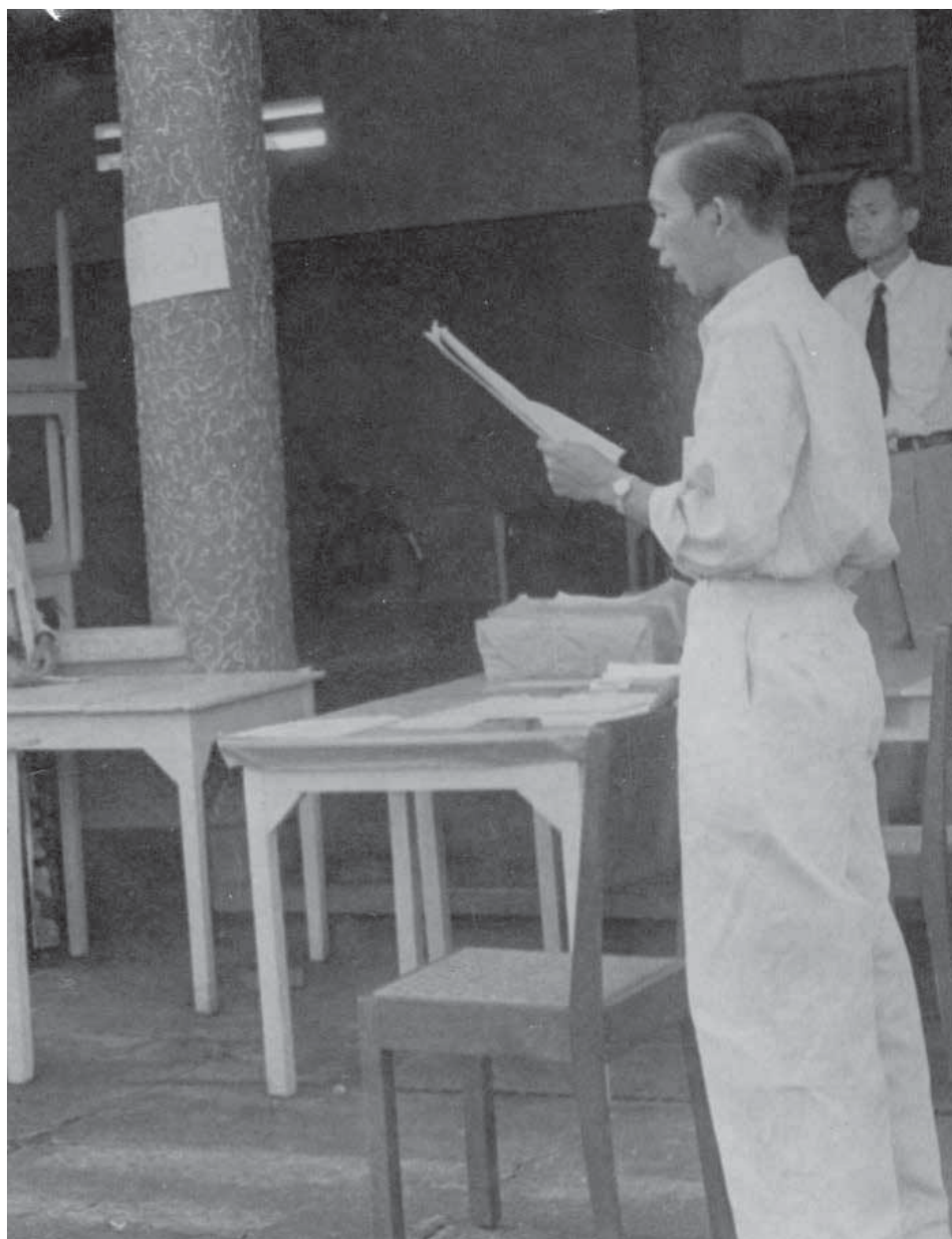
Demi ketertiban sebelum pencoblosan dimulai, Ketua PPPS wajib membacakan tata urutan pencoblosan di depan anggota PPPS dan warga pemilik hak suara. Hal seperti itu terlihat di TPS 28 Jalan Jawa, Menteng, Jakarta. Tujuannya agar proses pencoblosan berlangsung dengan tertib dan aman.

Setelah bungkus surat suara dibuka dilakukan pengecekan terhadap jumlah surat suara yang ada. Setiap bungkus berisi 50 lembar surat suara. Setiap TPS memperoleh alokasi surat suara sesuai dengan jumlah pemilih. Selanjutnya juga dilakukan pengecekan apakah ada surat suara yang rusak.

Ketika semua perlengkapan pemungutan suara sudah siap, PPPS mulai membuka pendaftaran untuk para pemilih. Warga yang sudah memiliki surat pemberitahuan pencoblosan segera mendaftarkan diri kepada PPPS. Surat pemberitahuan pencoblosan kemudian ditukarkan dengan surat suara pemilu.



▲ Antrean pemilih di TPS 28 Jalan Jawa,
Jakarta 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen K 550929 FG 8-4



Pembukaan bungkus surat suara oleh anggota PPPS dihadapan para pemilih di TPS Jalan Palem 32, Jakarta 29 September 1955; ▲
Anggota-anggota PPPS sedang mencocokkan daftar nama-nama para pemilih di TPS Jalan Palem 32 Jakarta, 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 2-17; Kempen 550929 FG 2-15



Dalam Pemilu 1955 nampak kebersahajaan dari tokoh-tokoh politik tingkat nasional. Mereka bersedia hadir ke TPS tanpa didampingi oleh pendukung-pendukungnya. Nampak Arudji Kartawinata Ketua Umum PSII dan Sutan Sjahrir Ketua Umum PSI sedang menukarkan surat pemberitahuan pencoblosan dengan surat suara.



▲ Arudji Kartawinata Ketua Umum PSII sedang menerima surat suaranya dari anggota PPPS, Jakarta 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 2-34



Sutan Sjahrir Ketua Umum PSI sedang ▲
menerima surat suara dari anggota PPPS,
29 September 1955.

Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 2-28





◀ Pemandangan di sekitar TPS dimulai para pemilih dengan tenang menunggu untuk memberikan suaranya di TPS Tanah Rendah Gang V Kebon Dalam, Jakarta 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 11-59

▼ Seorang perempuan sedang membuka kertas suara di bilik suara, 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FH 4

Warga yang sudah memperoleh surat suara kemudian menunggu giliran masuk ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan. PPPS Tanah Rendah Gang V, Kebon Dalam, Jakarta sedang menyiapkan tinta untuk cap jempol bagi pemilih buta huruf yang telah menggunakan hak suaranya.

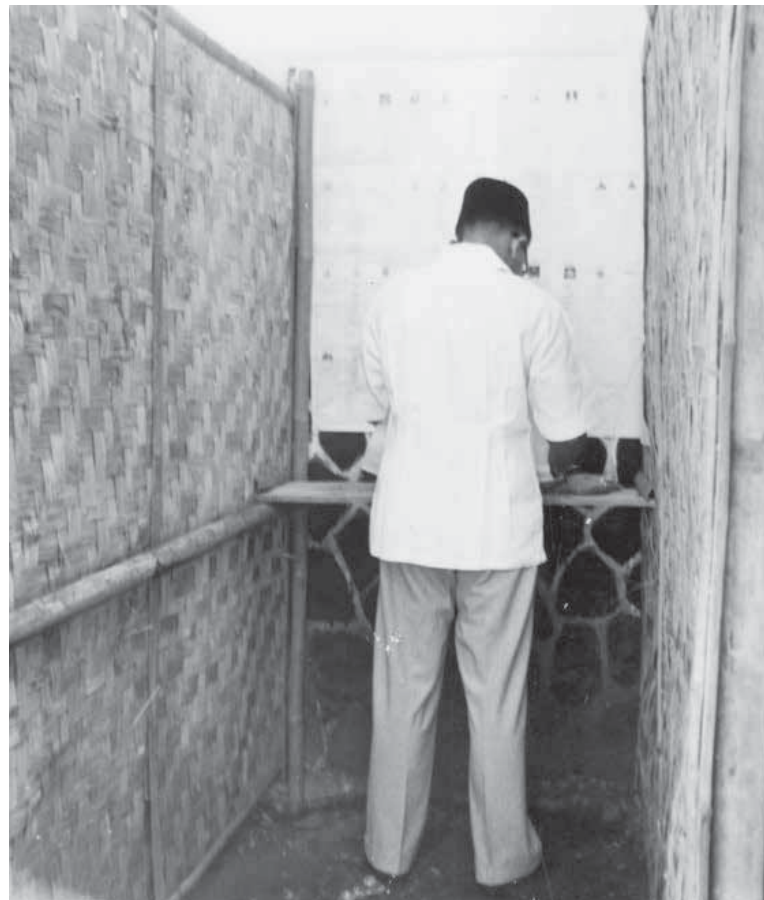
Pencoblosan surat suara dilakukan di dalam bilik-bilik TPS. Setiap pemilih berhak mencoblos tanda gambar sesuai dengan aspirasinya masing-masing. Setiap pemilih hanya berhak mencoblos satu kali pada lembaran surat suara. Sebelum mencoblos, para pemilih harus cermat memperhatikan tanda gambar kontestan pemilu yang terdapat dalam lembaran surat suara, sebab banyak tanda gambar yang mirip.





Perdana Menteri Burhanudin Harahap sedang menyalurkan aspirasinya di TPS Jalan Mampang, Jakarta Selatan. Sebagai tokoh Masyumi, Burhanudin Harahap memiliki kepentingan untuk memenangkan partai tersebut.

Setelah surat suara dicoblos maka dilipat kembali seperti semula dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan. Nampak pada gambar Ketua Umum PSI Sutan Sjahrir sedang memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.



▲ Perdana Menteri Burhanudin Harahap sedang mencoblos surat suara di bilik suara di TPS Jalan Mampang, Jakarta 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 4-3



▲ Ketua Umum PSI Sutan Sjahrir sedang memasukan surat suara ke dalam kotak suara, 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 2-26



Dalam pelaksanaan pencoblosan, PPPS kadang-kadang harus memandu warga masyarakat yang kurang paham aturan pemilu. Hal itu dimungkinkan karena masih banyak warga masyarakat yang buta huruf, lanjut usia, sakit, atau berkebutuhan khusus.



Seorang ibu yang sudah lanjut usianya, ▲ sedang memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, Jakarta, 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 2-35



Seorang pemilih tuna netra sedang ▲ memasukan surat suara didampingi oleh anggota PPPS, 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen K 550929 FG 11-38



Semangat dalam menyukseskan Pemilu 1955 tidak dapat dibatasi oleh garis-garis etnis dan keyakinan. Apa pun keyakinan dan sukunya semua ingin memberikan hak suaranya. Nampak seorang perempuan keturunan Tionghoa memasukkan surat suara ke dalam kotak suara di TPS Tanah Abang Bukit, Jakarta. Seorang perempuan keturunan Arab sedang memasukkan surat suara ke dalam kotak suara di TPS Jati, Petamburan, Jakarta.



▲ Seorang pemilih keturunan Tionghoa sedang memasukkan surat suaranya di TPS Tanah Abang Bukit, Jakarta 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 11-31



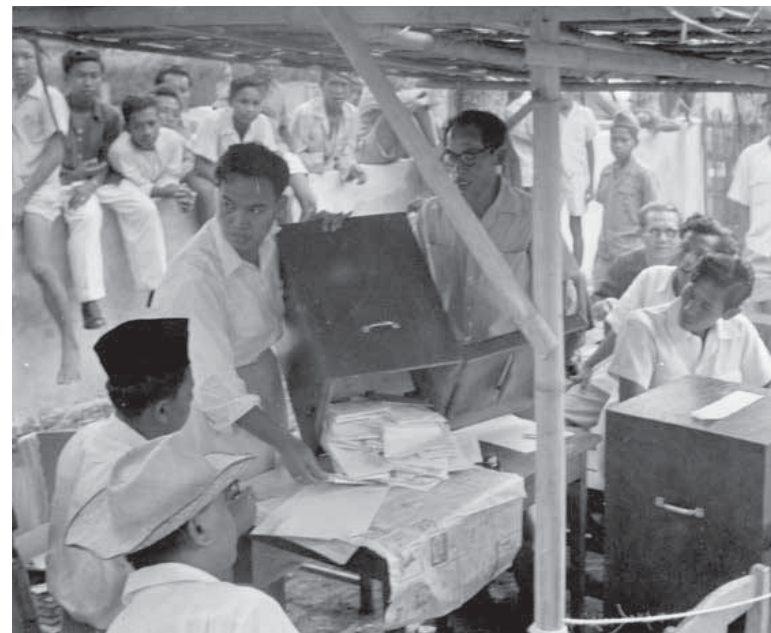
▲ Seorang ibu keturunan Arab sedang memasukkan surat suaranya kedalam kotak suara di TPS Jati Petamburan, Jakarta 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen K 550929 FG 11-17



Setelah semua pemilih melakukan pencoblosan, PPPS kemudian melaksanakan penghitungan suara di TPS setempat. Sebelum penghitungan surat suara dimulai, kotak suara harus dibuka terlebih dahulu. Pembukaan kotak suara harus dilakukan di depan para saksi dan petugas keamanan yang mengawal TPS. Setelah kotak suara dibuka, seluruh surat suara dikeluarkan dan dipastikan bahwa tidak ada lagi surat suara tersisa di dalam kotak.



Petugas PPPS sedang membuka kotak suara disaksikan petugas keamanan dan para saksi, Jakarta 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 1-34



Anggota PPPS sedang membuka kotak suara sebelum penghitungan suara DPR, Jakarta 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 4-28



Tahapan penghitungan suara adalah tahap yang paling menegangkan bagi kader dan simpatisan kontestan pemilu. Mereka memantau dengan cermat proses penghitungan suara yang dilakukan oleh PPPS. Dalam proses ini diperlukan sikap lapang dada dari setiap simpatisan, sebab jumlah suara yang didapat bisa jadi tidak sesuai harapan.

Proses penghitungan suara kadang kala bisa berlangsung hingga malam. Kejadian seperti ini terjadi di TPS Kemayoran dan Rumah Sakit Umum Pusat Jakarta. Meskipun demikian, PPPS maupun para saksi tetap melaksanakan tugasnya dengan penuh semangat dan tanggung jawab.



▲ TPS di Karet Bendungan Hilir, anggota-anggota PPPS sedang memeriksa tanda gambar yang sudah ditusuk untuk menghitung suara-suara yang telah masuk, Jakarta 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen K 550929 FL 4-13



Para anggota PPPS sedang menentukan sah ▲
atau tidak surat suara yang telah masuk di TPS
Kebon Sirih, Jakarta 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 4-30





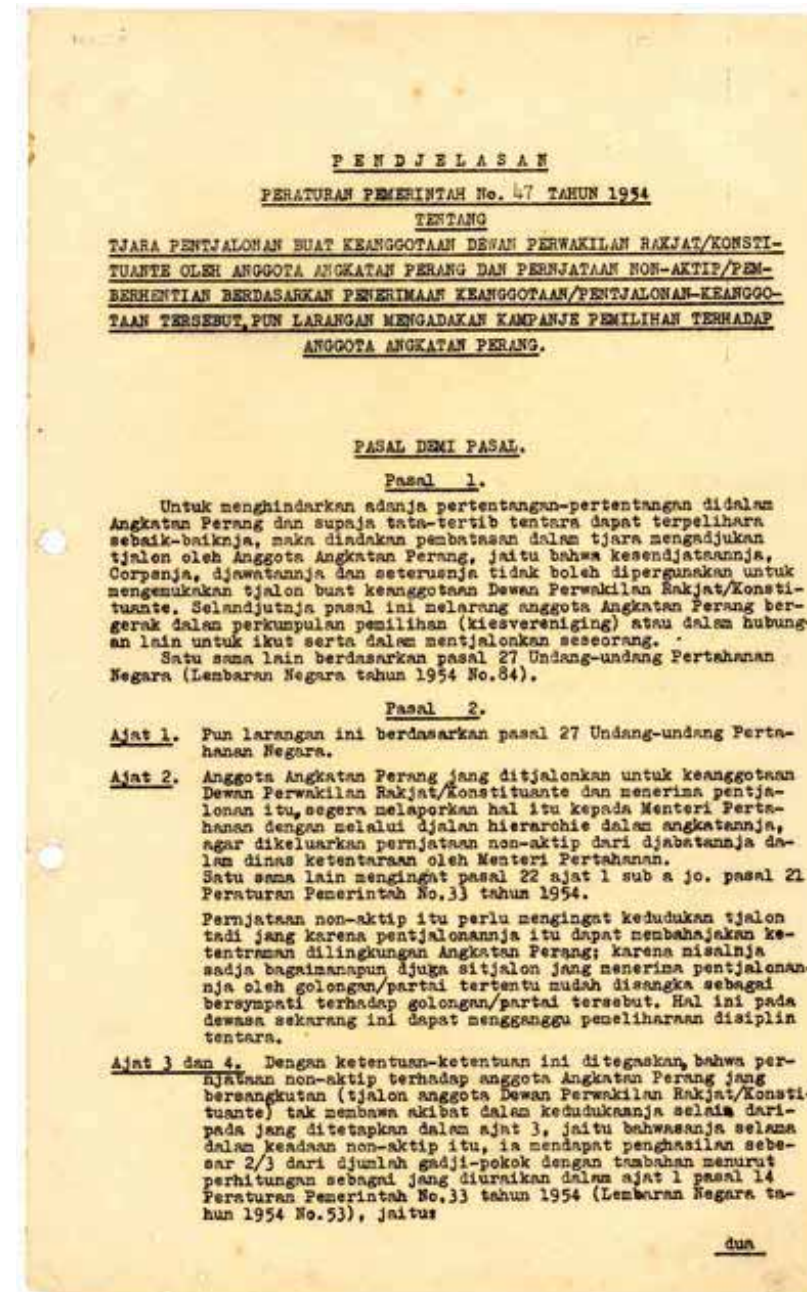
◀ Suasana pada saat penghitungan surat suara di TPS Kelurahan Kemayoran yang berlangsung hingga malam, 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FH 3-2

◀ Penghitungan jumlah suara berlangsung sampai malam hari di Rumah Sakit Umum Pusat, Jakarta, 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 1339

b. Hak Suara APRI

Pada Pemilu 1955, anggota APRI memiliki hak pilih dan dipilih. Namun demikian guna menjaga netralitas dan keutuhan korps maka keterlibatan anggota APRI dalam pemilu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1954 tentang Cara Pencalonan Buat Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Konstituante Oleh Anggota Angkatan Perang dan Pernyataan Non Aktif/Pemberhentian Berdasarkan Penerimaan Keanggotaan/Pencalonan Keanggotaan Tersebut, Pun Larangan Mengadakan Kampanye Pemilihan Terhadap Anggota Angkatan Perang. Dalam peraturan tersebut anggota APRI dilarang melakukan kampanye. Bagi anggota APRI yang namanya telah masuk daftar tetap calon anggota DPR/Konstituante dinyatakan tidak aktif oleh Menteri Pertahanan. Bagi anggota APRI yang telah berpangkat letnan kolonel atau lebih tinggi yang telah terpilih sebagai anggota DPR akan diberhentikan dengan hormat.

Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1954 tentang cara pencalonan buat keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Konstituante oleh anggota Angkatan Perang dan pernyataan non-aktif/atau pemberhentian berdasarkan penerimaan keanggotaan/pencalonan-keanggotaan tersebut pun dilarang mengadakan kampanye pemilihan terhadap anggota Angkatan Perang, 20 September 1954
Sumber: ANRI, Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum Tahun 1949-2005 No. 1584





Pemungutan suara DPR untuk anggota APRI di Jawa Barat (termasuk di dalamnya Jakarta) dilaksanakan pada tanggal 15 - 16 Oktober 1955. Suasana antrean anggota APRI di TPS Balai Prajurit Nusantara, Jakarta. Para perwira piket juga menyempatkan diri hadir untuk memberikan hak pilihnya.



▲ TPS untuk anggota APRI di Balai Prajurit Nusantara, Jakarta, 15 Oktober 1955
Sumber: ANRI, Kempen K 550929 FG 1-13; K 551015 FG 1-10



Sikap tegas dan awas ditunjukkan seorang anggota APRI di Yogyakarta sebelum melakukan pencoblosan. Surat suara yang lebar dibentangkan agar dapat dipastikan surat suara tersebut tidak cacat. Selanjutnya ia mencari posisi tanda gambar kontestan pemilu pilihannya yang akan dicoblos. Dengan demikian ketika ia berada di bilik suara akan mencoblos dengan benar sesuai pilihannya.

Seorang anggota APRI sedang memperhatikan surat suara yang bergambar lambang-lambang partai politik sebelum dicoblos, 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen Yogya 4988





Karena tugas menjaga keamanan bersifat aktif (*mobile*) maka jadwal pemungutan suara disesuaikan. Pemungutan suara bagi awak kapal ALRI menyesuaikan jadwal kapal berlabuh. Pada kapal besar seperti KRI Hang Tuah disediakan TPS khusus bagi awaknya ketika telah berlabuh dari tugas patroli samudera.

Pemungutan suara di atas kapal ALRI, 14 Oktober 1955
Sumber: ANRI, Berita Antara Oktober 1955

No.288/A. - 6 - DALAM NEGERI, SABTU, 15-10-1955 MS.-

11. RAPAT UMUM PENGHITUNGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA
DIDAPAHAN SUMATERA SELATAN

Palembang, 14/10 (Antara).

Bertempat di Balai Pertemuan kotabesar Palembang, semalam dimulai penghitungan suara pemilihan umum untuk daerah Sumatera Selatan dipeng-
pan umum. Rapat umum penghitungan ini mendapat perhatian besar, ter-
utama dari kalangan kepertaian dan organisasi rakjat dikota Palembang.
Dari pihak resmi nampak hadir a.l. Bupati Mgs.A.Rachman dari Kan-
tor Gubernur, Kepala Penerangan propinsi dan pembesar2 lainnya. Peng-
hitungan dimulai dari kewedanaan Seberang Ulu kota Palembang. Rapat
dipimpin oleh Nurhadjji Hasan, ketua Panitia Pemilihan Daerah dan se-
luruh anggotanya nampak hadir.

Hasil sementara untuk daerah Sumbel.

Berdasarkan angka2 jeng terdaftar dalam proses perbul dari panitia2
kabupaten jeng disampaikan pada Panitia Pemilihan Daerah, kotjuati un-
tuk daerah kabupaten Lampung Selatan dan Musi Ulu/Rawas jeng angka2nja
baru diketahui dari sumber lain, maka kedudukan hasil2 dari partai2
terbesar didaerah ini adalah sebagai berikut:

Lima partai jeng memegang rol di Sumatera Selatan ternjata menurut
urutan hasilnja ialah: Masjumi 610.637; PNI 217.825; PKI 168.770;
PSII 143.986 dan Nohdletul Ulama 98.446.

Djumlah suara jeng didapat PSI ternjata lebih rendah dari jeng da-
pat ditjapai oleh Perti.

Pembagian kursi.

Mengingat djumlah pemilih jeng datang mempergunakan haknja rata2
80%, dikira kiesquotient untuk daerah Sumatera Selatan akan menjapai
djumlah kira2 120.000 suara untuk satu kursi.

Bilamana kiranya ini tidak meleset, maka Masjumi akan mendapat 5 kur-
si, PNI 1 kursi, PKI 1 kursi dan PSII 1 kursi. Djadi masih dua kursi
jeng belum dipenuhi, jeng mungkin akan didapat oleh N.U. dan PNI ma-
sing2 sekursi, jaitu sesudah digabungkan atau ditambah dari suara jg
didapat partai tersebut didaerah lain.

Djadi pada akhirnya 10 kursi untuk Parlemen dari Sumatera Selatan
akan terbagi atas 5 kursi Masjumi, 2 kursi PNI, 1 kursi PKI, 1 kursi
PSII dan 1 kursi N.U.

-M-

12. PEMUNGUTAN SUARA DI ATAS KAPAL

Surabaya, 14/10 (Antara).

Kemarin di Ujung, diatas kapal "Hang Tuah" jeng baru kembali
dari daerah operasi, telah dilakukan pemungutan suara susulan untuk
para anggota Angkatan Laut K.D.M.S. jeng pada hari pemungutan suara
tanggal 29 September tidak dapat memberikan suaranya karena kapal-
nja sedang berlabuh, dan mereka jeng pada waktu itu bertugas menjaga
keamanan.

*MS-

13. WK. PRESIDEN AKAN SINGGAH SEMALAM DI MEDAN

Medan, 14/10 (Antara). Dalam perdjalanannja ke India pada tgl. 24/10
jad. ini, Wakil Presiden Moh.Hatta akan singgah semalam di Medan dan
keesokan harinnja tgl. 25/10 Wk.Presiden dan rombongannja akan man-
ruskan perdjalanannja ke India.

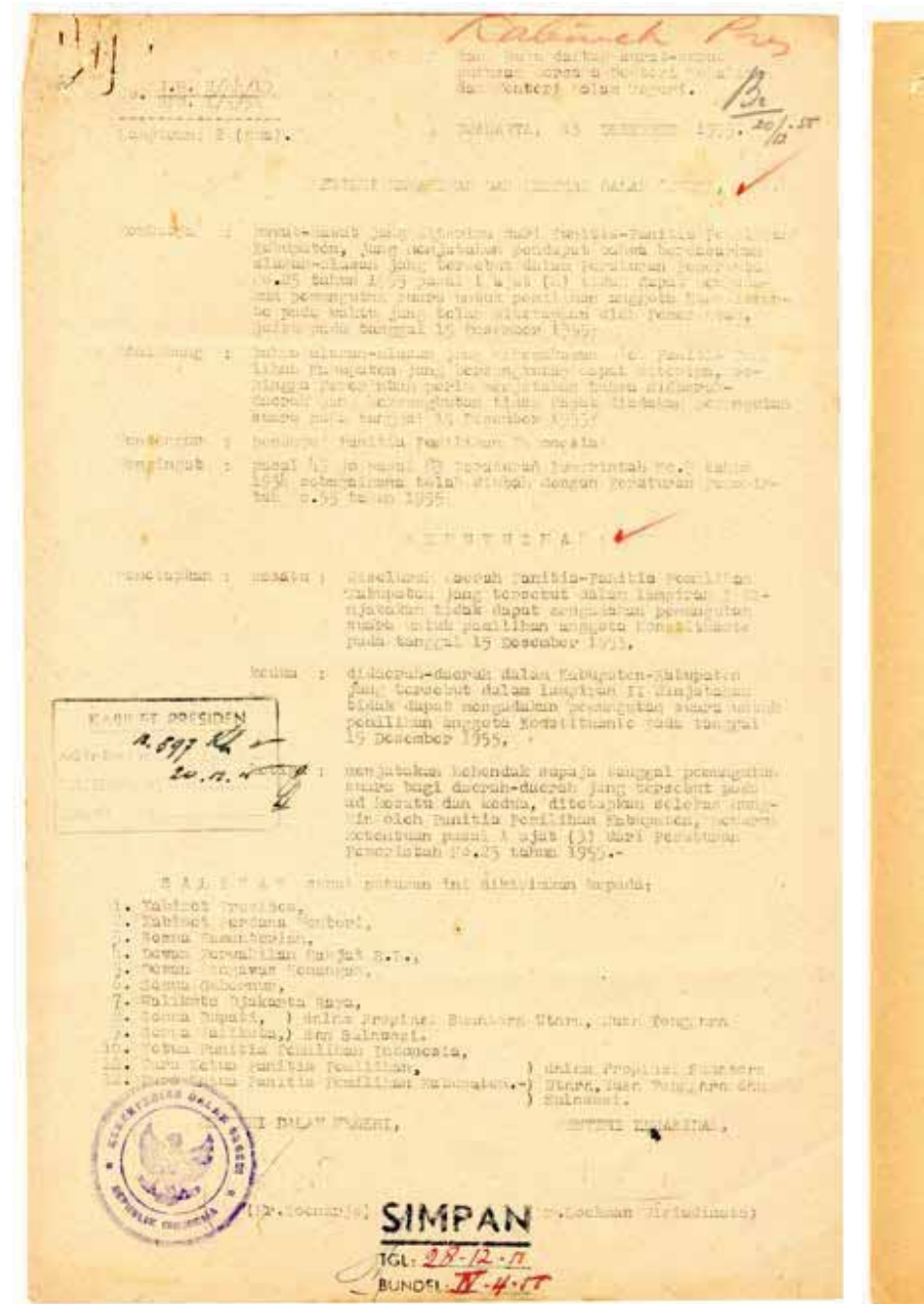
Rombongan Wk.Presiden terdiri dari 25 orang dan dalam rombongan
itu turut serta djuga duta-besar India di Djakarta Tyabji, beserta
njoonja.

(2150) -PS-

2. Pemilu Konstituante

Pemilihan anggota Konstituante secara umum dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Namun di beberapa daerah ada yang diundur, hal itu berkaitan dengan kondisi di daerah setempat. Jika hal itu terjadi maka PP di kabupaten wajib memberitahukan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri beberapa hari sebelumnya. Kedua menteri tersebut kemudian mengeluarkan surat keputusan bersama Nomor J.B. 2/44/19 dan BPU I/5/31 tanggal 13 Desember 1955 mengenai penundaan pemilihan anggota Konstituante di beberapa daerah.

Keputusan bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan tidak dapat mengadakan pemungutan suara untuk pemilihan anggota Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955 di daerah-daerah yang disebutkan dan supaya melakukan pemungutan secepat mungkin sesuai kondisi setempat
 Sumber: ANRI, Kabinet Presiden No. 879



LAMPELAI I.-

Lampiran surat Keputusan beranggotakan Montari
Kebekisan dan Montari Dalam Montari tanggal
13 Desember 1955 No. 1.02/14/55
No. 1.02/15/55

DAFTAR Kabupaten-Kelurahan yang ditetapkan tidak dapat
mendukung pelaksanaan suara untuk seluruh Kelu-
pahan pada tanggal 15 Desember 1955.-

No. urut.-	Nama Daerah Pemilihan.-	Nama Panitia Pemilihan Kabupaten.-	Nama daerah-daerah yang mendampingi pelaksanaan pemerintahan.-	Keterangan.-
1.	Suntara-Utara.-	Atjeh Besar.-	Seluruh Kelu- pahan.-	Pem. Suara Konst. pada tgl. 21 Desember 1955, menurut ke- putusan P.P. Sum. Utara tgl. 6 Des. 1955 No. 8035/5.-
2.	Idem.-	Pada.-	Idem.-	Pem. Suara Konst. pada tgl. 16 Djemberi 1956, menurut ke- putusan P.P. Sum. Utara tgl. 6 Des. 1955 No. 8035/5.-
3.	Idem.-	Atjeh Utara.-	Idem.-	Pem. Suara Konst. pada tgl. 16 Djemberi 1956, menurut ke- putusan P.P. Sum. Utara tgl. 6 Des. 1955 No. 8035/5.-
4.	Idem.-	Atjeh Timur.-	Idem.-	Pem. Suara Konst. pada tgl. 16 Djemberi 1956, menurut ke- putusan P.P. Sum. Utara tgl. 6 Des. 1955 No. 8035/5.-
5.	Idem.-	Atjeh Tengah.-	Idem.-	Pem. Suara Konst. pada tgl. 16 Djemberi 1956, menurut ke- putusan P.P. Sum. Utara tgl. 6 Des. 1955 No. 8035/5.-
6.	Idem.-	Atjeh Selatan.-	Idem.-	Pem. Suara Konst. pada tgl. 16 Djemberi 1956, menurut ke- putusan P.P. Sum. Utara tgl. 6 Des. 1955 No. 8035/5.-
7.	Idem.-	Deli/Berdak.-	Idem.-	Pem. Suara Konst. pada tgl. 16 Djemberi 1956, menurut ke- putusan P.P. Sum. Utara tgl. 6 Des. 1955 No. 8035/5.-
8.	Idem.-	Langkat.-	Idem.-	Pem. Suara Konst. pada tgl. 16 Djemberi 1956, menurut ke- putusan P.P. Sum. Utara tgl. 6 Des. 1955 No. 8035/5.-
9.	Idem.-	Karok.-	Idem.-	Pem. Suara Konst. pada tgl. 16 Djemberi 1956, menurut ke- putusan P.P. Sum. Utara tgl. 6 Des. 1955 No. 8035/5.-
10.	Idem.-	Simalungun.-	Idem.-	Pem. Suara Konst. pada tgl. 16 Djemberi 1956, menurut ke- putusan P.P. Sum. Utara tgl. 6 Des. 1955 No. 8035/5.-
11.	Idem.-	Asahan.-	Idem.-	Pem. Suara Konst. pada tgl. 16 Djemberi 1956, menurut ke- putusan P.P. Sum. Utara tgl. 6 Des. 1955 No. 8035/5.-
12.	Idem.-	Labuhanraja.-	Idem.-	Pem. Suara Konst. pada tgl. 16 Djemberi 1956, menurut ke- putusan P.P. Sum. Utara tgl. 6 Des. 1955 No. 8035/5.-

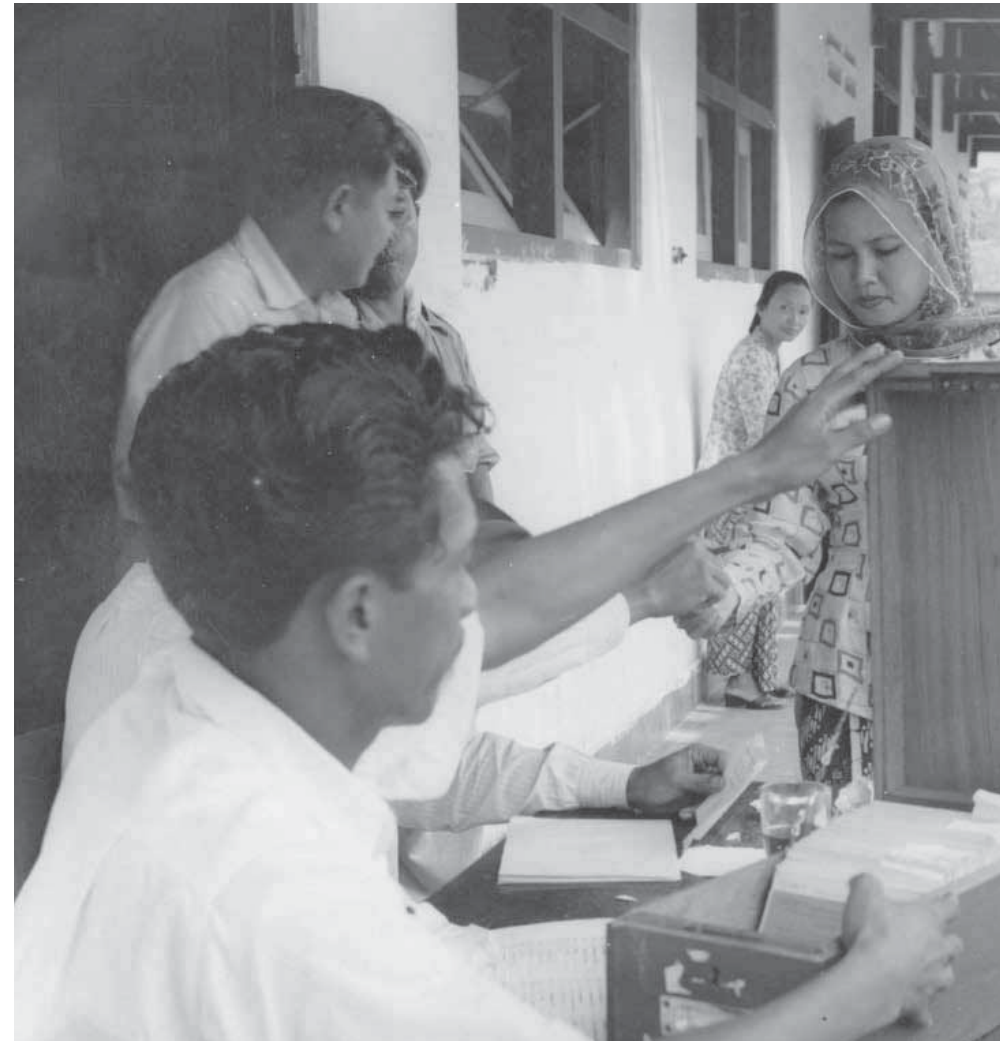
13.	Suntara-Utara.-	Tapanuli Selatan.-	Seluruh Kelu- pahan.-	Pem. Suara Konst. pada tgl. 21 Desember 1955, menurut ke- putusan P.P. Sum. Utara tgl. 6 Des. 1955 No. 8035/5.-
14.	Idem.-	Kisaran.-	Idem.-	Pem. Suara Konst. pada tgl. 29 Desember 1955, menurut ke- putusan P.P. Sum. Utara tgl. 6 Des. 1955 No. 8035/5.-
15.	Idem.-	Kota Madina.-	Idem.-	Pem. Suara Konst. pada tgl. 29 Desember 1955, menurut ke- putusan P.P. Sum. Utara tgl. 6 Des. 1955 No. 8035/5.-
16.	Riau Tenggara Timur.-	Flora Timur dan Kepulauan Selor.-	Idem.-	Menurut ke- putusan P.P. Keb. Lampung tgl. 21 Des. 1955 No. 1219.-
17.	Idem.-	Engku.-	Idem.-	Menurut ke- putusan P.P. Keb. Medan tgl. 28 Des. 1955 No. 1470.-
18.	Sul. Sel./Tenggara.-	Mekassar.-	Idem.-	Menurut surat P.P. Keb. Mekassar tgl. 5-12-55 No. 2032/ppkmb/ps/Konst.-



a. Hak Suara Sipil

Pada gambar di samping nampak seorang ibu sedang menunjukkan surat pemberitahuan pencoblosan kepada petugas PPPS. Petugas pun segera menyocokkan surat pemberitahuan pencoblosan dengan daftar pemilih tetap yang ada di TPS tersebut.

Keberagaman budaya di Indonesia salah satunya ditunjukkan melalui pakaian adat. Pada hari pemilu yang istimewa seorang perempuan warga suku Batak Karo mengenakan pakaian adatnya.



▲ TPS di Blok M Kebayoran Baru, seorang pemilih sedang menyerahkan surat panggilan untuk dicocokkan dengan daftar nama pemilih, 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, Kempen 551215 FL 4



Seorang ibu dengan berpakaian adat Karo ▲
tengah menentukan pilihannya dalam bilik suara
di salah satu TPS di Karo, 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, KR 560322 FG 2-39



Suasana pendaftaran dan pencoblosan anggota Konstituante di bilik suara TPS Kebun Binatang Cikini, Jakarta. Pada bagian belakang bilik suara dibentangkan kain untuk memastikan tanda gambar kontestan pemilu yang dicoblos oleh pemilih tidak diketahui oleh orang lain.

Suasana di TPS Kebun Binatang Cikini, Jakarta. ▶
Petugas PPPS sedang mencocokkan daftar pemilih sebelum memberikan surat suara, Jakarta 15 Desember 1955

Sumber: ANRI, Kempen 551215 FG 7-10

Pada bagian belakang bilik suara TPS Kebun Binatang Cikini dibentangkan kain untuk menjaga kerahasiaan pilihan pemilih Jakarta 15 Desember 1955 ▶

Sumber: ANRI, Kempen 551215 FG 7-8







▲ Seorang pemilih WNI keturunan Eropa sedang memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, 15 Desember 1955.
Sumber: ANRI, Kempen 551215 FG 2-14



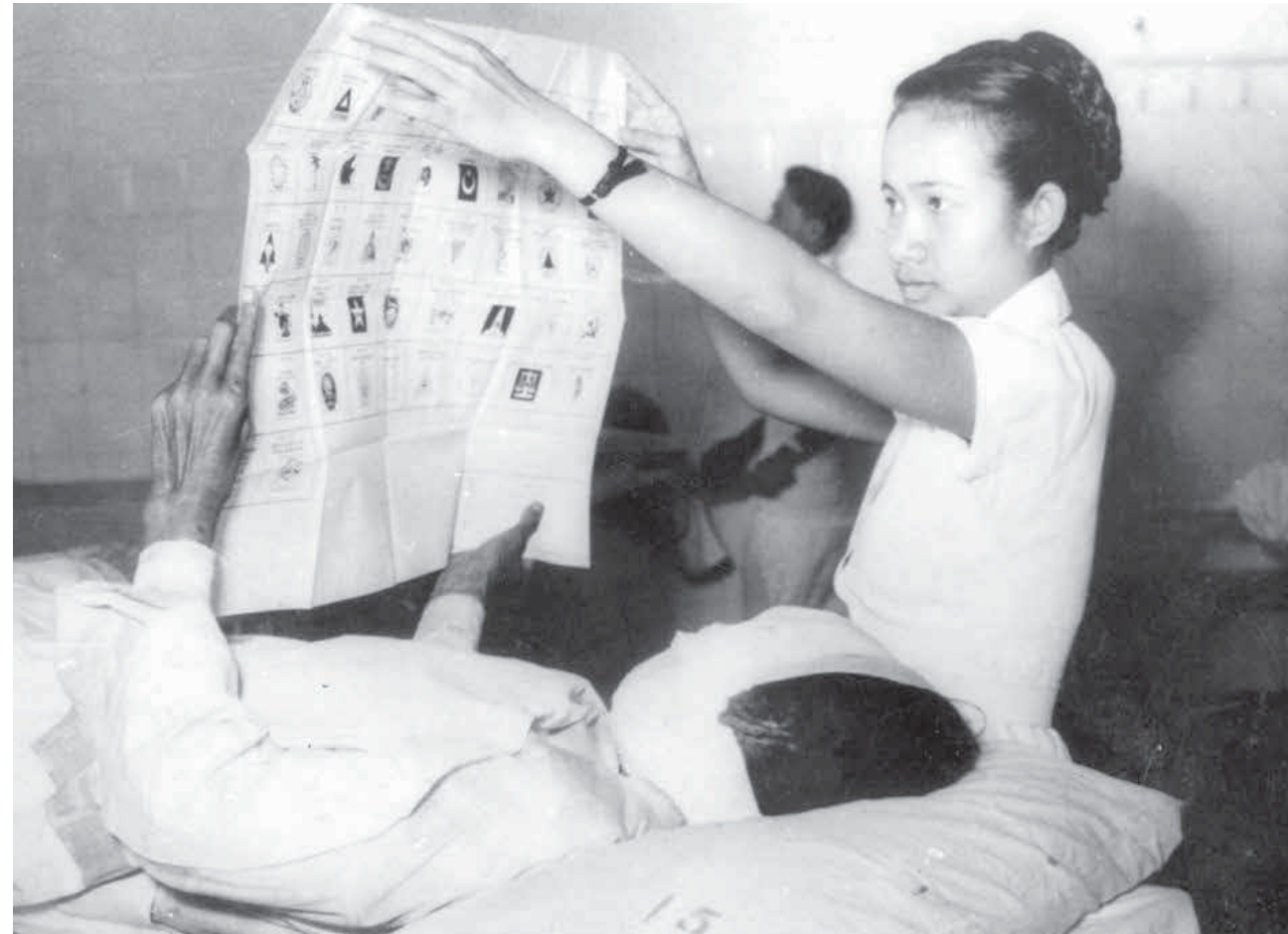
Pemilu 1955 bukan hanya milik penduduk asli Indonesia, namun mereka keturunan Eropa yang telah menjadi WNI juga turut berpartisipasi. Seorang laki-laki keturunan Eropa sedang memasukkan surat suara ke kotak suara pada pemilihan anggota Konstituante.



▲ Para pengurus TPS sektor Rumah Sakit Rancabadak, Bandung bekerja dengan sabar menghadapi pemilih orang yang sakit, 15 Desember 1955;
Sumber: ANRI, KR 560322 FG 2-1



WNI yang sedang sakit juga tetap memiliki hak suara yang sama. Pihak rumah sakit wajib menyediakan TPS khusus bagi pasien, keluarga pasien, dan petugas rumah sakit pada hari pencoblosan. Seorang pasien yang sakit parah dibimbing oleh petugas PPPS Rumah Sakit Umum Rancabadak, Bandung untuk memilih tanda gambar kontestan pemilu Konstituante.



Seorang juru rawat sebagai wakil PPPS tengah melayani ▲
pemilih dengan membentangkan surat suara di Rumah
Sakit Umum Rancabadak, Bandung 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, KR 560322 FG 2-29



Para pelaut yang kapalnya tengah sandar di pelabuhan Tanjung Priok dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS Tanjung Priok. Nampak seorang pelaut membentangkan surat suara yang didapatnya dan setelah mencoblos surat suara tersebut dimasukkan ke dalam kotak suara.

Alat-alat keamanan negara yang bertugas mengamankan pemilu juga menggunakan hak pilihnya. Sebagian besar suara anggota kepolisian negara dan keluarganya disalurkan melalui Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (PPPRI). Seorang anggota kepolisian sedang memasukkan surat suara di TPS Kebon Sirih pada tanggal 15 Desember 1955.



▲ Seorang anak buah kapal Jawatan Pelayaran, sedang memberikan hak suaranya, di TPS Pelabuhan Tanjung Priok, 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, Kempen 551215 FH 17; Kempen 551215 FH 18



Seorang anggota Polisi sedang memberikan hak pilihnya di TPS Kebon Sirih, 15 Desember 1955. ▲
Sumber: ANRI, Kempen 551215 FG 6-21





Presiden Sukarno sebagai kepala negara memberi teladan dengan turut serta memberikan hak pilihnya dalam pemilihan anggota Konstituante tanggal 15 Desember 1955. Nampak dengan suka cita Presiden Sukarno memasukkan surat suara di TPS Kementerian Penerangan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta.

Perdana Menteri Burhanudin Harahap selaku kepala pemerintahan juga memberikan hak suaranya pada pemilihan anggota Konstituante di TPS Jalan Cik Ditiro, Jakarta. Dalam melaksanakan hak pilihnya, Perdana Menteri Burhanudin Harahap juga mengajak istri tercinta Ny. Siti Badriyah Burhanudin Harahap.



◀ Presiden Sukarno selaku kepala negara tengah memasukan surat suara ke dalam kotak suara di TPS Kementerian Penerangan Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, Kempen 551215 FG 6-6



▲ Perdana Menteri Burhanudin Harahap sedang memasukan surat suaranya ke dalam kotak suara di TPS Jalan Cik Ditiro, Jakarta 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, Kempen 551215 FG 4-6

▲ Nyonya Siti Badriyah Burhanudin Harahap sedang memasukan surat suaranya ke dalam kotak suara di TPS Jalan Cik Ditiro, Jakarta 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, Kempen 551215 FG 4-5



Setelah proses pencoblosan selesai, kegiatan selanjutnya adalah penghitungan suara di masing-masing TPS. PPPS melakukan penghitungan suara disaksikan oleh saksi-saksi dan warga masyarakat. Pemandangan penghitungan suara di TPS Blok D Kebayoran Baru, Jakarta.



▲ Pemeriksaan dan perhitungan suara yang telah masuk oleh anggota PPPS dengan disaksikan oleh masyarakat dan para saksi di TPS Kebayoran Baru, 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, Kempen 551215 FL 9; Kempen 551215 FL 10



b. Hak Suara APRI

Anggota APRI memberikan hak suaranya di TPS yang terdapat di asrama militer atau tempat-tempat yang telah ditentukan. Sebagian dari anggota APRI dapat melaksanakan pemilihan anggota Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955, namun sebagian lagi dilaksanakan setelahnya.



Seorang petugas keamanan (anggota APRI) sedang ▲
memasukan surat suaranya, 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, Kempen 551215 FG 2-18





B. Suasana di Sekitar TPS

1. Antusiasme Masyarakat Dalam Memilih Cukup Tinggi

Pada hari pemilihan baik untuk anggota DPR maupun Konstituante rakyat berbondong-bondong menuju TPS. Ada kegairahan dan antusiasme pada diri rakyat Indonesia dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Nampak pada foto ratusan warga Bojonegoro bergerak menuju TPS pada tanggal 29 September 1955.

Pada masyarakat tradisional kentongan merupakan alat komunikasi yang efektif. Hal itu nampak di daerah Makassar di mana kentongan digunakan untuk memanggil warga agar bergerak menuju ke TPS pada tanggal 15 Desember 1955.

Semangat yang sama ditunjukkan warga masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan. Mereka bersedia mengarungi lautan dengan menggunakan sampan untuk menuju ke TPS yang ada di pulau terdekat.

◀ Suasana pemilu di Kabupaten Bojonegoro 29 September 1955
Sumber: ANRI, KR 560322 FG 2-35



▲ Sebuah kentongan tengah dipukul sebagai panggilan kepada para pemilih yang berhak dan telah ditentukan datang ke TPS guna memberikan hak suaranya, Makassar 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, KR 560322 FG 2-9



Para pemilih dengan daya upaya, menaiki ▲
perahu mengarungi lautan menuju ke tempat
yang telah ditentukan guna memberikan hak
suaranya masing-masing, 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, KR 560322 FG 2-8



2. Budaya Antre Dalam Menggunakan Hak Suara di TPS

Budaya antre sekilas memang terlihat suatu hal yang sepele, namun sebenarnya menunjukkan tingkat peradaban suatu bangsa. Pada bangsa yang sudah maju antre merupakan suatu etika yang harus ditaati di tempat umum. Presiden Sukarno rela mengantre bersama warga masyarakat biasa di TPS Kementerian Penerangan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta. Hal itu menunjukkan sifat Presiden Sukarno yang sederhana dan merakyat.

Wakil Presiden Mohammad Hatta menyalurkan hak suaranya pada pemilihan anggota Konstituante di gedung olah raga Jakarta. Dalam keadaan mengantre Wakil Presiden Mohammad Hatta masih menyempatkan diri membaca surat kabar dan bercengkerama dengan tokoh PNI Ali Sastroamidjojo.

Selama Pemilu 1955 para tokoh nasional telah menunjukkan kebersahajaannya. Hal itu ditunjukkan oleh Ketua Umum Masyumi M. Natsir (berkacamata dan berpeci) dan Ketua DPRS Mr. Sartono (merokok) mereka bersedia mengantre dan membaur dengan warga masyarakat biasa.

Presiden Sukarno berdiri di tengah-tengah rakyat sambil menunggu gilirannya bertempat di TPS Kementerian Penerangan di Jalan Medan Merdeka Barat No.9, 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, Kempen 551215 FG 5-5





▲ Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta masih menyempatkan diri membaca surat kabar saat mengantre di TPS gedung olah raga, Jakarta 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, Kempen K 551215 FG 3-2



Mr. Ali Sastroamidjojo dan Wakil Presiden Mohammad Hatta sedang ▲
bercengkerama sambil menantikan giliran untuk melakukan pemilihan
di TPS gedung olah raga, Jakarta 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, Kempen K 551215 FG 3-10



▲ Mohammad Natsir (berkacamata dan memakai peci)
Ketua Umum Masyumi, sedang menanti giliran
untuk menukar surat suara, 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 1-33



Mr. Sartono Ketua DPRS sedang berbaris ▲
menanti gilirannya di TPS Jalan Jawa,
Jakarta 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 7-12



Meski di tengah terik matahari, warga masyarakat di salah satu kawasan Pecinan Jakarta tetap tertib mengantre untuk memberikan suaranya di TPS. Warga dibagi dalam dua baris, barisan perempuan dan laki-laki. Nampak semangat kebersamaan antara penduduk pribumi dan keturunan Tionghoa di kawasan tersebut.



▲ Suasana pemilu di kawasan Pecinan, Jakarta 29 September 1955;
Sumber: ANRI, z



Para pemilih sedang mengantre dengan tertib ▲
menunggu giliran untuk menggunakan hak
pilihnya, Jakarta 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 14-18



C. Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu 1955

Ibu-ibu warga daerah Bangka, Pasar Minggu dan Petamburan, Jakarta telah memiliki kesadaran politik yang tinggi. Hal ini terlihat dari semangat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 1955. Mereka bersedia mengantre dengan tertib di TPS-nya masing-masing.





◀ Pemilu Konstituante di daerah
Bangka, Pasar Minggu, Jakarta
15 Desember 1955
Sumber: ANRI, Kempen 551215 FL 1-1

◀ Ibu-ibu sedang berbaris untuk
mendapatkan gilirannya di TPS
Kecamatan Petamburan, Jakarta
29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen 550929 FG 10-4



Di belakang orang-orang besar selalu ada perempuan-perempuan luar biasa. Mereka memberikan *support* kepada suaminya yang merupakan tokoh nasional agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Para istri tokoh nasional seperti Ibu Fatmawati Sukarno dan Ibu Rahmi Hatta juga menggunakan hak pilihnya seperti yang dilakukan oleh suami tercinta.

Ibu Fatmawati Sukarno tengah menanti giliran memberikan hak suaranya, Jakarta 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, Kempen 551215 FG 6-12

Ibu Rahmi Hatta sedang memasukan surat suaranya ke dalam kotak suara di TPS gedung olah raga, Jakarta 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, Kempen 551215 FG 2-6







Bukan hanya sebagai pemilih, kaum perempuan juga turut aktif dalam susunan kepanitiaan Pemilu 1955. Sebagai contoh Ketua PP Jakarta Raya dijabat oleh Ny. S. Pudjobuntoro. Pada beberapa TPS nampak anggota PPPS dijabat kaum perempuan. Seperti terlihat di TPS gedung olah raga dan TPS Sekolah Rakyat Kebayoran Baru, Jakarta dijabat perempuan.



▲ Ketua PP Jakarta Raya Ny. S. Pudjobuntoro
Sumber: ANRI, Kempen KR 560322 FG 2-18



Seorang petugas PPPS perempuan sedang mengeluarkan surat suara untuk dihitung serta diperiksa hasilnya di TPS gedung olah raga, Jakarta 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, Kempen K 551215 FG 3-59 ▲



Seorang ibu menjadi PPPS di bagian pendaftaran di TPS Sekolah Rakyat di Kebayoran Baru, 23 Desember 1955
Sumber: ANRI, Kempen 551228 FL 3 ▲



Pada pemilu Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955, ibu-ibu di Kelurahan Randusari, Semarang Selatan menyediakan tempat penitipan anak bagi orang tua yang sedang melaksanakan hak pilihnya. Dengan adanya tempat penitipan anak ini, para orang tua dapat memberikan hak pilihnya dengan tenang di TPS.



▲ Pemandangan waktu berjalannya pemilihan umum di kota Semarang di mana telah disediakan panitia penitipan anak di Kelurahan Randusari, Semarang Selatan, 15 Desember 1955
Sumber: ANRI, Kempen KR 560322 FG 2-7

▶ Anggota APRI sedang melakukan tugasnya menjaga keamanan di daerah Kebon Kacang, Jakarta 29 September 1955
Sumber: ANRI, Kempen K 550929 FG 16-11



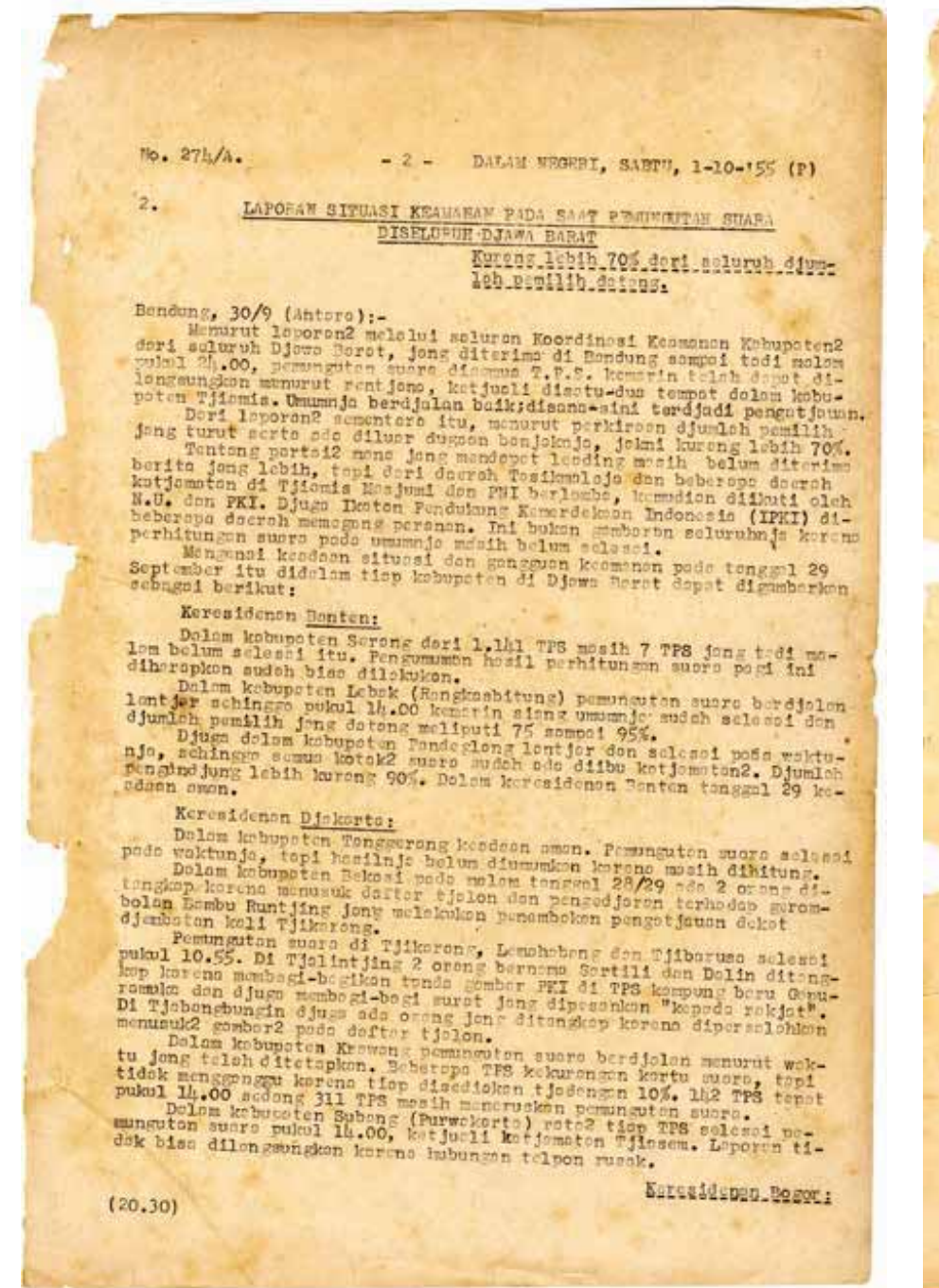
D. Masalah yang Muncul Selama Pelaksanaan Pemilu 1955

Selama pelaksanaan Pemilu 1955, ada dua macam masalah yang muncul, yaitu masalah keamanan dan pelanggaran aturan pemilu. Kondisi keamanan di Indonesia selama pelaksanaan Pemilu 1955 secara umum kondusif. Namun demikian di beberapa daerah mengalami gangguan dari kelompok-kelompok kriminal dan pemberontak DI/TII. Oleh karena itu, APRI dan kepolisian negara disiagakan di beberapa tempat untuk menangkal gangguan keamanan tersebut. Guna mengantisipasi gangguan keamanan di ibu kota, pimpinan APRI mengerahkan pasukan di beberapa tempat strategis. Nampak anggota APRI berjaga-jaga di daerah Kebon Kacang, Jakarta.



Partisipasi masyarakat di Jawa Barat pada saat pemilihan anggota DPR sebesar 70%. Tingginya jumlah penduduk yang tidak menyalurkan hak pilihnya disebabkan karena adanya gangguan keamanan yang dilancarkan oleh pemberontak DI/TII Kartosuwiryo di beberapa tempat, terutama di wilayah Karesidenan Priangan. Pada malam sebelum pencoblosan salah satu TPS di Kecamatan Paseh, Bandung dibakar oleh gerombolan DI/TII. Gerombolan pemberontak juga melakukan pembakaran 18 rumah di kampung Cimuncang, Kabupaten Garut. Kejadian pembakaran kampung dan kontak tembak juga terjadi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dilaporkan juga di beberapa TPS di wilayah Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis pemilihan anggota DPR tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 29 September karena adanya gangguan dari gerombolan DI/TII. Sedangkan gangguan keamanan yang terjadi di wilayah Karesidenan Jakarta terdapat di Kabupaten Bekasi. Gangguan keamanan itu dilakukan oleh gerombolan Bambu Runcing.

Laporan situasi keamanan pada saat pemungutan suara di Jawa Barat
 Sumber: ANRI, Berita Antara 1 Oktober 1955



LAPORAN (2)

Keresidenan Bogor:

Dalam kabupaten Bogor, Sukabumi dan Tjondjur pada umumja pemungutan suara berlangsung dengan aman dan tenang serta pukul 14.00 selesai. Di Tjondjur NKK telah menampak seorang anggota GPII yang berusaha melakukan kampanye pada saat pemungutan suara itu.

"Trouble spots"

Keresidenan Priangan:

Dalam kabupaten Bandung pada malam menjelang tanggal 29 sebuah bangunan TPS dikotjematkan Pasah telah dibakar gerombolan. Tapi pemungutan suara masih bisa dilaksanakan pada hari itu pula dalam bangunan lainnya. Di Tjihadjur (distrik Tjitjilengka) masih terdjadi vurecontot. Di Tjiwidj seorang pegawai Penerangan kotjematkan yang turut menjempuri pelardjaan panitia ditangkap, djuga seorang anggota polisi yang setjara menjemar masuk lingkungan TPS ditahan. Sebuah truck yang membawa surat suara dari Ganunghalu ke Tjihadjur telah terbalik di Tjikari. Surat suara beach aman dan tidak bisa dipakai lagi.

Pada umumja pemungutan suara dalam daerah kabupaten Bandung selesai djuga pukul 14.00 dan djumlah pemilih lebih kurang 80% datang.

Dalam kabupaten Sumedang pemungutan suara berlangsung tempo sesuatu gangguan dan berakhir tepat pada waktunya.

Dalam kabupaten Garut, ketjuali terdjadnja pembakaran kira2 pukul 09.00 pagi pada tanggal 29 September itu dikampung Tjimuntjang (distrik Bojongbong), sampai malam tadi tidak diterima laporan gangguan keamanan yang berarti. Di Tjimuntjang itu ada 18 rumah djadi abu.

Dalam waktu pemungutan suara itu di Garut ada 3 orang perempuan melahirkan anak. Satu bayi antereja meninggal. Laporan lengkap yang meliputi seluruhnya belum diterima, tapi sampai tadi malam, ketjuali terdjadian di Tjimuntjang itu, keadaan kabupaten Garut memberikan kesan agak aman, beda dengan sehari sebelumnya.

Dalam kabupaten Tasikmalaja tertjaget, bahwa pada tanggal 29 itu dalam distrik Singaparna ada gerombolan membakar rumah di desa Sukamanah, membakar bangunan Sekolah Rakjat dikampung Kemando. Dikampung Tjikolampjeng, tidak begitu djauh dari Nglesari, rakjat yang pergi ke TPS diawasi oleh gerombolan bersandjata dengan tembakan2. Peristiwa ini terdjadi antara pukul 06.00 sampai pukul 09.55. Kira2 pukul 10.00 keadaan dalam daerah Singaparna mulai aman lagi. Dikotjematkan Selopo gerombolan djuga melakukan tembakan2.

Dalam daerah kotjematkan Tjisejeng terdjadi vurecontot antara tentara dengan gerombolan, selandjutnja dikampung Terlabung (kotjematkan Tjinca) gerombolan membakar rumah2 dan kemudian berkobar vurecontot. Djuga diganong Tandjung (distrik Manondjaja) terdjadi vurecontot.

Tentang keadaan distrik Korangnunggal belum ada laporan. Dalam kabupaten Tjima ada tempat yaitu Sukarata, termasuk kotjematkan Pangandoran, dimana pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan tanggal 29 karena gangguan gerombolan, sehingga djumlah para pemilih yang datang tjuga 25% dari djumlah seluruhnya. Rakjat dari desa Kertarata, kotjematkan Pangandoran, yang akan pergi ke TPS djuga ditjaget, yaitu dibetulan Tjitjedas (Muarotiga).

(20.45)

Didesa

LAPORAN (3)

Didesa Sedemnja ada 3 rumah dibakar gerombolan dan selandjutnja didesa Tjigandjen ada seorang penduduk dibunuh. Peristiwa2 ini terdjadi diwaktu pagi kira2 antara pukul 07.00 sampai pukul 08.30. Alat2 negara telah melakukan tindakan untuk mantjegah kemungkinan2 lebih djauh. Selain dari pada itu terdjadi pula penagaranan2 dikampung Winduradja (kotjematkan Kawali) dikampung Sukadana (kotjematkan Tjinareges) dan dikampung Tjiajar (desa Margalaja). Umumja gangguan2 itu dapat diatasi.

Keresidenan Tjirebon:

Dalam kabupaten Tjirebon tempat gerombolan menudju kekampung Tjikusael (Pelimanan) tepi dapat dihadang. Selain dari pada itu umumja pemungutan suara berlangsung tempo gangguan2 dalam kabupaten Tjirebon.

Djuga dalam kabupaten Latemaju, Kuningan dan Madjalengka sepanjang laporan sampai tadi malam itu pemungutan suara bisa djalan lanjut.

(3)

DIKORA BANDUNG PKI LEADING.

Beritanya berturut2
PKI, Masjumi, PSI.
Di Topik Masjumi leading, komisioner NU.

Bandung 30/9 (Antara).

Lebih tepat daripada di Djakarta, dikota Bandung sampai djam 20.00 malam ini dari 6 PPS sudah belaka 6 PPS. Menurut angka2 yang dikumpulkan "Antara", PKI leading, kemudian berturut-turut menyusul PKI, Masjumi, PSI.

Hasil2 dalam 6 PPS tab. adalah sbb: PKI 42.183, PKI 41.069, Masjumi 25.958, PSI 7.293.

Di 7 kotjematkan PKI dan Masjumi
dan Masjumi. Pantjasila maju pula.

Laporan2 ja diterima "Antara" mengenai 7 kotjematkan dalam kabupaten Bandung menunjukkan, bahwa PKI dan Masjumi berlomba dengan PKI lebih kedepan sedikit.

Angka2 sbb: PKI 34.256, Masjumi 31.417, PKI 22.345, PSI 2.873.

Dikota dan dikabupaten Bandung, selain PKI, PKI, Masjumi djuga turut berlomba dan mendapat angka2 lumayan Gerakan Pembela Pantjasila. Dikota Bandung gerakan tab. yang sudah diketahui mendapat suara 23.552, dan dikabupaten Bandung di 7 kotjematkan tab. mendapat 26.314.

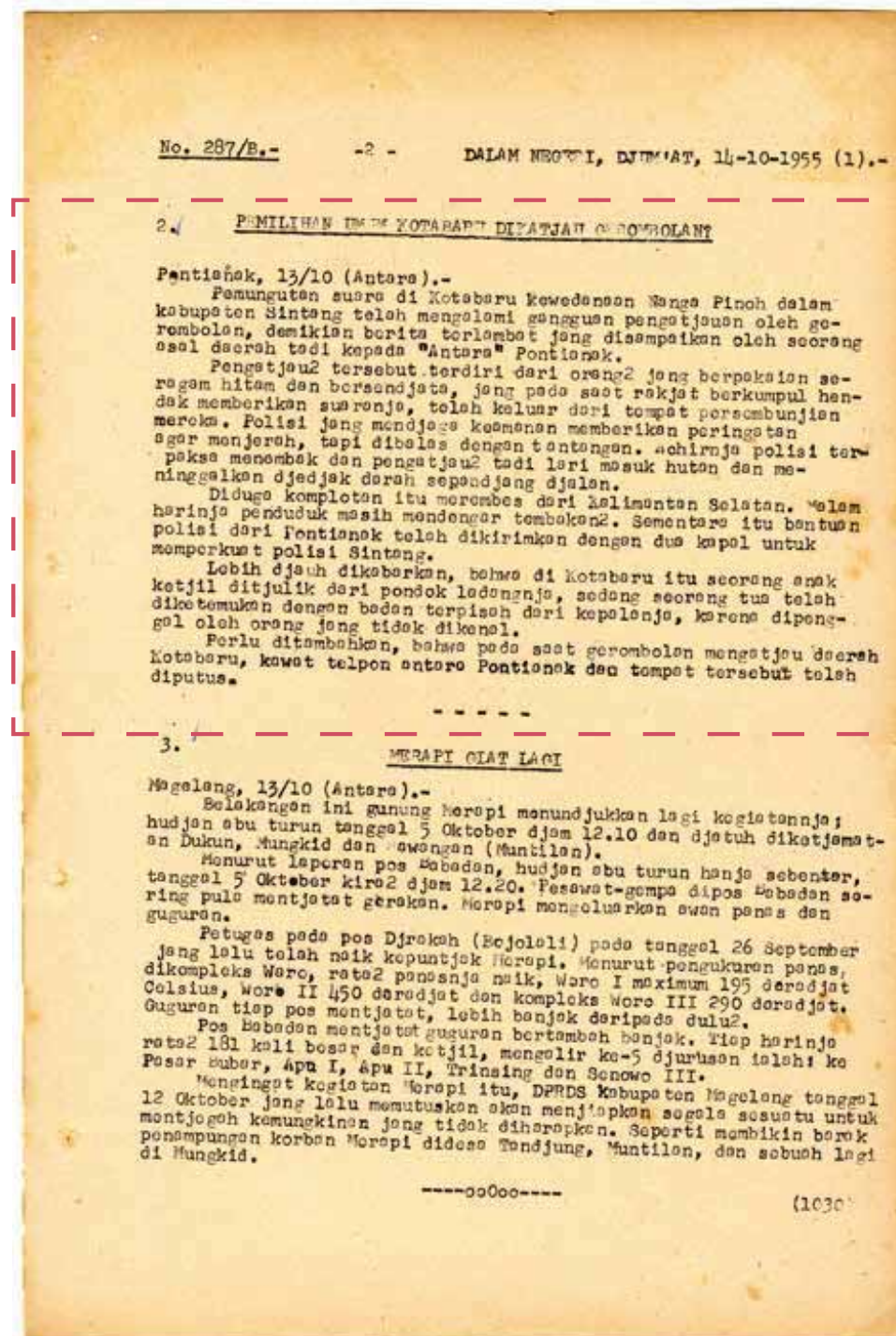
Hasil2 dikabupaten Tasikmalaja.

Meskipun termasuk daerah ja merupakan "trouble spot" karena gangguan2 keamanan dan sehir2 ini menarik perhatian pemerintah, di kabupaten Tasikmalaja dapat dilakukan pemilihan umum, dan angka2 ja hari ini didapat oleh "Antara" mengenai hasil di 13 PPS adalah sbb: Jang leading Masjumi dengan 51.434, komisioner NU dengan 51.318, ke-4 PKI dengan 38.645 dan ke-5 PKI dengan 23.452. (Laporan selandjutnja menyusul).

21.45

Gangguan keamanan juga terjadi di Kawedanan Nanga Pinoh, Kabupaten Sintang. Pada saat masyarakat akan menyalurkan hak pilihnya, tiba-tiba gerombolan pengacau keamanan muncul dan menakut-nakuti warga. Pihak kepolisian kemudian mengeluarkan tembakan peringatan guna mengusir gerombolan pengacau keamanan. Selain itu, di Kotabaru juga terjadi pembunuhan terhadap seorang warga dan penculikan anak di ladang yang dilakukan oleh gerombolan pengacau keamanan. Jaringan kabel telepon yang menghubungkan kota Pontianak dan daerah tersebut juga diputus oleh gerombolan pengacau keamanan.

Pemilu di Kotabaru diganggu oleh gerombolan pengacau keamanan
 Sumber: ANRI, Berita Antara 14 Oktober 1955



(4) HASIL OPERASI MOBIL DI KALIMANTAN SELATAN

Bandjermasin, 13/10 (Antara).-

Dalam gerakan operasi terhadap serang gerombolan di Sungai Pampang, Kabupaten Bandjar, pihak Kobri telah berhasil menawan 6 orang gerombolan, diantaranya terdapat seorang wanita, menjilat 4 putjuk senjata api, sadjumlah pekilon dan bahan2 makanan.

Dipihak Kobri dan Barisan Kemanan Kampung tidak ada yang mandjadi korban, ketjuali luka2 ringan.

Dari Kota Baru "Antara" menerima kabar, bahwa dalam gerakan operasi disekitar Seronga, Botulitjin dan lain2nja, pihak polisi telah dapat mengtjau serang gerombolan sehingga gerombolan terpaksa lari kedalam hutan. Dalam baberapa kali pertempuran yang terdjadi didaerah Kota Baru itu, dipihak gerombolan se-kurangnya 6 yang tewas, tapi senjata2 sempat dibawa2nja lari.

- - - - -

(5) PELANGGARAN DALAM PEMUNGUTAN SUARA

Magelang, 14/10 (Antara).-

Didapat kabar, bahwa kini oleh pihak kepolisian kota Magelang sedang dilakukan pemeriksaan atas diri seorang Hadji bernama M. tinggal dikampung Blanggatan Redjowinangun, kota Magelang. Sebab2 dilakukannya pemeriksaan itu ialah karena ketika mandjalang pemungutan suara untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 29 September yang lalu M. dikatakan telah membeli-besikan kupon yang dapat ditukarkan dengan "jaminan" asal yang mendapat kupon itu dalam pemungutan suara memilih salah satu partai politik yang dianut M. tersebut. Apa yang dimaksud dengan "jaminan" itu tidak diperoleh keterangan.

Pertbuatan Hadji M. itu dianggap melanggar pasal 120 undang2 No. 7 tahun 1953 (pemilihan umum).

Sepanjang keterangan2 selanjutnja yang diperoleh "Antara", telah didengar pula keterangan2 3 orang saksi yang masing2 telah menerima kupon itu dan seorang lagi yang menyetensil 220 kupon tersebut diatas.

- - - - -

(6) DISERTAI KEGIATAN MERAPI

Magelang, 14/10 (Antara).-

Keterangan yang didapat "Antara" mengenai kegiatan gunung Merapi pada waktu akhir2 ini menjatakan, bahwa pesawat gempu "Wrochort" jg todinja dipasung dipos penjagaan Djokoh (Djofelali) kini telah dipindahkan dipos bebadan yang tingginja 1.273 M. diatas lereng gunung Merapi sebelah barat. Pemindahan tersebut dilakukan untuk mengganti pesawat gempu dipos bebadan yang sudah kurang baik djalannya.

Lebih lanjut dapat ditambahkan, bahwa tinggi gunung Merapi tahun yang lalu 2911 M, sekarang sudah bertambah mandjadi 3.770 M.

(11.45)

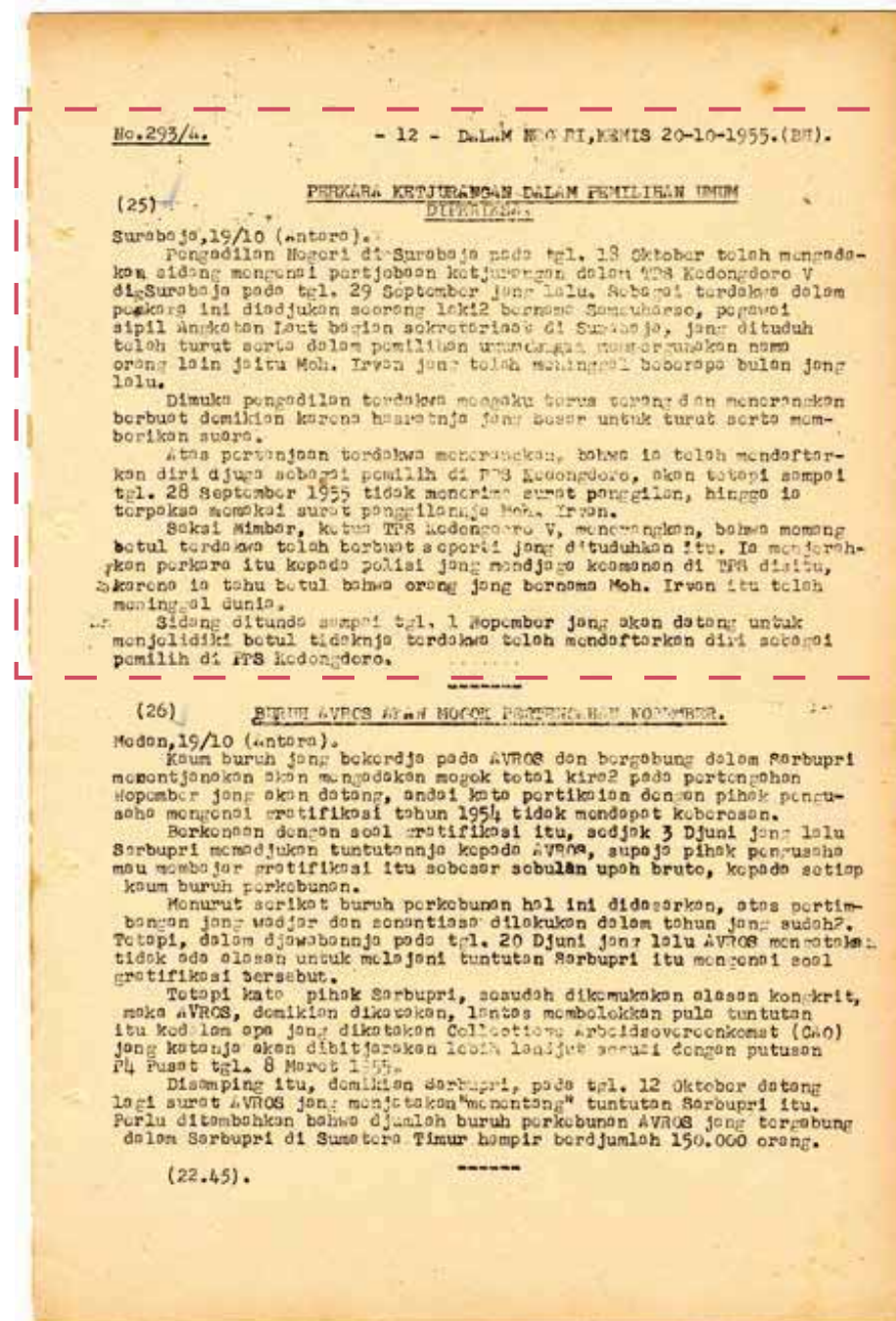
-----ooOoo-----

Pelanggaran aturan pemilu terjadi di beberapa daerah, antara lain pembagian tanda gambar PKI dan surat yang dipesankan "kepada rakyat" pada calon pemilih di TPS kampung baru Gapuramuka, Cilincing, Jakarta Utara oleh dua orang kader PKI bernama Sartili dan Dalin. Selain itu, di daerah Malangaten, Rejowinangun, Magelang juga ditemukan pelanggaran oleh Haji M yang membagikan kupon yang bisa ditukarkan dengan "jaminan" kepada warga. Warga yang menerima kupon diharuskan memilih partai politik yang didukung oleh Haji M. Akibat dari tindakan tersebut, Haji M diperiksa oleh kepolisian Magelang.

◀ Pelanggaran dalam Pemilu 1955 yang terjadi di Magelang oleh Haji M
Sumber: ANRI, Berita Antara 14 Oktober 1955

Di Surabaya juga terjadi pelanggaran penggunaan hak pemilih oleh orang yang tidak berhak. Seorang pegawai negeri sipil ALRI atas nama Samsuharso menggunakan surat pemberitahuan pencoblosan atas nama Moch. Irvan yang telah meninggal di TPS Kedungdoro V. Tindakan tersebut diketahui oleh PPPS setempat dan melaporkan Samsuharso kepada pihak keamanan. Dalam persidangan Samsuharso mengaku tindakan tersebut ia lakukan semata-mata karena hasratnya yang besar untuk berpartisipasi dalam Pemilu 1955. Sebenarnya ia telah mendaftarkan diri di PPPS Kedungdoro, namun hingga tanggal 28 September ia belum memperoleh surat pemanggilan pencoblosan.

Kecurangan dalam Pemilu 1955 yang dilakukan oleh Samsuharso disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya
 Sumber: ANRI, Berita Antara 20 Oktober 1955



19. M. U. GLENMORE DESAK PEMUNGUTAN SUARA TELAHON DI KALIBARUMANIS.

Akibat tindakan yang kurang benar dalam pemungutan suara.

Surebaja, 20/10 (Antara).

"Antara" Surebaja memperoleh keterangan, bahwa baru ini kepada PPI dan PPD Djawa Timur, M. U. Glenmore (Kab. Banjuwangi) telah menjam-paikan surat protes, yang kemudian minta supaya pihak Panitia Pemilihan mengadakan pemungutan suara ulangan di 2 buah TPS, yaitu TPS V dan VI desa Kaliberumanis Kecamatan Glenmore Kabupaten Banjuwangi, yang menurut M. U. Glenmore karena di TPS2 tersebut telah terjadi peristiwa "ketidak-dijudjuran" dari sementara pejabat P3S.

Akibat tindakan yang tidak dijudjuri itu, demikian keterangan yang diperoleh selanjutnya, maka tidak kurang dari 1.400 suara yang semestinya dapat diisahkan, tidak diisahkan pada waktu penhitungan suara di TPS2 tadi.

Lebih djauh ditorengkan, bahwa disamping menuntut pemungutan suara ulangan itu, M. U. Glenmore telah mendesak supaya seluruh surat2 suara dari TPS2 tadi oleh pihak atas diperiksa kembali.

Sampai sekarang djauh belum diisap t kepastian apakah PP Djawa Timur akan memantahkan pengulangan pemungutan suara di TPS2 tadi. Tentang "ketidak-dijudjuran" di TPS2 Kaliberumanis tadi, dapat ditorengkan antara lain sbbs:

Sebelum pemilih menggunakan haknya, semua surat2 suara diteliti baik2 oleh pemilih2nya. Terajata disebarkan besar surat2 suara itu terdapat lobang2 yang somer2, kemudian diminta ganti, tetapi panitia TPS menganggap tidak perlu karena lobang2nya hanya somer2, dan surat itu dikatakan dapat diisahkan. Akhirnya terajata bahwa dalam penhitungan suara, semua surat2 suara yang berlobang tidak diisahkan oleh Panitia Penjelojngoro. Demikian keterangan tersebut.

20. KONTROLIR KANTOR TELEPON DIBONGKAR.

Surebaja, 20/10 (Antara).

ditunjuk. terdapat. suara.

Kantor Besar Polisi Surebaja pada ini atas pertentangan membenarkan adanya penahanan atas diri seorang kontrolir kantor telepon di Surebaja karena dituduh telah makan suap dari para pemegang pasawat telepon baru, yaitu untuk tiap2 pemasangan pasawat dimintai uang sebanjak Rp.12.000,-

Terhadap permintaan uang sebanjak itu, kabarnya, banjak djuga orang yang menurutnya, yaitu karena benak membutuhkan telepon.

Penangkapan atas kontrolir itu dilakukan didalam satu rumah makan dikota ini, yaitu ketika ia hendak menerima uang sogok dari seorang pembantu2nya yang diperoleh dari salah seorang pemegang telepon sedjumlah Rp.3000,- sebagai kukurangan dari uang yang dimintanya yaitu Rp.11.000,-

Sampai sekarang kontrolir tersebut masih dalam tahanan untuk diisut lebih lanjut, sedang penangkapan itu adalah berdasarkan bukti2 tjukup yang telah ada ditangan yang berwajib.

Terbongkarnya rahasia ini, menurut keterangan, adalah dari seorang peminta telepon yang meskipun sudah mempunyai sjeret2 tjukup untuk pemasangan telepon tetapi oleh kontrolir tersebut pemangannya selalu dipersulak. Dengan pengalaman yang diijusapi oleh orang inilah, maka rahasia ini terbongkar.

Kontrolir tersebut adalah seorang yang sudah mempunyai masa keraja 30 tahun.

(22.40)

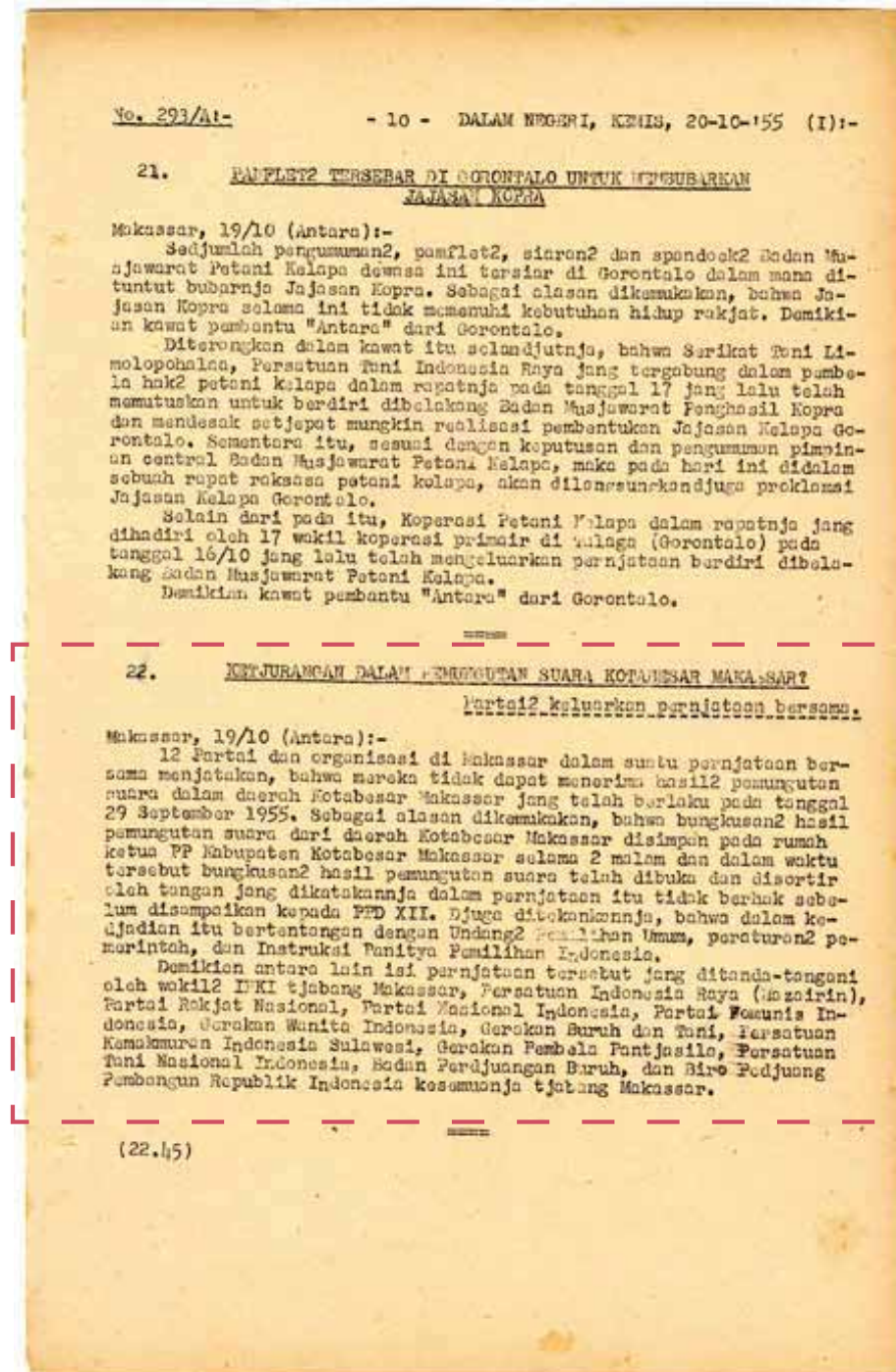
Pelanggaran terhadap peraturan pemilu tidak saja dilakukan oleh kader partai atau masyarakat umum, namun anggota PPPS juga dapat melakukan pelanggaran. Hal itu terjadi di TPS V dan VI desa Kalibaru Manis, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Pada saat pemilihan anggota DPR, warga yang akan mencoblos telah melihat adanya lubang samar-samar di surat suara. Hal itu kemudian disampaikan kepada PPPS dan minta diganti, namun oleh PPPS dinyatakan lubang tersebut samar dan surat suara tidak perlu diganti. Tetapi ketika dilakukan penghitungan, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. Hal itu menyebabkan sekitar 1.400 surat suara tidak dihitung. NU sebagai partai mayoritas di wilayah itu merasa dirugikan. Oleh karena itu, NU Cabang Glenmore melayangkan protes dan meminta agar pemilihan anggota DPR di TPS V dan VI desa Kalibaru Manis diulang kembali.

◀ NU Glenmore mendesak diadakannya pemungutan suara ulangan di Kalibarumanis

Sumber: ANRI, Berita Antara 21 Oktober 1955

Pelanggaran terhadap aturan pemilu juga terjadi di kota Makassar. Setelah proses penghitungan suara untuk kota Makassar selesai, bungkusan surat suara tidak langsung diserahkan ke Panitia Pemungutan Daerah (PPD) XII. Namun bungkusan surat suara tersebut diinapkan di rumah Ketua PPS kota besar Makassar selama dua hari. Selama berada di tempat tersebut bungkusan surat suara dibuka dan disortir oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Sebagai respon atas kejadian tersebut, 12 partai dan organisasi massa di kota Makassar menyatakan menolak hasil pemungutan suara di kota Makassar. Partai dan organisasi massa yang menyatakan penolakan sebagai berikut: IPKI, PIR Hazairin, PRN, PNI, PKI, Gerwani, Gerakan Buruh dan Tani, Persatuan Kemakmuran Indonesia Sulawesi, Gerakan Pembela Pancasila, Persatuan Tani Nasional Indonesia, Badan Perjuangan Buruh, dan Biro Pejuang Pembangun Republik Indonesia.

Berita kecurangan dalam pemungutan suara kota besar Makassar
 Sumber: ANRI, Berita Antara 20 Oktober 1955



BAB IV Hasil Pemilu 1955

A. Perolehan Suara untuk DPR dan Konstituante

1. Perolehan Suara untuk DPR

Memasuki minggu kedua bulan Oktober 1955, hasil perolehan suara pemilihan anggota DPR di beberapa daerah telah diketahui oleh masyarakat. Bahkan pengurus NU Jawa Timur telah mengeluarkan daftar perolehan suara dari empat partai besar di semua kota/kabupaten di wilayah tersebut. Untuk wilayah Jawa Timur partai yang berhasil masuk empat besar adalah NU, Masyumi, PNI, dan PKI.

Hasil Pemilu 1955 versi NU di beberapa daerah di Jawa Timur, 12 Oktober 1955
Sumber: ANRI, *Nahdlatul Ulama tahun 1948-1979* No. 2309

Rakjat Djawa Timur
mempertjaji N. U.
dgn. hasil suara sbb:

N. U. 3.353.779
Masjumi 1.060.872
P. N. I. 2.182.465
P. K. I. 2.211.760

Hasil pemungutan suara
Seluruh Djawa Timur
menurut perantian dibawah:

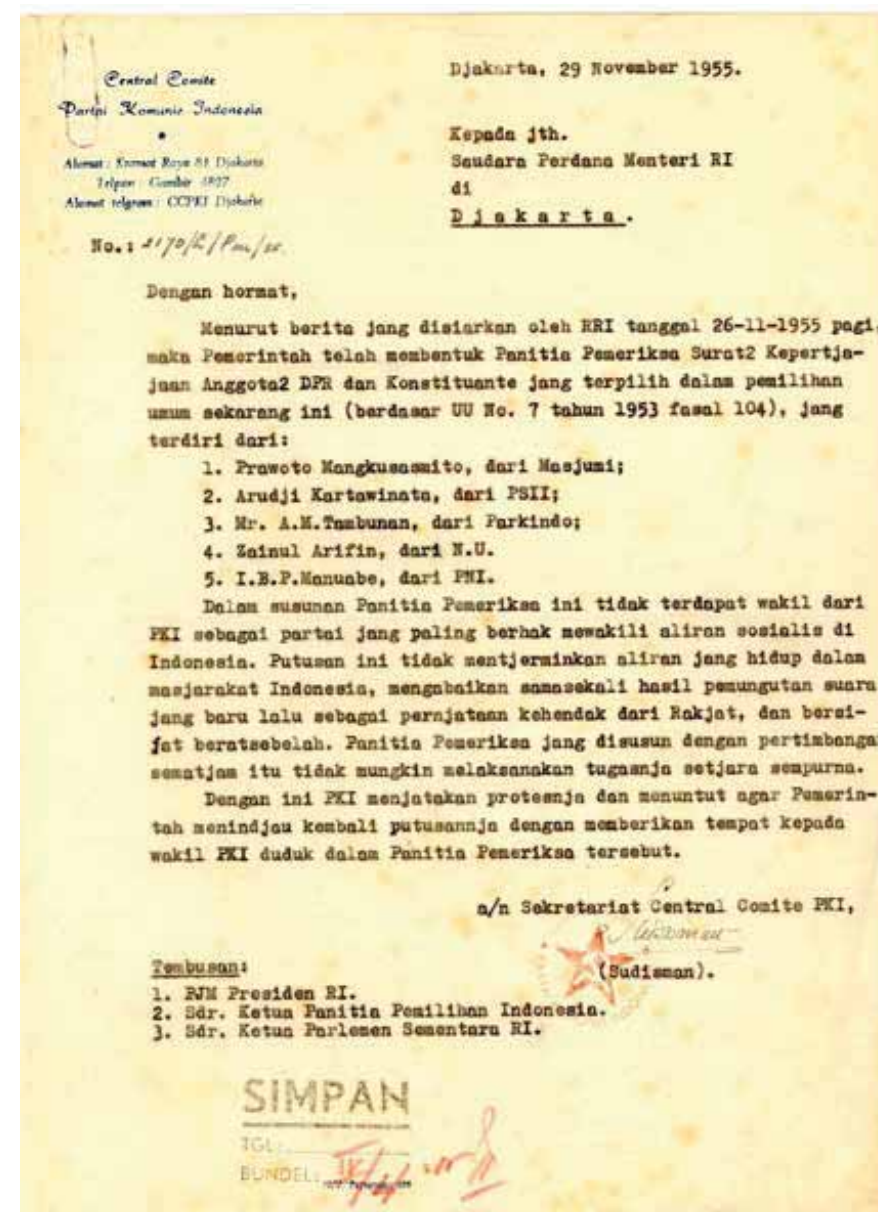
No.	Nama Daerah	N. U.	Masjumi	P. N. I.	P. K. I.
1.	Kt. Bs. Surabaya	50498	16555	41177	125126
2.	Kabpt. Surabaya	127150	40502	28255	71916
3.	" Sidoarjo	100760	24862	45091	54954
4.	" Mojokerto	70251	23951	73525	49894
5.	" Djombang	128261	16468	93732	45402
6.	" Bojonegara	61495	19584	51921	112717
7.	" Tuban	78156	25395	64021	92505
8.	" Lamongan	72660	15798	48284	84404
9.	Kt. Bs. Madiun	1254	1868	8620	18954
10.	Kabpt. Madiun	42248	19559	35945	99824
11.	" Ngawi	24255	55457	67607	114980
12.	" Magetan	21108	21815	38677	64212
13.	" Ponorogo	41962	54509	72729	111417
14.	" Patjitan	325	51504	39792	72810
15.	Kt. Bs. Kediri	11252	4525	14023	22154
16.	Kabpt. Kediri	80795	59591	89511	150561
17.	" Ngandjuk	65580	15978	15257	68080
18.	" Blitar	102085	8571	65560	176805
19.	" Tulungagung	91022	25157	91721	66552
20.	" Trenggalek	52250	52265	66080	25581
21.	Kt. Bs. Malang	52805	9101	25127	42582
22.	Kabpt. Malang	221222	15285	184957	164952
23.	" Pasuruan	222895	16522	80166	51220
24.	" Probolinggo	182055	12752	85228	20222
25.	" Lumadjang	84505	15151	19227	43520
26.	" Bondowoso	110556	32077	71021	7702
27.	" Panarukan	196515	7055	66580	15267
28.	" Djember	508995	8622	16528	80088
29.	" Banjuwangi	160890	51277	80750	150722
30.	" Pamekasan	161555	15208	6658	725
31.	" Sampang	158664	16275	7257	220
32.	" Sumenep	108021	72118	28522	1272
33.	" Bangkalan	161550	50280	42280	1081
D J U M I A H		3353779	1060872	2182465	2211760

Dalam pemungutan suara untuk Konstituante Insya Allah suara N.U. akan djauh lebih banyak.

Surabaya, 12 Oktober 1955
Lepuru Daerah Pemilihan
Djawa Timur

Pemerintah melalui siaran RRI pada tanggal 26 November 1955 pagi mengumumkan pembentukan Panitia Pemeriksa Surat-surat Kepercayaan Anggota-anggota DPR dan Konstituante. Namun dari lima nama yang diumumkan tidak satu pun yang berasal dari PKI. Padahal berdasarkan hasil penghitungan suara sementara, PKI menjadi salah satu partai yang memperoleh suara terbanyak. Oleh karena itu, Central Comite PKI melayangkan protes kepada pemerintah agar keputusan tersebut ditinjau kembali dan wakil PKI diberi tempat dalam panitia tersebut. Setelah menerima surat protes dari Central Comite PKI, pemerintah kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 317 tanggal 21 Desember 1955 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa. Dalam Keputusan Presiden tersebut anggota panitia ditambah menjadi dua orang, yaitu Ir. Sakirman (PKI) dan Siauw Giok Tjhan (Baperki).

Pada tanggal 30 Desember 1955, telah diadakan rapat pembagian kursi tingkat pertama di PP Sumatera Utara. Dalam kesempatan itu Ketua PP Sumatera Utara Mr. Mahadi menyampaikan terima kasih terhadap semua pihak yang membantu pelaksanaan Pemilu 1955 di Sumatera Utara. Selanjutnya rapat pembagian kursi tingkat pertama dilaksanakan secara terbuka dan bisa disaksikan oleh masyarakat umum. Berdasarkan perolehan suara di Sumatera Utara terdapat empat partai besar, yaitu Masyumi, PNI, Parkindo, dan PKI.



- ▲ Surat dari CC PKI kepada Perdana Menteri RI tanggal 29 November 1955 tentang protes dan tuntutan PKI kepada pemerintah untuk meninjau kembali pembentukan Panitia Pemeriksa Surat-surat Kepercayaan Anggota-anggota DPR dan Konstituante yang terpilih dalam pemilihan umum.
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden 1950-1959 No. 933

Pembukaan Pidato Rapat pembagian kursi-kursi pertama
D.P.R. pada tanggal 30 Desember 1955 di Medan
oleh Ketua P.P.S.U. (Mr. Mahadi).

-
- Saudara2 pembesar sipil dan militer.
 - Saudara2 para wakil2 partai2 politik dan organisasi2 lain.
 - Saudara2 para undangan.
 - Saudara2 para hadirin.
 - Madjalis yang berbahagia.

Pemilihan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang telah sekian lama diantun2-kan oleh seluruh masyarakat, telah lama terletak dibelakang kita. Hari pemilihan itu telah menjadi sedjarah. Sebelum pemilihan itu tempo hari dilakukan, lama sebelum itu seluruh masyarakat sudah sibuk mengadakan peralihan2, masing2 menurut saluran tugas dan kemahjubannya, baik yang resmi, maupun yang tidak. Segala urusan peralihan itu, dimulai dengan pendaftaran pemilih, pendaftaran, pemeriksaan pendaftaran sampai kepada pemberian suara, hanya mungkin terlaksana tempo hari dengan bantuan segala instansi pemerintahan, terlalu banyak ragam, djamis dan namanya untuk disebut satu peratur; bantuan partai2 politik dan organisasi2 lain, yang tarut didalam pemilihan umum, pulehna banjaknja, tak dapat disebut satu peratur; bantuan dunia surat kabar, semuanya menuju lurkan tangan memandatkan kesediaan bekerja sama, tak ada ketjullianja; kemahjubanja bantuan dari masyarakat umum, yang sangat dihargakan sekali. Pendek kata, tak ada yang ketinggalan didalam berusaha, supaya pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tempo hari berdjalan dengan sebaik2nja. Setelah selesai pemilihan, bahkan2 dan surat2 yang perlu telah diantarkan kepada Panitia Pemilihan Sumatera Utara. Para pekerdjaja ini dapat dilakukannya dengan tidak khawatirnya sesuatu apa, berkat bantuan2 dari keluarga yang saja sekutkan ditama kami. Harapanja, tepat sekali, djika pada hari ini, dikala saat ini, atas nama Panitia Pemilihan Sumatera Utara, saja mengutipkan ujukur alhamdulillah dan terima kasih yang tidak berhingga kepada segala badan2 penjalangnara pemilihan diseluruh Sumatera Utara, kepada segala petugas alat2 negara dan partikulir dan kopda segala lapisan dan kalangan serta pihak, yang telah memberi bantuan maringnakan pekerdjaja kita bersama, yang mahaberoet itu. Pese, yang berikutnja ialah pemeriksaannya surat2 suara oleh Panitia Pemilihan Sumatera Utara. Berhubung dengan tugas ini, kami tidak dapat meluputkan diri dari pada keinginan menjatakan terima kasih kepada saudara Gubernur Sumatera Utara beserta stafnja, dan kepada Djawatan2 lainnja yang telah sudi membantu Panitia dengan berpala2 tenaga pekerdja dan alat2 serta gedung2, tempat bekerdja dan gadang2. Selanjutnja seluruh pegawai Panitia Pemilihan Sumatera Utara patut mendapat puadjina dalam usaha mereka menjaleankan tugas masing2. Dalam pada itu, Djawatan Kependidikan tidak ketinggalan dalam memberikan bantuan untuk mendjaga kantor Panitia dan tempat2 penjajapannya surat2 suara. Terima kasih Panitia tidak dapat kami djelmakan kodolan wususan katakata, yang serba kurang itu. Madjalis yang mulia, Pasal 84 Undang-Undang Pemilihan Umum menghjibkan kepada Panitia supaya pembagian kursi2 pertama dilakukan dalam suatu rapat yang terbuka untuk umum, dimana pekerdjaja harus dilakukan sebaiknisa rupa, sehingga dapat diikuti oleh hadirin. Kesempitan tempat dan keadaan ruang tidak mengizinkan kami memaruti kesedek, supaya semua orang, yang berminat dapat hadir dalam tempat ini. Hal kenyataan ini memaksa kami meminta maaf kepada siapa sahaja, yang tidak dapat mengikuti pembagian kursi2 pertama ini dari sekat didalam ruang ini. Pasal 84 tersebut memberi kebebasan kepada hadirin boleh mengemukakan keberata2 kepada Panitia tentang pembagian kursi2 pertama ini. Dalam pada itu, kami akan menunjukkan peringatn Undang-Undang Pemilihan Umum dalam pasal 84 itu djuga, apabila kami tidak mengizinkan, bahwa rapat ini terbuka untuk umum dengan ejaerat selama dan sekedar ketertiban dan pekerdjaja2 tidak terganggu oleh kerawanya. Kami yakin, bahwa ketertiban dan pekerdjaja dalam rapat ini tidak akan terganggu, untuk nama terlebih dahulu kami mengutipkan terima kasih.

Madjalis....

Pembukaan pidato rapat pembagian kursi-kursi pertama DPR pada tanggal 30 Desember 1955 di Medan oleh Ketua PPSU Mr. Mahadi
Sumber: ANRI, Sekretariat Negara KPM No. 1131

MESEL VI / 3.

DJURAH SUARA JANG SAH JANG DIDAPAT DAFTAR2

DAJAH DAERAH PEMILIHAN :

SUMATERA UTARA

RAJIL RAJAT TANGGAL: 30 DESEMBER 1955.

No.	Nama daftar	Djumlah Suara yang sah yang diperoleh		Djumlah suara yang disalurkan dan-rak pemilihan.	
		jumlah suara	jumlah suara		
1.	Mahadi	61	1783.618	4.545	188.163
2.	Partai (Perantaraan Ihejuro- kat Atjoh)	59	3.556	7	3.563
3.	Perantaraan Pegawai Polisi Nep.Ind.	2	14.242	59	14.301
4.	Partai Rakyat Nasional (P.R.N.)	5	8.277	87	8.224
5.	Partai Sosialis Indonesia	6	17.700	570	18.278
6.	Kario Sorogor dkt.	7	882	38	920
7.	Gorban Pemuda Pantjailo	12	7.579	202	7.721
8.	Sulnat Siregar dkt.	28	1.744	67	1.791
9.	P.M.I.	23	397.142	22.071	329.214
10.	Sutan Oloan Hatinglung	25	1.091	44	1.135
11.	Sholih Siregar dkt.	25	216	15	231
12.	P.K.I.	9	297.868	815	298.681
13.	Superti.	10	4.685	19	4.704
14.	Partai S.K.I.	12	5.731	647	6.378
15.	Partai Formi (Perantaraan Rakyat Ihejuro Indonesia)	33	7.500	132	7.634
16.	Angkatan Baru Indonesia	15	1.423	26	1.449
17.	Partindo	17	285.636	5.564	291.200
18.	Londrato Taberoe Tumbang	43	1.383	1.281	2.664
19.	Perantaraan Indonesia Raya ... (P.I.R.)	19	3.771	208	3.979
20.	Abray Sumatera Timur	46	4.675	82	4.757
21.	Partai Aceh	22	1.417	-	1.417
22.	Partai Mahdlatul Ulama (M.U.)	23	87.292	392	87.614
23.	Harba Pemuda Proklamasi	24	5.665	152	5.817
24.	Perantaraan Aguna Hillin Batak Indonesia (P.H.B.)	28	7.618	31	7.649
25.	Partai Republik	30	1.368	36	1.204
26.	Lituan Pendukung Kemerde- kaan Indonesia	31	9.343	390	9.741
27.	Partai Sortint Islam Indone- sian (P.S.I.I.)	32	26.103	235	26.338
28.	Partai Baruk	33	20.607	29	20.636
29.	Partai Islam Part	34	77.633	139	77.772
30.	Partai Wanita Rakyat	38	3.320	15	3.335
31.	Tunggalan Perdih Batak Bintang.	39	3.521	87	3.608
32.	Partai Katolik	40	28.622	272	28.894
33.	Zoga-Pandoda, Arn Are	42	1.334	100	1.434
34.	Partai Politik Tharikat Islam (P.P.T.I.)	44	29.001	96	29.097
35.	Partai Politik Formi.	45	1.446	22	1.468
36.	Haris Kristen Indonesia (H.K.I.)	47	6.550	99	6.649
37.	Kepulauan Rnt. At Sjolanta	48	1.670	10	1.680
38.	Perantaraan Indonesia Raya (P.I.R.)	57	23.524	3.927	27.441
39.	Gerdjo Pantobata	60	12.128	91	12.219

40. Keseluruhan

Jumlah suara yang sah di daerah pemilihan Sumatera Utara, hasil rapat tanggal 30 Desember 1955
Sumber: ANRI, Sekretariat Negara KPM No. 1131



Perolehan suara Pemilu 1955 untuk anggota DPR diumumkan secara resmi oleh PPI pada rapat terbuka tanggal 1 Maret 1956 di gedung olah raga Jakarta. Pada kesempatan itu Ketua PPI S. Hadikusumo melaporkan mengenai pelaksanaan dan hasil perolehan suara Pemilu 1955 kepada peserta rapat yang terdiri dari anggota PPI, pimpinan partai politik, dan wakil pemerintah.

Ketua PPI S. Hadikusumo sedang mengumumkan secara resmi hasil pemilihan anggota DPR, Jakarta, 1 Maret 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560301 FG 3





Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Perdana Menteri ▲
Burhanudin Harahap mendengarkan pengumuman hasil
pemilihan anggota DPR yang diumumkan oleh Ketua
PPI S. Hadikusumo, Jakarta 1 Maret 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560301 FG 15



Selanjutnya para anggota PPI membacakan secara bergantian hasil perolehan kursi DPR dimulai dari Wakil Ketua PPI Rustam Sutan Palindih yang membacakan daftar jumlah kursi yang didapat pada pembagian kursi-kursi sisa tingkat kesatu. Kemudian G.A. Muis membacakan daftar nama calon yang terpilih dari setiap daerah pemilihan bagi PNI, PKI, dan NU. Daftar nama calon yang terpilih dari setiap daerah pemilihan bagi Partai Masyumi dibacakan oleh Sunarto. Selanjutnya Achmad Ruslan membacakan daftar nama calon yang terpilih dari setiap daerah pemilihan bagi partai-partai lainnya.



▲ Wakil Ketua PPI Rustam Sutan Palindih sedang membacakan daftar jumlah kursi yang didapat pada pembagian kursi-kursi sisa tingkat kesatu, Jakarta 1 Maret 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560301 FG 9



▲ G.A Muis sedang membacakan daftar nama-nama calon yang terpilih dari tiap-tiap daerah pemilihan bagi partai-partai PNI, PKI, dan NU, Jakarta 1 Maret 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560301 FG 6



Sunarto sedang membacakan daftar ▲
nama calon yang terpilih dari tiap-tiap
daerah pemilihan bagi Partai Masyumi,
Jakarta 1 Maret 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560301 FG 7



Achmad Ruslan sedang membacakan ▲
daftar nama calon yang terpilih dari
setiap daerah pemilihan bagi partai-
partai lainnya, Jakarta 1 Maret 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560301 FG 5

Hasil perolehan suara Pemilu 1955 diumumkan secara sederhana dengan menggunakan papan tulis. Pada papan tulis tersebut terdapat 28 kontestan yang berhasil memperoleh kursi di DPR. Nampak pada papan tulis lima partai politik yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, Masyumi, NU, PKI, dan PSII. Pada papan tulis tertulis hasil pemilihan umum DPR tahun 1954, hal itu bukan salah tulis. Memang pemilihan anggota DPR baru dilaksanakan pada tahun 1955.

① DAFTAR HASIL PEMILIHAN UMUM
D.P.R. TAHUN 1954

NO URUT	NAMA DAF- TAR/GAB- UNGAN DAF- TAR.	D/UMLAH SUADA SE LUKUH IN- DONESIA	D/AL KURSI PADA PEM- BAGIAN KURSI PERTA- MA	D/AL SISA SUARA SEL- IND. SETE- LAH PEMBA- GIAN KUR- SI PERTA- MA	D/AL KURSI PADA PEM- BAGIAN KURSI 2 SISA TINGKAT I	D/AL SISA SUA- RA SESU- DAH PEM- BAGIAN KURSI 2 SISA TINGKAT I	KURSI TG DIDA- PAT ATAS DASOR SI- SA SUARA TERBA- NYAK	D/AL SISA SUARA TERA- CHIR	D/AL KURSI JANG- DIDA- PAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	P.N.I.	8434653	49	1018377	7	67126	1	-	57
2	MASYUMI	7903886	49	1040931	7	89680	1	-	57
3	NU.	6955141	37	1046017	7	94766	1	-	45
4	P.K.I.	6176914	34	732184	5	52719	-	-	39
5	P.S.I.I.	1091160	5	443123	3	35444	-	-	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	PARKINDO	1003329	5	390329	2	118543	1	-	8
7	PARTAI KATHOLIK	770740	3	349558	2	77772	-	-	5
8	P.S.I.	753191	2	430338	3	22659	-	-	4
9	PARTAI ISLAM "PERTI"	483014	2	197354	1	61461	1	-	4
10	I.P.K.I.	539824	2	343248	1	107355	1	-	2
11	GERAKAN PEMBELA TANJUNGPINANG (G.P.P.)	219985	1	71697	-	71697	1	-	2
12	PARTAI RAJAT NASIONAL (P.R.N.)	242125	-	242125	1	106232	1	-	2
13	P.P.P.R.I.	200419	-	200419	1	64526	1	-	2
14	PARTAI MURBA	199588	-	199588	1	63695	1	-	2
15	PARTAI BURUH	224167	-	224167	1	88274	1	-	2
16	PARTAI RAJAT INDONESIA (P.R.I.)	206261	-	206261	1	70368	1	-	2
17	P. SOEDJONO PRAWIRO-SOEDARSO	53305	-	53305	-	53305	1	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	P.I.R. (WONGG)	178481	-	178481	1	42588	-	-	1
19	PERAAI	149287	-	149287	1	13994	-	-	1
20	BAPERKI	178887	-	178887	1	42994	-	-	1
21	GRIYANDA	154792	-	154792	1	18899	-	-	1
22	PARTAI REP. LING MERDEKA (P.R.L.M.)	72523	-	72523	-	72523	1	-	1
23	AKUI	81454	-	81454	-	81454	1	-	1
24	ACOMA	64514	-	64514	-	64514	1	-	1
25	PARTAI BILITIK TUARIKATIDJALA (P.B.T.)	85131	-	85131	-	85131	1	-	1
26	PARTAI RAJAT DESA	77919	-	77919	-	77919	1	-	1
27	P.I.R. (HARJANING)	114644	-	114644	-	114644	1	-	1
28	PERSATUAN "DAYA"	146054	1	29389	-	29389	-	-	1
D/UALAH		-	190	-	47	-	20	-	257

Daftar hasil pemilihan anggota DPR ▲
 tahun 1955, Jakarta 1 Maret 1956
 Sumber: ANRI, Kempen 560301 FG 18;
 560301 FG 19; 560301 FG 20



Tabel 1
Perolehan Suara Pemilu 1955 untuk Anggota DPR

No	Kontestan Pemilu	Jumlah Suara Sah	Persentase Suara	Jumlah Kursi DPR
1	PNI	8.434.653	22,3	57
2	Masyumi	7.903.886	20,9	57
3	NU	6.955.141	18,4	45
4	PKI	6.179.914	16,4	39
5	PSII	1.091.160	2,9	8
6	Parkindo	1.003.325	2,6	8
7	Partai Katolik	770.740	2	6
8	PSI	753.191	2	5
9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	541.306	1,4	4
10	Perhimpunan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	483.014	1,3	4
11	Partai Rakyat Nasional (PRN)	242.125	0,6	2
12	Partai Buruh	224.167	0,6	2
13	Gerakan Pembela Pancasila (GPPS)	219.985	0,6	2
14	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	206.261	0,5	2
15	Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (PPPRI)	200.419	0,5	2
16	Murba	199.588	0,5	2



17	Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki)	178.887	0,5	1
18	Partai Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro	178.481	0,5	1
19	Gerinda	154.792	0,4	1
20	Persatuan Marhaen (Permai)	149.287	0,4	1
21	Partai Persatuan Daya	146.054	0,4	1
22	PIR Hazairin	114.644	0,3	1
23	Partai Persatuan Tharikat Islam (PPTI)	85.131	0,2	1
24	AKUI	81.454	0,2	1
25	Partai Rakyat Desa (PRD)	77.919	0,2	1
26	Partai Rakyat Indonesia Merdeka (PRIM)	72.523	0,2	1
27	Angkatan Communis Muda (Acoma)	64.514	0,2	1
28	R. Soedjono Prawirosoedarso dkk	53.305	0,1	1
29	Partai, organisasi massa, perorangan	1.022.433	2,7	-
	Total	37.785.299	100	257



Tampilnya PNI sebagai pemenang dalam Pemilu 1955 disambut gembira oleh para elite dan kader partai tersebut. Setelah penghitungan suara selesai Ketua Umum PNI Sarmidi Mangunsarkoro menyalami Ketua PPI S. Hadikusumo dan tokoh PNI Ali Sastroamidjojo nampak menyalami anggota PPI Sumarto.



▲ Ketua Umum PNI Sarmidi Mangunsarkoro sedang memberikan ucapan selamat kepada Ketua PPI S. Hadikusumo setelah pengumuman selesai, Jakarta 1 Maret 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560301 FG 1



▲ Ali Sastroamidjojo sedang memberikan selamat kepada Sumarto anggota PPI setelah pengumuman resmi selesai, Jakarta 1 Maret 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560301 FG 2

2. Perolehan Suara untuk Konstituante

PPI mengumumkan hasil penghitungan suara untuk Konstituante pada tanggal 14 Juli 1956. Seperti halnya pada hasil penghitungan suara DPR, perolehan suara untuk empat besar tetap diisi oleh PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Namun pada pemilihan anggota Konstituante perolehan suara Masyumi mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 114.267 suara. Sedangkan tiga partai yang lain justru mengalami peningkatan suara. Terdapat 34 kontestan Pemilu 1955 yang memiliki kursi di Konstituante.

Tabel 2
Perolehan Suara Pemilu 1955 untuk Anggota Konstituante

No	Kontestan Pemilu	Jumlah Suara Sah	Persentase Suara	Jumlah Kursi DPR
1	PNI	9.070.218	23,97	119
2	Masyumi	7.789.619	20,59	112
3	NU	6.989.333	18,47	91
4	PKI	6.232.512	16,47	80
5	PSII	1.059.922	2,8	16
6	Parkindo	988.810	2,61	16
7	Partai Katolik	748.591	1,99	10
8	PSI	695.932	1,84	10
9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	544.803	1,44	8
10	Perhimpunan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	465.359	1,23	7
11	Partai Rakyat Nasional (PRN)	220.652	0,58	3
12	Partai Buruh	332.047	0,88	5
13	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	152.892	0,4	2
14	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	134.011	0,35	2

15	Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (PPPRI)	179.346	0,47	3
16	Murba	248.633	0,66	4
17	Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki)	160.456	0,42	2
18	Partai Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro	162.420	0,43	2
19	Gerinda	157.976	0,42	2
20	Persatuan Marhaen (Permai)	164.386	0,43	2
21	Partai Persatuan Daya	169.222	0,45	3
22	PIR Hazairin	101.509	0,27	2
23	Partai Persatuan Tharikat Islam (PPTI)	74.913	0,2	1
24	AKUI	84.682	0,22	1
25	Partai Rakyat Desa (PRD)	39.278	0,1	1
26	Partai Rakyat Indonesia Merdeka (PRIM)	143.907	0,38	2
27	Angkatan Communis Muda (Acoma)	55.844	0,15	1
28	R. Soedjono Prawirosoedarso dkk	38.356	0,1	1
29	Gerakan Pilihan Sunda	35.035	0,09	1
30	Partai Tani Indonesia	30.060	0,08	1
31	Raja Keprabonan	33.660	0,09	1
32	Gerakan Banteng Republik Indonesia (GBRI)	39.874	0,11	1
33	PIR NTB	33.823	0,09	1
34	L.M. Idrus Effendi	31.988	0,08	1
35	Partai, organisasi massa, perorangan	426.586	1,13	-
	Total	37.837.105	100	514

Pada tanggal 31 Oktober 1956 Panitia Pemeriksaan telah mengeluarkan daftar nama anggota Konstituante. Daftar nama anggota Konstituante tersebut kemudian diteruskan kepada Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kehakiman untuk keperluan administrasi dan pelantikan. Namun dalam daftar anggota Konstituante tersebut ada nama-nama yang mengundurkan diri, yaitu Mardjoko (nomor urut 31), Gozali Sjahlan (nomor urut 68), dan Sudjono Prawirosudarmo (nomor urut 128).

Surat Panitia Pemeriksaan kepada pemerintah mengenai daftar anggota Konstituante, 31 Oktober 1956
Sumber: ANRI, Konstituante No. 11

Jang sudah benar

PANITIA PEMERIKSAAN
D/JA SEKERTARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
DJALAN DR. WAHIDIN NO. 1. DJAKARTA
TELEPON O.P.: 1260 S/D 1263.

KONSTITUANTE R.I.
DITERIMA TEL: 5-11-1956
AGENDA No. 287/R-56

DJAKARTA, 31 Oktober 1956.

(2)

No.: 318/P.P. 1956.

LAMPIRAN: 1 daftar (3 ek)
PERHAL: Daftar anggota Konstituante.

Kepada
1. PERUSAHA KEMENTERIAN
2. PERUSAHA KEMENTERIAN
3. PERUSAHA DALAM NEGARA
DI
PANGKALAN.

SR Mendi
dit. 31/10/56

Menjuali Laporan Panitia Pemeriksaan yang terdahulu (yang terakhir yang dikirimkan dengan surat keast tel. 22-10-1956 No. 307/P.P./1956) dan mendahului Laporan tentang Panitia Pemeriksaan mengenai penentuan pemilihan terpilih sebagai anggota Konstituante, maka beresna ini kom beritahukan dengan hormat, bahwa hari ini Panitia Pemeriksaan telah menyelesaikan penentuan pemilihan 118 orang terpilih sebagai anggota Konstituante.

Beresea ini kom sampaikan dengan hormat Daftar terpilih yang sudah diterima sebagai anggota Konstituante, yang a.l. menyat nama, daerah pemilihan, partai/organisasi yang mentalatkan, dan nama menenoi masing terpilih, untuk dipergunakan buat pengalihan anggota Konstituante, dll.

Dalam hubungan ini perlu kom kembakan, bahwa 3 orang terpilih yang telah diterima oleh Panitia Pemeriksaan sebagai anggota Konstituante, sementara itu telah menyatakan, bahwa mereka mengundurkan diri (tidak beresna menerima penetapan terpilih), yaitu:

1. Dr. Hariojoko - nomor urut 31 dalam Daftar.
2. Dr. Gozali Sjahlan - nomor urut 68 dalam Daftar.
3. Dr. Sudjono Prawirosudarmo - nomor urut 128 dalam Daftar.

Maka ketig orang tersebut tidak perlu dipanggil.

Konst-2
SIMPANAN

DIBERIKAN
WALITA PUNIKEMMAN,
ttd.

1. Direktur Kabinet Presiden di Jakarta.
2. Kepala Sekertariat Sementara Konstituante di Bandung untuk dipergunakan seperlunya.

(Prawoto Mangunsumarto)

Diamatir. (LHM DR. AJL)

DAFTAR TERPILIH
JANG OLEH PABITIA PEMERIKSAAN TELAH DITSEMPURKAN
DITERIMA SEBAGAI ANGGOTA KONSTITUANTE

N a m a	Daerah pemilihan 1)	Partai/organisasi	No. Keputusan Pm.Pem.	A l i a n s i	Agama 2)	Keterangan
S.Hedikuswo	Djawa-Tengah	P.N.I.	1/1956/K.	Djl.Situbondo No.7 Djakarta	Islam	1) Partai/organisasi yang men-tjolankan. 2) Agama yang di-sebut dalam Surat Karel (keterangan).
Soewarto	Djawa-Tengah	Parkindo	2/1956/K.	Djl.Hadji Agus Salim 66, Djakarta	Kristen Protestan	
K.H.Fakih Usman	Djawa-Timur	Masjumi	3/1956/K.	Djl.Suhung No.9, Djakarta	Islam	
A.Sjafuddin	Sulawesi-Tenggara Selatan	Pusat Penggerak Pentjalonan L.H. Idroes Effendi	4/1956/K.	Djl.Palem No. 42, Djakarta	Islam	
5. Sjech Hadji Djaleuddin	Suwarno-Tengah	P.P.T.I.	5/1956/K.	Djl.Weranti 10, Djakarta	Islam	2) Agama yang di-sebut dalam Surat Karel (keterangan).
6. K.Hadji Saperi	Djawa-Barat	P.S.I.I.	6/1956/K.	Tjesapika Patih No.0/142 Djk.	Islam	
7. Siauw Giok Tjhan	Djawa-Tengah	Baperki	7/1956/K.	Djl.Tosari No.70, Djakarta	-	
8. Tony Wan	Kaliamantan-Barat	P.N.I.	8/1956/K.	Djl.Wjawa 62 A Djakarta	Katholik	
9. Zainul Arifin	Djawa-Barat	M.U.	9/1956/K.	Djl.Tjikini Raya 48, Djakarta	Islam	
10. I.J.Kusiso	Nusa Tenggara Timur	Katolik	10/1956/K.	Djl.Gresik 33a, Djakarta	Roma Katolik	
11. Ir Soeroto Mangoesoesarto	Djawa-Tengah	P.K.I.	11/1956/K.	Djl.Tjisahi No.10, Djakarta		
12. Andi Gappa	Sul.Tenggara/Selatan	Masjumi	12/1956/K.	Djl.Lesandow No.3, Blok C.Ebj.	Islam	
13. Sudiro	Djakarta-Raya	P.K.I.	13/1956/K.	Tusan Suropati 7, Djakarta		
14. H. Bennon Hardjosamidjojo	Djawa-Tengah	P.N.I.	14/1956/K.	Djl.Tusan Thung No.1, Djakarta	Islam	
15. Soewarti	Djawa-Tengah	P.K.I.	15/1956/K.	Djl.Salumba Eluntas 1/160, Djk.	Islam	
Hutomo	Djawa-Tengah	P.K.I.	16/1956/K.	Kampung Bali Matrasan Pontjol R.T. 31 Djakarta		
Soetarto Hadisoedibjo	Djawa-Timur	Katolik	17/1956/K.	Kebon Sarah Timur 9, Djatinegara	Roma Katholik	
Dr H. Sukirman Wirjosendjojo	Djawa-Tengah	Masjumi	18/1956/K.	Djl.Djawa 113, Djakarta	Islam	
Mr Johannes C.T.Sismorangkir	Sul.Tenggara/Selatan	Parkindo	19/1956/K.	Djl.Surabaya No.37, Djakarta	Kristen Protestan	
Sujono Atso	Djawa-Tengah	P.K.I.	20/1956/K.	Djl.Sempit 11/3 Blok B.IV Koba- Joran Baru Djakarta		
Ar Renda Saroengallo	Sul.Tenggara/Selatan	Parkindo	21/1956/K.	Djl.Minangkabau 30, Djakarta	Kristen Protestan	
G. Winaya	Nusa Tenggara Barat	P.K.I.	22/1956/K.	Djl.Melang 22, Djakarta	Hindu Bali	
Hadji Abdulaziz Kijai Alivafa	Djawa-Timur	Masjumi	23/1956/K.	Tamporedjo, Pos Basipudji	Islam	
H.M. Hadjiun	Djakarta-Raya	M.U.	24/1956/K.	Djl.Pengukiran No.6, Djakarta	Islam	
M. Huzarna Effendi	Djakarta-Raya	I.P.K.I.	25/1956/K.	Djl.Bonang No.10 (Paw) Djakt.	Islam	
Hadji Intje Achmad Saleh	Sul.Tenggara/Selatan	P.N.I.	26/1956/K.	Djl.Lean dukolleng 33, Mena- sar	Islam	
Daeng Tompo	Djawa-Tengah	P.K.I.	27/1956/K.	Pisangan Lera III/180 Rt.II- Rk. 7 Djatinegara.	Islam	

28.

▲ Daftar anggota Konstituante,
 31 Oktober 1956
 Sumber: ANRI, Konstituante No. 11



B. Pelantikan Anggota DPR dan Konstituante

1. Pelantikan Anggota DPR

Upacara pelantikan anggota DPR hasil Pemilu 1955 dilaksanakan di Istana Merdeka pada tanggal 25 Maret 1956. Upacara tersebut dihadiri oleh para anggota DPR, para menteri, serta pejabat tinggi negara yang lain. Nampak Presiden Sukarno dengan didampingi Wakil Presiden Mohammad Hatta sedang membacakan pidato pelantikan di depan anggota DPR.



▲ Suasana upacara pelantikan anggota DPR di Istana Merdeka. Presiden Sukarno tengah mengangkat sumpah anggota DPR, Jakarta 25 Maret 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560324 FG 2-1



Setelah upacara pelantikan, Presiden Sukarno menyalami para anggota DPR. Salah satu tokoh yang terpilih sebagai anggota DPR adalah Sutomo (Bung Tomo) dari PRI seorang pejuang Angkatan 45 di Jawa Timur, selain itu nampak pula tokoh perempuan Ny. Lestari Sutrasno dari PNI.

Satu-satunya tokoh perorangan yang berhasil menduduki jabatan anggota DPR dan Konstituante pada Pemilu 1955 adalah R. Soedjono Prawirosoedarso. Ia merupakan guru spiritual dari Madiun yang memiliki banyak pengikut di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia memimpin aliran kebatinan yang diberi nama Ilmu Sejati. Ketika dilantik menjadi anggota DPR ia telah berusia 81 tahun dan menjadi anggota tertua di lembaga legislatif itu.



▲ Suasana pelantikan anggota DPR di Istana Merdeka. Presiden Sukarno sedang berjabat tangan dengan anggota DPR Nyonya Lestari Sutrasno (PNI), Jakarta 25 Maret 1956
Sumber: ANRI, 560324 FG 1-5



Presiden Sukarno memberi selamat pada ▲
 anggota DPR baru, Soetomo (Bung Tomo),
 Jakarta 25 Maret 1956

Sumber: ANRI, 560324 FG 2-6

Presiden Sukarno sedang berjabat tangan dengan ►
 R. Soedjono Prawirosoedarso (81 tahun) dari
 kontestan perorangan, Jakarta 25 Maret 1956

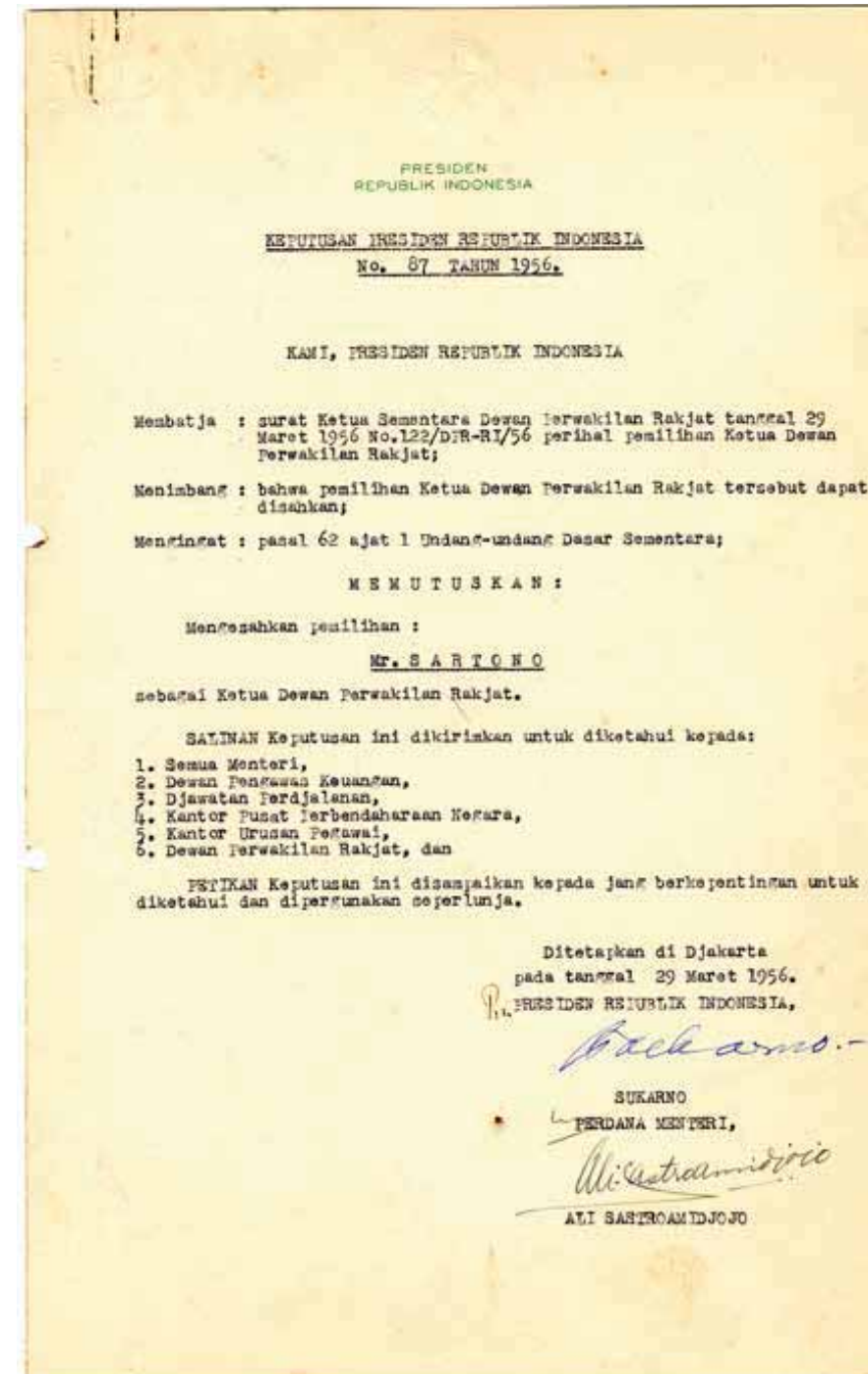
Sumber: ANRI, 560324 FG 7



Pada tanggal 28 Maret 1956, anggota DPR melaksanakan sidang untuk memilih Ketua DPR. Dalam sidang pemilihan itu terdapat dua kandidat, yaitu Mr. Sartono dari PNI dan Prawoto Mangkusasmito dari Masyumi. Dalam pemilihan yang berlangsung ketat tersebut, akhirnya dimenangi oleh Mr. Sartono dengan perolehan suara 134 melawan 83. Prawoto Mangkusasmito (berpeci) kemudian memberikan ucapan selamat kepada Mr. Sartono.

Sehari setelah Mr. Sartono terpilih menjadi Ketua DPR, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1956 tentang pengesahan Mr. Sartono sebagai Ketua DPR. Dengan keluarnya surat keputusan presiden tersebut maka Mr. Sartono dapat melaksanakan tugasnya sebagai Ketua DPR secara penuh.

Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1956 tentang Pengesahan Mr. Sartono sebagai Ketua DPR pada 29 Maret 1956
Sumber: ANRI, Sekretariat Negara RI: seri Produk Hukum 1949-2005 No. 5824



No	NAMA	SUARA
	Prawoto Mangkusasmito	24
	Sartono M.	37

Papan pengumuman suara menunjukkan angka bahwa Mr. Sartono (PNI) mendapatkan suara lebih banyak dari lawannya, Prawoto Mangkusasmito (Masyumi), Jakarta 28 Maret 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560328 FG 5-4

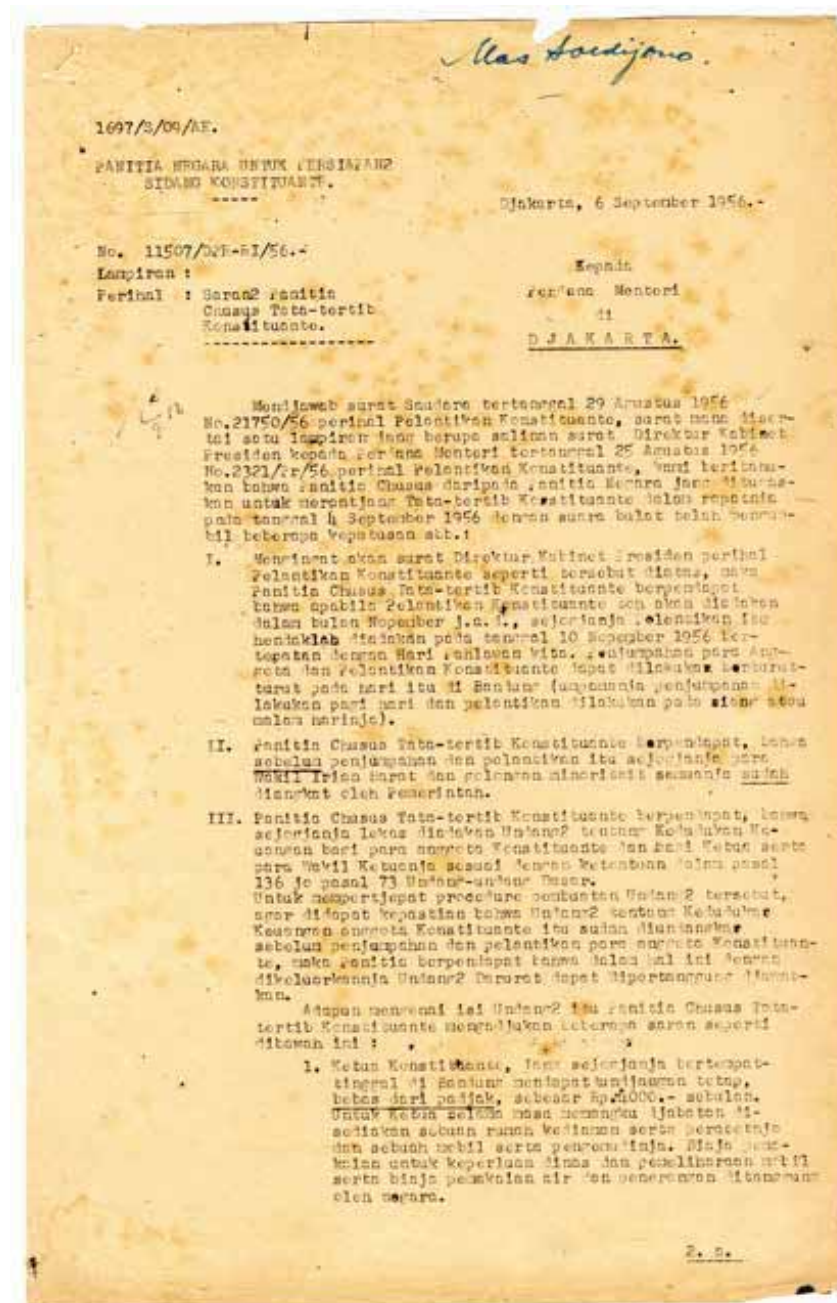


Mr. Sartono menerima ucapan selamat dari Prawoto Mangkusasmito, Jakarta 28 Maret 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560328 FG 5-1

2. Pelantikan Anggota Konstituante

Guna mempersiapkan pelantikan anggota Konstituante, pemerintah membentuk Panitia Negara untuk Persiapan-persiapan Sidang Konstituante yang di dalamnya terdapat Panitia Khusus Tata Tertib Konstituante. Panitia tersebut terdiri dari 12 orang yang dipimpin oleh Mr. A.M. Tambunan (Parkindo), Mr. Soebagio Reksodipoero (PNI), Ir. Sakirman (PKI), Prawoto Mangkusasmito (Masyumi), Mr. Sartono (PNI), Siauw Giok Thjan (Baperki), Zainul Arifin (NU), Arudji Kartawinata (PSII), Zainal Abidin Ahmad (Masyumi), Mr. Hamid Algadrie (PSI), Mr. Muh. Yamin (GPPS), dan H. Siradjuddin Abas (Perti).

Pelantikan anggota Konstituante dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 November 1956 di Bandung. Guna menyukseskan acara tersebut Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengeluarkan instruksi kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Penerangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Perhubungan agar mengeluarkan instruksi dalam bentuk telegram ke instansinya masing-masing agar rencana pelantikan tersebut tersiar luas. Selain itu, RRI juga wajib menyiarkan pengumuman pemerintah tentang upacara pelantikan (penyempahan) anggota Konstituante tersebut dalam siarannya. Sedangkan pihak GIA wajib memprioritaskan pengangkutan bagi anggota Konstituante yang akan menghadiri sidang pelantikan di Bandung.



▲ Saran-saran Panitia Khusus Tata Tertib Upacara Pelantikan Konstituante di Bandung pada 10 November 1956, Jakarta 6 September 1956
Sumber: ANRI, Sekretariat Negara KPM No. 3762

1. Sri. Prawoto Mangrawanito (Masjumi) - Sekretaris
Kerus.
2. " Mr. A. M. Tambunan (Parkindo) Sekretaris
Wk. Kerus
3. " I. B. M. Masaba (K.N.I.)
4. " Zainal Arifin (S.S.)
5. " Aradj Kartowinata (S.S.I.I.)
6. " Sumarto Kusumadikjo (K.Katholik)
7. " Ir. Sukirman (P.K.I.)

Bermaksud dengan apa yang tersebut diatas itu, maka untuk efisiensi urusan sampai ada stopmatis dalam pekerjaan Panitia tersebut Panitia Khusus Tata-tertib Konstituante menjerakan supaya Presiden berkeputusan pasal 106 ayat 2 yang sudah direvisi tanggal hari, kemudian 4 orang lagi untuk duduk dalam Panitia Persiapan Surat2 Persetujuan Konstituante Konstituante, sehingga jumlah Panitia menjadi 11. Mengingat orang-orang yang seangkatan diangkat oleh Presiden itu, maka Panitia Khusus Tata-tertib Konstituante mengusulkan nama2 seperti berikut:

1. Mr. Mah. Yanin - dari Gerakan Pemuda Pancasila
 2. Siang Gik Tjeh - dari Buruh.
 3. Mr. Iskandir Wiradimata - dari P.S.I.
 4. Sekretaris dari P.K.I. yang bertempat tinggal di Djakarta.
- Nama-nama dari I.I.K.I. ini akan kami sampaikan satu-satu hari lagi.

V. Menyangkut akan adanya ketentuan dalam pasal 7 ayat 4 Undang2 Pemilihan Umum, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dapat dilantik oleh Presiden setelah jumlah terpilih yang diterima sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh Panitia Persiapan mencapai angka 200, pada hal untuk pelantikan Konstituante dalam Undang2 Pemilihan Umum tidak dijumpai ketentuan seperti tersebut diatas, maka Panitia Khusus Tata-tertib Konstituante berpendapat bahwa secepatnya Pemerintah selaku badan pembuat undang2 harus menambah Undang2 Pemilihan Umum tersebut dengan satu pasal baru, ialah yang memuat ketentuan, bahwa Konstituante dapat dilantik setelah jumlah terpilih yang diterima oleh Panitia Persiapan sebagai anggota Konstituante, sudah mencapai angka 100.

Pemerintah hendaknya menandatangani Rancangan Undang2 tersebut dalam rees ini kepada Parlemen dengan persetujuan supaya Parlemen memberikan prioritas kepada Rancangan Undang2 itu, jika Parlemen sudah rees masalah silangannya yang ke-III.

Sekianlah saran-saran yang Panitia Khusus Tata-tertib menyangkut perlu untuk disampaikan kepada Pemerintah. Perlu kami beratkan disini, bahwa Panitia Khusus Tata-tertib Konstituante tersebut dibentuk oleh Panitia Persiapan untuk mempersiapkan sidang Konstituante dan terdapat di bawah naungan Panitia Persiapan yang mana terdapat di bawah ini :

- | | | |
|-----------------------------|------------|----------------|
| 1. Mr. A. M. Tambunan | (Parkindo) | - Ketua. |
| 2. Mr. Soetis - Hekselipopo | (K.N.I.) | = Wk. Ketua I |
| 3. Ir. Sukirman | (P.K.I.) | = Wk. Ketua II |
| 4. Prawoto Mangrawanito | (Masjumi) | |
| 5. Mr. Sartono | (P.S.I.) | |
| 6. Siang Gik Tjeh | (Buruh) | |
| 7. Zainal Arifin | (S.S.) | |
| 8. Aradj Kartowinata | (S.S.I.I.) | |
| 9. Zainal Arifin Ahmad | (Masjumi) | |
| 10. Mr. Hamid Al-Gharib | (P.S.I.) | |
| 11. Mr. Mah. Yanin | (G.I.P.) | |
| 12. H. Sireadjudin Abas | (Parti) | |

Selektatante

KABINET PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA
DJAKARTA.-

Ditulis di Djakarta, 31 Oktober 1956
AMAT SIKSMA (S.1738/56)
PRIBADI

No.: 28580/56.-
Lampiran: 1.-

DJAKARTA, 31 OKTOBER 1956.-

Hals: Penunjukan Anggota dan pelantikan Konstituante.-

- Kepada
- Jth. 1. Presiden,
 2. Wakil Presiden,
 3. Para Menteri,
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat,

di
D.J.A.K.A.B.T.I.D.

Bersama ini saya menjunjikan dengan hormat kepada Penguasa Pemerintah tanggal 31 Oktober 1956, mengenai upatjara penunjukan Anggota Konstituante dan upatjara pelantikan Konstituante, yang akan dilakukan oleh P.J.M. Presiden di Bandung tanggal 2 pada tg. 9 dan 10 November 1956, untuk diketahui.

Kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan (Menteri Muda Perhubungan) diminta supaya memberikan instruksi dengan teladan kepada instansi yang bersangkutan di daerah-daerah dibawah kekuasaan Kementerian masing-masing guna melaksanakan Penguasaan Pemerintah tersebut diatas.

Tembusan surat ini dikirimkan kepada:

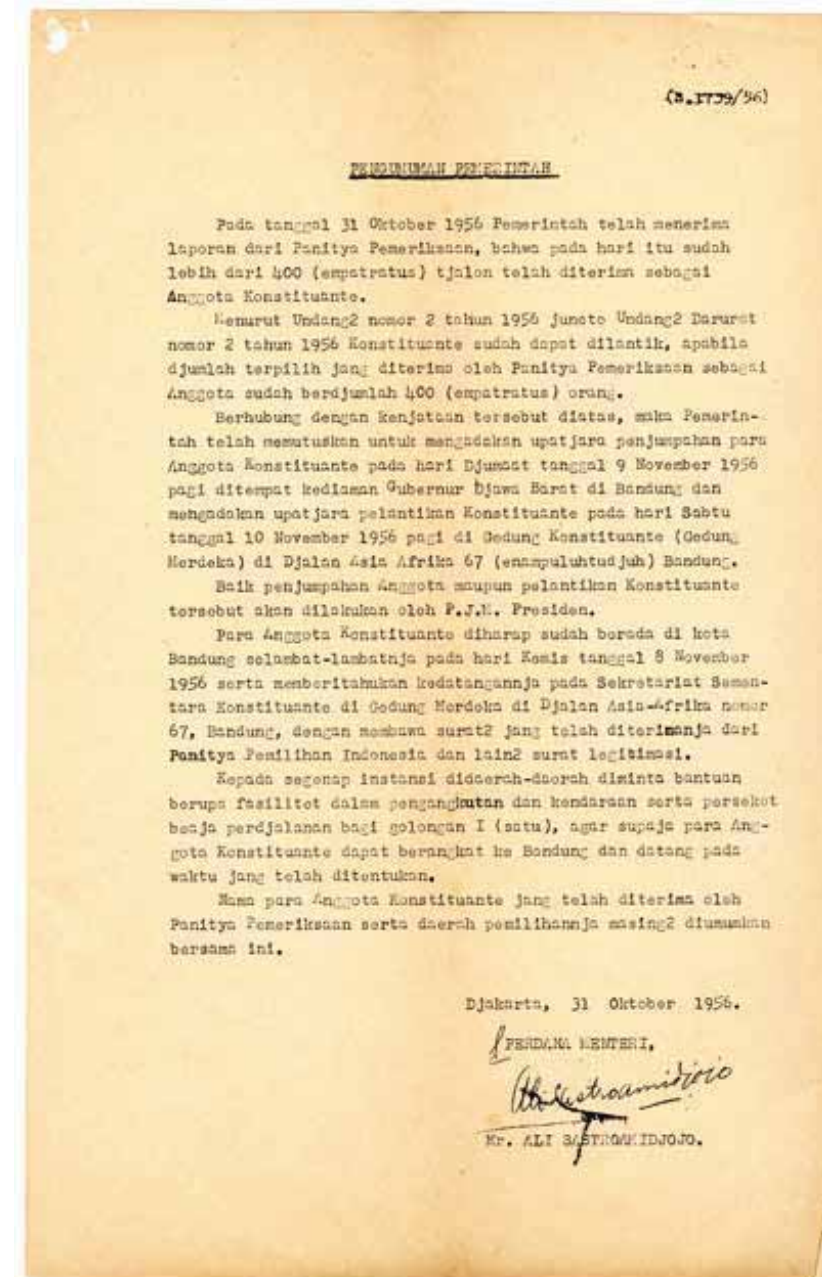
1. Kepala Djawatan Radio Republik Indonesia Pusat di Djakarta,
2. Kepala Radio Republik Indonesia Djakarta (1 + 2 dengan permintaan supaya Penguasaan Pemerintah tersebut diatas mulai berlaku sejak tanggal 5 November 1956 tiap2 hari disiarakan oleh semua pemancar radio Republik Indonesia di Indonesia, mulai dengan Radio Republik Indonesia Djakarta, sesudah siaran "warta berita" pada jam 06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 14.00, 14.45, 19.00 dan 22.00, serta siaran "sari warta berita" dan "siaran Pemrintah" pada jam 20.00,
3. Diraksi G.I.A. dengan permintaan memberikan bantuanannya sepenuhnya untuk pemungkutan para Anggota Konstituante tersebut dengan prioritas pertama dan selanjutnya,
4. Ketua Mahkamah Agung,
5. Djakas Agung,
6. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
7. Direktur Kabinet Presiden,
8. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
9. Sekretaris Dewan Menteri,
10. Para Sekretaris Djendral Kementerian2,
11. Acting Direktur Biro Perantjara Negara,
12. Sekretaris Djendral Dewan Perwakilan Rakyat,
13. K.S.A.D.,
14. K.S.A.L.,
15. K.S.A.U.,
16. Kepala Kepolisian Negara di Djakarta dan
17. Kepala Sekretariat Sementara Konstituante di Gedung Merdeka, Djalan Asia-Afrika 67 Bandung, untuk diketahui dan seperlunya.

PERDANA MENTERI,
Aliastromidjojo
(Mr. Ali Bastromidjojo).-

Surat dari perdana menteri kepada presiden, wakil presiden, para menteri dan Ketua DPR mengenai pelantikan Konstituante, 31 Oktober 1956
Sumber: ANRI, Sekretariat Negara KPM No. 2448

Pada tanggal 31 Oktober 1956, pemerintah mengeluarkan pengumuman bahwa upacara pelantikan anggota Konstituante sudah dapat dilaksanakan karena telah ada 400 anggota yang diterima oleh Panitia Pemeriksaan. Pemerintah kemudian menetapkan upacara pengambilan sumpah dilaksanakan pada tanggal 9 November di gedung Gubernur Bandung dan pelantikan anggota Konstituante dilaksanakan pada tanggal 10 November 1956 di gedung Merdeka. Pemerintah juga meminta jajarannya di daerah untuk memfasilitasi anggota-anggota Konstituante yang akan menghadiri pelantikan di Bandung dengan memberikan bantuan transportasi dan biaya perjalanan.

Dukungan dan harapan rakyat terhadap anggota Konstituante yang terpilih melalui Pemilu 1955 sangatlah besar. Salah satunya ditunjukkan oleh pernyataan Gerwani Cabang Ciamis sehari sebelum pelantikan anggota Konstituante. Dalam pernyataan itu Gerwani menyampaikan harapan agar Konstituante dapat menyusun undang-undang dasar yang demokratis dan menjamin hak hidup rakyat banyak. Selain itu anggota Konstituante harus dapat menolak cita-cita yang bermaksud mengubah bentuk negara Indonesia menjadi negara federasi.



▲ Pengumuman pemerintah mengenai upacara pelantikan anggota Konstituante pada tanggal 10 November 1956
Sumber: ANRI, Sekretariat Negara KPM No. 2448

DEWAN PIMPINAN CABANG
GERAKAN WANITA INDONESIA
" GERWANI "
T j i a m i s
Djalan Gudang No. 15.-

Ciamis, 9 November 1956

PERNJATAAN

Hasil Pemilihan Umum yang untuk D.P.R. dan Konstituante telah menunjukkan betapa besar kesadaran dan keinginan Rakyat untuk memiliki Negara yang mempunyai DPR dan Konstituante yang benar-benar Demokratis, walaupun di Indonesia baru pertama kali diadakan.

Mendjelang pelantikan anggota-anggota Konstituante dan sidang-sidangnya, tidak berlebihan kiranya kalau Gerwani Cabang Tjiamis yang mewakili 15876 anggota menyampaikan " Sala mat bersidang dan selawat bekoraja " dengan disertai beberapa harapan yang sewajarnya mendapat perhatian seperlunya.

Dengan adanya hasil pemilihan umum telah dapat digambarkan bahwa Rakyat mempunyai keinginan yang maju dan merindukan perbaikan dalam hidupnya.

Undang-undang sementara yang sekarang berlaku masih kurang sekali menjamin kelulusannya hidup Rakyat banyak.

Maka dengan demikian kami mendesak :

1. Untuk perbaikan Negara dan untuk perbaikan Rakyatnya, supaya Dewan Konstituante dapat menjabarkan suatu Undang-undang yang benar-benar demokratis, Undang-undang Negara Kesatuan, dimana kehidupan dan hak-hak Rakyat banyak akan dapat dijamin.
2. Supaya Dewan Konstituante dapat menolak tiap-tiap tjiat yang ingin membentuk Negara Indonesia menjadi Negara Pederasi.

Dengan mengalirnya pernyataan-pernyataan dari Rakyat, kami pertjaja bahwa Dewan tidak akan melupakan, bahwa Rakyat yang memilih menaruh kepercayaan penuh, bahwa wakilnya akan benar-benar memperhatikan nasib Rakyat banyak, dan tidak membiarkan beberapa manusia saja memperkosa hak Rakyat.

Dikirim Kepada Jth.

1. Dewan Konstituante di Bandung.
2. P.J.M. Presiden R.I. Djakarta.
3. Parlemen R.I. di Djakarta.
4. D.P.P. Gerwani di Djakarta.
5. D.P.D. Gerwani Djakar.
6. A r s c h i f.

Dewan Pimpinan Cabang Gerwani

T j i a m i s

Secretariat.



(Rusmilah Nurjany)

dyk XIV/3/22
2/12/56

◀ Pernyataan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) Ciamis tentang pelantikan Konstituante. Gerwani Cabang Ciamis berharap agar Konstituante dapat menyusun undang-undang dasar yang demokratis dan menolak pembentukan negara federasi, 9 November 1956
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden No. 1405



Pada tanggal 8 November 1956, diadakan resepsi untuk anggota Konstituante yang akan dilantik di gedung Gubernur Bandung. Nampak anggota Konstituante sedang menanti kedatangan Presiden Sukarno di depan gedung Gubernur Bandung.

Pada malam resepsi tersebut digunakan para anggota Konstituante untuk saling berkenalan. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan latar belakang yang berbeda-beda. Banyak di antara mereka yang sebelumnya belum pernah bertatap muka dengan Presiden Sukarno. Presiden Sukarno sedang berfoto bersama dengan para anggota Konstituante.

Anggota Konstituante di depan gedung Gubernur Bandung untuk menyambut kedatangan Kepala Negara, 8 November 1956
Sumber: ANRI, Kempen JB 5603-654





Presiden Sukarno bersama anggota ▲
Konstituante setelah resepsi di gedung
Gubernuran Bandung, 8 November 1956
Sumber: ANRI, Kempen JB 5603-689



▲ Sekjen Sementara Konstituante, Akub Gulangge memberikan laporan kepada Presiden Sukarno, 9 November 1956;
Sumber: ANRI, Kempen JB 5603-723



Pada tanggal 9 November 1956, Presiden Sukarno mengambil sumpah anggota Konstituante di gedung Gubernuran Bandung. Setelah Presiden Sukarno memasuki ruangan, Sekretaris Jenderal Sementara Konstituante Akub Gulangge melaporkan kesiapan upacara pengambilan sumpah. Selanjutnya Presiden Sukarno mengambil sumpah anggota Konstituante sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

◀ Penyumpahan anggota Dewan
Konstituante di gedung Gubernuran
Bandung, 9 November 1956
Sumber: ANRI, Kempen JB 5603-748



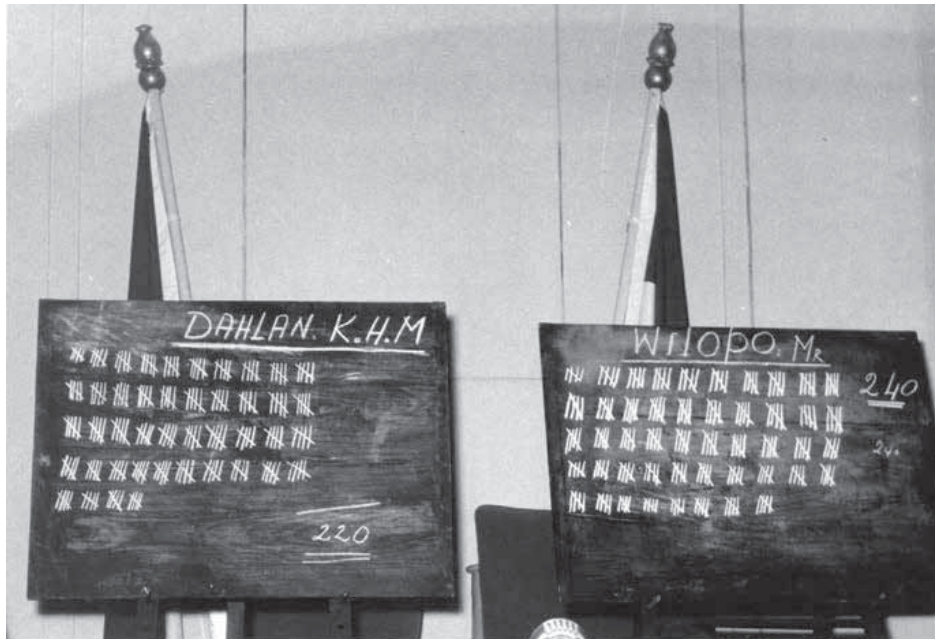
Pelantikan anggota Konstituante baru dilangsungkan keesokan harinya di gedung Merdeka, Bandung bertepatan dengan hari Pahlawan tanggal 10 November 1956. Pada kesempatan itu Presiden Sukarno membacakan pidato yang intinya meminta agar Konstituante bersama-sama pemerintah dapat menyusun Undang-undang Dasar Republik Indonesia.



▲ Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta meninggalkan gedung Merdeka setelah upacara pelantikan, anggota Konstituante, 10 November 1956
Sumber: ANRI, Kempen JB 5603-734



Pada tanggal 19 November 1956 diadakan rapat pemilihan Ketua Konstituante. Dalam pemilihan Ketua Konstituante itu muncul dua kandidat, yaitu Mr. Wilopo dari PNI dan K.H.M. Dahlan dari NU. Dalam pemungutan suara yang berlangsung ketat, akhirnya Mr. Wilopo tampil sebagai pemenangnya dengan memperoleh 240 suara. Sedangkan K.H.M. Dahlan memperoleh 220 suara. Nampak Mr. Wilopo dikerumuni oleh para pendukungnya setelah berhasil memenangi pemilihan Ketua Konstituante.



Hasil penghitungan suara pemilihan ▲
Ketua Konstituante, 19 November 1956
Sumber: ANRI, Kempen JB 5603-816



Mr. Wilopo yang baru terpilih sebagai ▲
Ketua Konstituante dikerumuni oleh para
pendukungnya, 19 November 1956
Sumber: ANRI, Kempen JB 5603-815

C. Anggota DPR dan Konstituante yang Diangkat

Selain anggota yang dipilih, ada pula anggota DPR dan Konstituante yang diangkat oleh pemerintah. Anggota yang diangkat ada dua kelompok, kelompok pertama mewakili Irian Barat yang tidak mungkin diadakan pemilu karena masih dikuasai oleh Belanda. Jumlah anggota yang diangkat mewakili daerah pemilihan Irian Barat sebanyak 3 orang untuk DPR dan 6 orang Konstituante. Sedangkan kelompok kedua adalah wakil kelompok minoritas yang terdiri atas keturunan Tionghoa, Eropa, dan Arab. Jumlah golongan minoritas yang diangkat oleh pemerintah sebanyak 14 orang.

Dalam mengisi wakil-wakil Irian Barat yang duduk di DPR dan Konstituante Gerakan Pembela Pancasila mengajukan nama-nama tokoh yang tidak satu pun putra Irian Barat. Anggota DPR wakil Irian Barat yang diusulkan oleh Gerakan Pembela Pancasila adalah Chairul Saleh, Dr. Buntaran Martoadmodjo, dan Andi Penjamin. Sedangkan untuk anggota Konstituante wakil dari Irian Barat yang diusulkan oleh Gerakan Pembela Pancasila adalah Prof. Mr. Abdulgafar Pringgodigdo, Chairul Saleh, Dr. Buntaran Martoadmodjo, Andi Penjamin, Prof. Mr. Muhammad Yamin, dan Dr. Sutardjo.

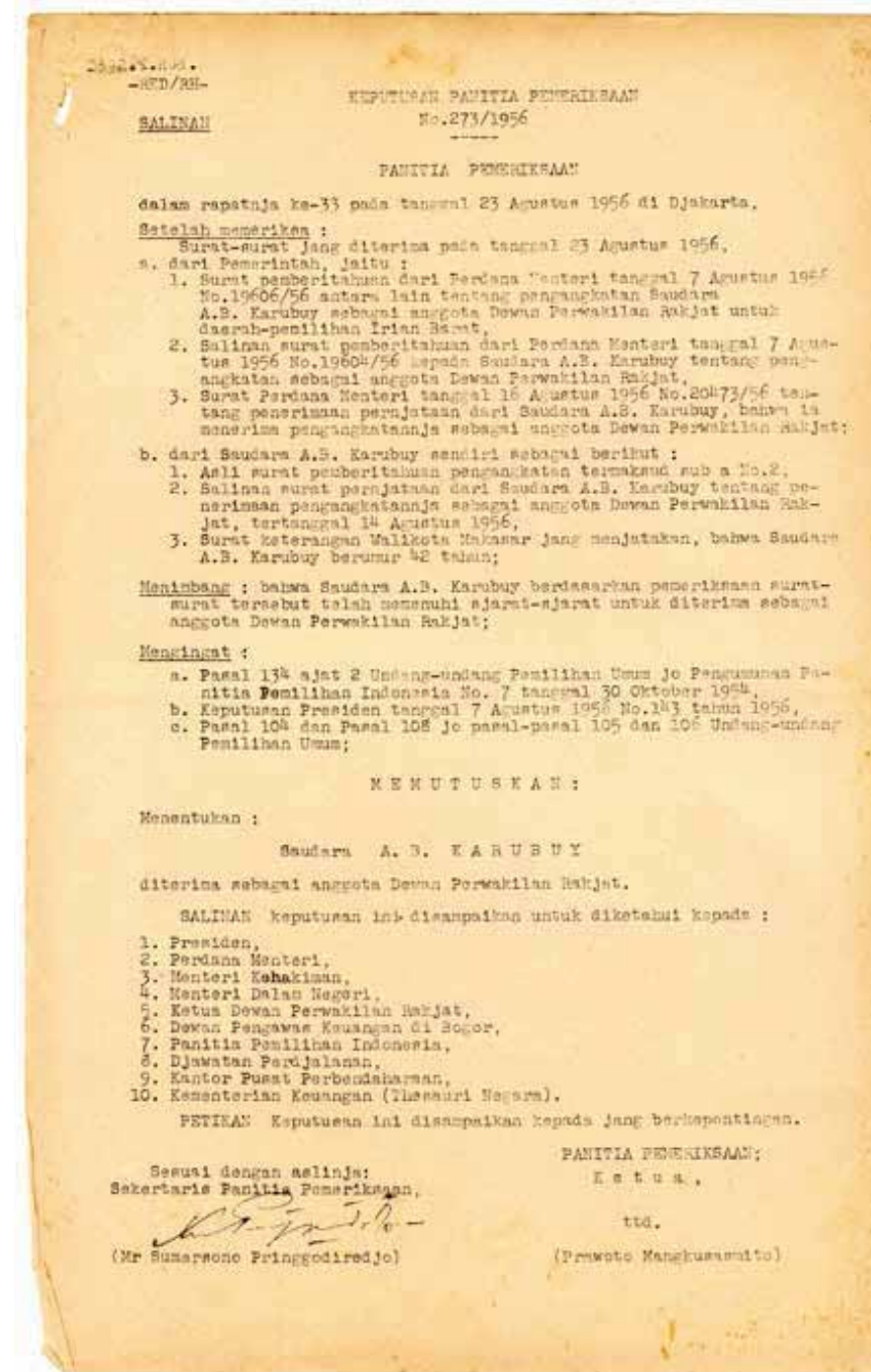


▲ Surat dari Pimpinan Pusat Gerakan Pembela Pancasila kepada Presiden RI tanggal 3 April 1956 tentang pencalonan sebagai anggota DPR dan Konstituante untuk Irian Barat
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 No. 933

Dalam rapat ke-33 tanggal 23 Agustus 1956, Panitia Pemeriksaan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 273/1956 yang menyatakan A.B. Karubuy diterima menjadi anggota DPR dari Irian Barat. Hal itu sesuai dengan permintaan tokoh-tokoh Irian Barat.

Etnis Tionghoa sebagai kelompok minoritas yang terbesar di Indonesia juga mengajukan wakilnya untuk duduk di DPR dan Konstituante. Dalam hal ini Komite Pencalonan Anggota DPR/Konstituante Keturunan Tionghoa mengusulkan calon tunggal Go Yoe Hien. Go Yoe Hien sendiri merupakan salah satu intelektual keturunan Tionghoa dan pernah menjadi anggota PNI Cabang Kediri, Jawa Timur.

Surat Keputusan Nomor 273/1956 yang menyatakan A.B. Karubuy diterima menjadi anggota DPR dari Irian Barat. Hal itu sesuai dengan permintaan tokoh-tokoh Irian Barat.
 Sumber: ANRI, Kabpres No. 1006





Surat dari Komite Pencalonan Anggota DPR/ Konstituante keturunan Tionghoa kepada Presiden RI tanggal 25 Juni 1956 tentang pengajuan calon tunggal untuk pencalonan anggota DPR/ Konstituante keturunan Tionghoa

KABINET PR. SOEKARNO
AGENDAN
11 JUNI 1956
1956

SIMPAN
TGL.
BUNDUKI 25/6

Surat dari Komite Pencalonan Anggota DPR/ Konstituante keturunan Tionghoa kepada Presiden RI tanggal 25 Juni 1956 tentang pengajuan calon tunggal untuk pencalonan anggota DPR/ Konstituante keturunan Tionghoa

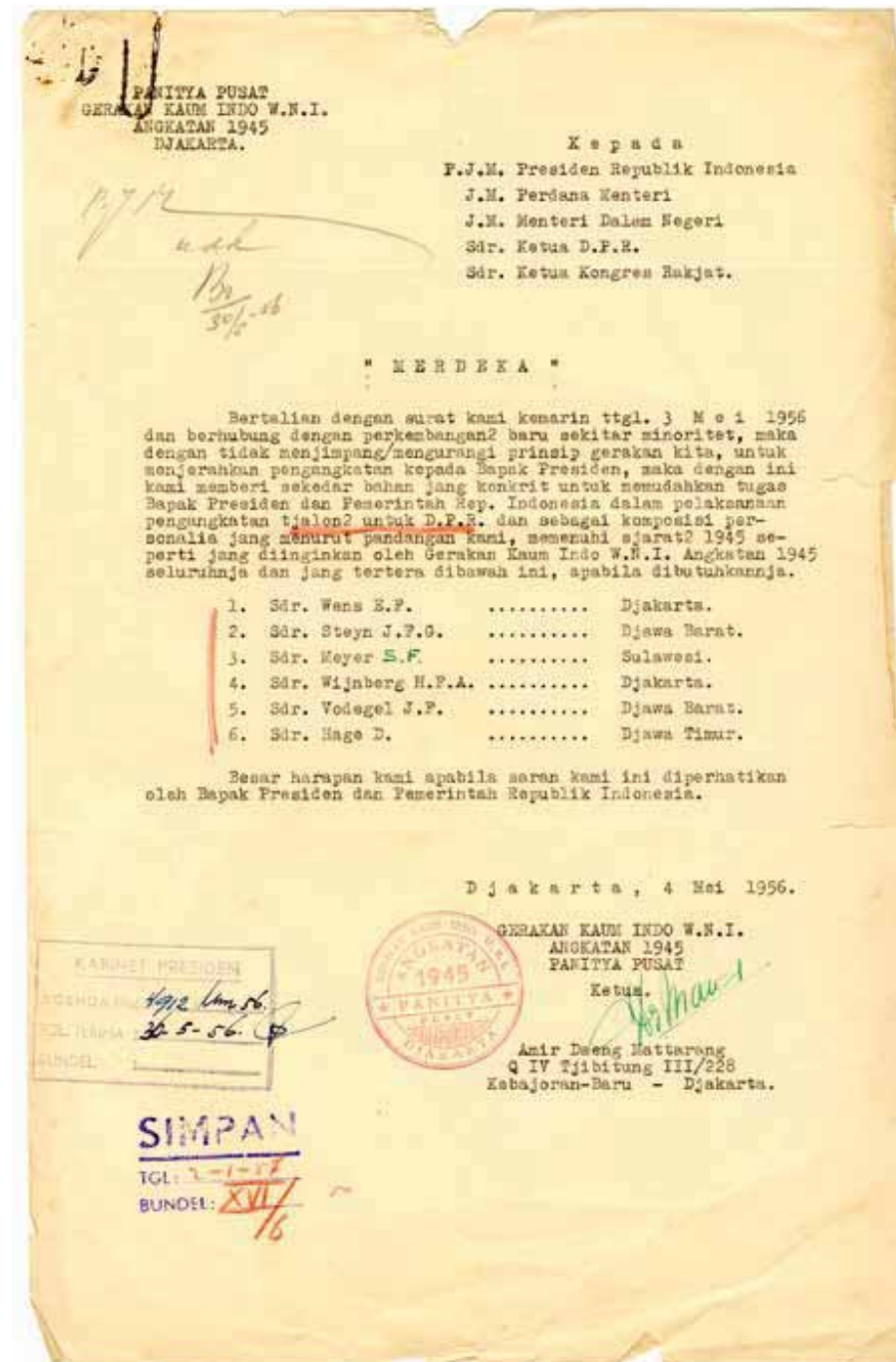
Surat dari Komite Pencalonan Anggota DPR/ Konstituante keturunan Tionghoa kepada Presiden RI tanggal 25 Juni 1956 tentang pengajuan calon tunggal untuk pencalonan anggota DPR/ Konstituante keturunan Tionghoa

Surat dari Komite Pencalonan Anggota DPR/ Konstituante keturunan Tionghoa kepada Presiden RI tanggal 25 Juni 1956 tentang pengajuan calon tunggal untuk pencalonan anggota DPR/ Konstituante keturunan Tionghoa
Kabinet Presiden RI 1950-1959 No. 933



Sebagai wadah pergerakan bagi WNI keturunan Eropa, Panitia Pusat Gerakan Kaum Indo WNI Angkatan 45 pada suratnya kepada pemerintah tanggal 4 Mei 1956 mengajukan enam nama anggotanya untuk duduk dalam Konstituante. Mereka adalah E.F. Wens, J.F.G. Steyn, S.F. Meyer, H.F.A. Wijnberg, J.F. Vodegel, dan D. Hage. Kelompok pergerakan tersebut berharap di antara nama-nama tersebut ada yang terpilih duduk dalam Konstituante.

Surat dari Panitia Pusat Gerakan Kaum Indo WNI kepada pemerintah RI tanggal 4 Mei 1956 tentang rekomendasi nama untuk pengangkatan calon- calon anggota DPR dari golongan minoritas
 Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 No. 933



PANITIA BAKTI KETURUNAN ARAB
 Kembang Djepun 178
 S U R A B A J A .

gpr
Surabaya, 3 April 1956.-
Kampuh, kumpul memo -
ritel

Kepada: Jang Mulja,
 Paduka Bapak Presiden R.I.
 D j a k a :

Assalamualaikum w.w.
 H e r d e k a !

Terlampir bersama ini kami sembahkan kepada Bapak selebaran Manifest berkepala: "KENJATAAN" dari Panitia Bakti Keturunan Arab di Surabaya, untuk diketahui oleh Bapak.-

Manifest tsb. telah beredar meluas di seluruh Djawa-Timur untuk diketahui oleh umum.-

Adapun kami (Panitia Bakti Keturunan Arab) di Surabaya telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjalarkan dua tjalon tsb. (M.B.A. Alamoedie dan N.S. Alkaff) untuk menduduki Korsi D.P.R./konstituante, kerna telah menjadi suatu kenjataan dan djaminan dari djasa2 kedua tjalon tsb. bahwa golongan kami (Warga R.I. Keturunan Arab) bahwa kedua tjalon tsb. dapat membawa suara kami ke hadapan ramai untuk menegakkan Negara R.I. serta turut bersama saudara2nja Indonesia Asli akan menanggung djawab atas nasib Negara kita (Negara Republik Indonesia).-

Demikianlah sembahkan kami ini kepada Bapak, dengan tidak kurang2 harapan kami bahwa Bapak dapat sumbangkan djuga Sokongan-Bathin terhadap peribadi dua Tjalon tsb. untuk menduduki Korsi2 jang telah disediakan untuk golongan kami (Warga R.I. Keturunan Arab) di D.P.R. dan Konstituante.-

Sekian.-

Wassalam,
 H e r d e k a !

PANITIA BAKTI KETURUNAN ARAB.-
a/m. *A. Ali Alamoedie*
 A.b. Ali Alamoedie.-
 (Penulis).-

SIMPAN
 TGL: 6-5-56
 BUNDEL: XVI/6

KABINET PRESIDEN
 AGENDA No. 3567, am. 16
 TGL. TERIMA: 12/5-56
 BUNDEL: *1/2*

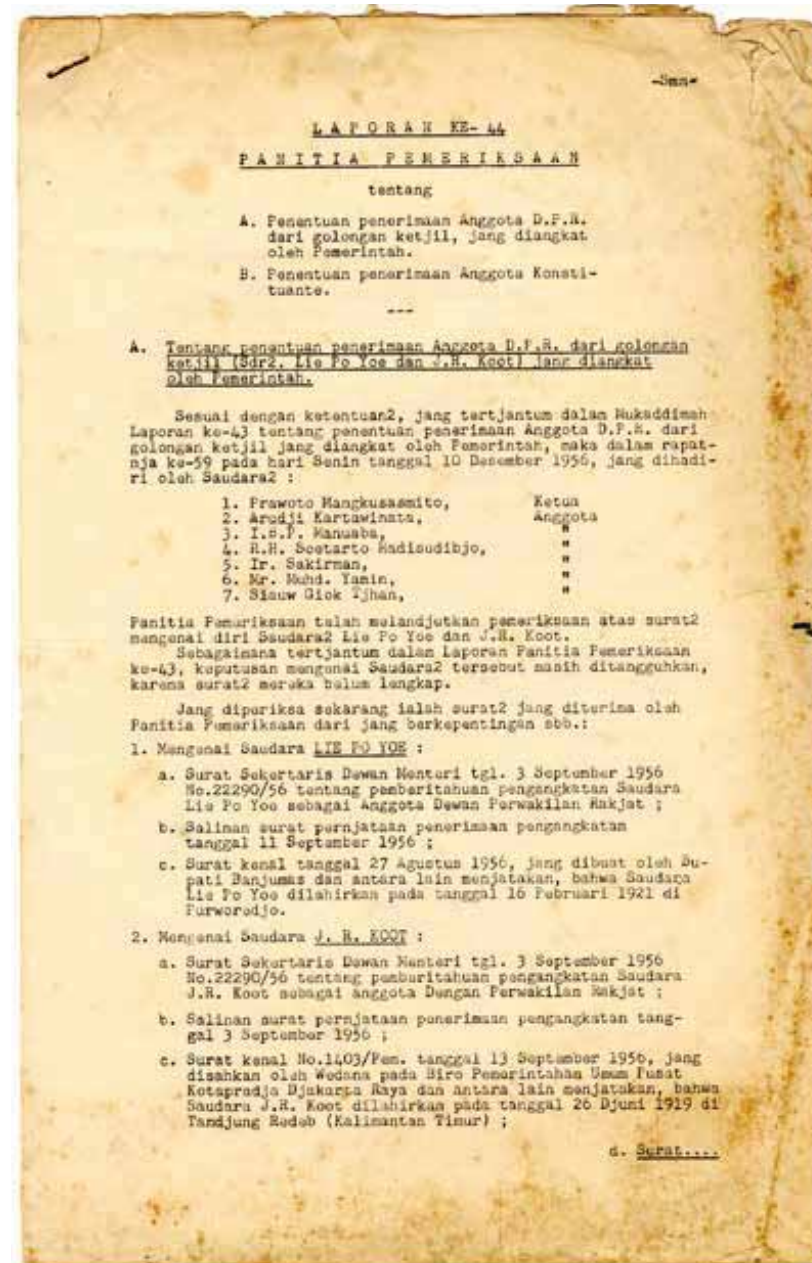
Dalam rangka keterwakilan kelompok etnis Arab, Panitia Bakti Keturunan Arab dari Surabaya mengirim surat kepada Presiden Sukarno yang isinya mengajukan dua nama anggotanya agar dilantik sebagai anggota Konstituante. Dua tokoh keturunan Arab itu adalah M.B.A. Alamoedie dan N.S. Alkaff.

◀ Surat dari Panitia Bakti Keturunan Arab tanggal 3 April 1956 kepada Presiden RI tentang pencalonan M.B.A. Alamoedie dan N.S. Alkaff
 Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959
 No. 933



Pada laporan ke-44 Panitia Pemeriksaan menentukan penerimaan anggota DPR perwakilan golongan minoritas keturunan Tionghoa dan Eropa atas nama Lie Po Yoe dan J.R. Koot. Selain itu, pada laporan yang sama juga disebutkan penerimaan anggota Konstituante pengganti atas nama Soedjatmoko dan Mr. Kosasih Poerwanegara.

Laporan ke-44 Panitia Pemeriksaan tanggal 10 November 1956 tentang penentuan penerimaan anggota DPR dari golongan minoritas atas nama Lie Po Yoe dan J.R. Koot
 Sumber: ANRI, *Kabinet Presiden RI 1950-1959* No. 933



- 2 -

d. Surat tjetatan tentang memilih kebangsaan Indonesia, yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1951.

Setelah melakukan pemeriksaan termaksud, maka Panitia Pemeriksaan memutuskan :

MEMENTUKAN, BAHWA SAUDARA2 LIE PO YOE DAN J.K.KOOT DIYERIMA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAY.

B. Tentang penentuan penerimaan anggota Konstituante
(Sdr2. Soedjatmoko dan Mr. Kosasih Foerwanegara).

Sesuai dengan ketentuan2, yang tertjatam dalam Mukaddimah laporan ke-26 tentang penentuan penerimaan para terpilih menjadi Anggota Konstituante, maka dalam rapat tersebut diatas, Panitia Pemeriksaan memeriksa surat2 mengenai diri Saudara2 Soedjatmoko dan Mr. Kosasih Foerwanegara sebagai pengganti terpilih menjadi anggota Konstituante.

Jang diperiksa ialah :

- Mengenai Saudara **SOEDJATMOKO diperiksa :**
 - Salinan surat pemberitahuan penetapan pengganti terpilih tgl. 17 Nopember 1956 No.56/Sp/1283/DK/281;
 - Surat pemberitahuan penerimaan perajataan dari pengganti terpilih tgl. 17 Nopember 1956 No.56/Sp/1283/b/DK/281;
 - Asli surat pemberitahuan penetapan pengganti terpilih sub. sub a;
 - Salinan surat perajataan dari pengganti terpilih tgl. 17 Nopember 1956 No.56/Sp/1283/a/DK/281;
 - Surat keterangan tgl. 17 Nopember 1956 No.9179/XII/56 jang disahkan oleh Asisten Wedana Gumbir (Jakarta Raya) dan antara lain menjatakan, bahwa Saudara Soedjatmoko berumur 34 tahun.
- Mengenai Saudara **Mr. KOSASIH FOERWANEGARA diperiksa :**
 - Salinan surat pemberitahuan penetapan pengganti terpilih tgl. 19 Nopember 1956 No.56/Sp/1283/DK/282;
 - Surat pemberitahuan penerimaan perajataan dari pengganti terpilih tgl. 19 Nopember 1956 No.56/Sp/1283/b/DK/282;
 - Asli surat pemberitahuan penetapan pengganti terpilih tersebut sub a;
 - Salinan surat perajataan dari pengganti terpilih tgl. 19 Nopember 1956 No.56/Sp/1283/a/DK/282;
 - Surat kanal tgl. 19 Nopember 1956 No.34/56 jang dibuat oleh Asisten Wedana Gumbir (Jakarta Raya) dan antara lain menjatakan, bahwa Saudara Mr. K. Kosasih Foerwanegara dilahirkan pada tgl. 13 Maret 1913.

Sds:sd...

- 3 -

Setelah melakukan pemeriksaan termaksud, maka Panitia Pemeriksaan memutuskan :

MEMENTUKAN, BAHWA SAUDARA2 SOEDJATMOKO DAN Mr. KOSASIH FOERWANEGARA, DIYERIMA SEBAGAI ANGGOTA KONSTITUANTE.

Jakarta, 10 Nopember 1956.-

PANITIA PEMERIKSAAN:

1. Prawoto Mangkunamito	(Ketua)
2. Arudji Kartawinata	(anggota)
3. I.I.F. Mansaba	"
4. R.H. Soetarto Hadisoedibjo	"
5. Ir. Sakirman	"
6. Mr. Mhd. Yamin	"
7. Siauw Giok Tjhan	"



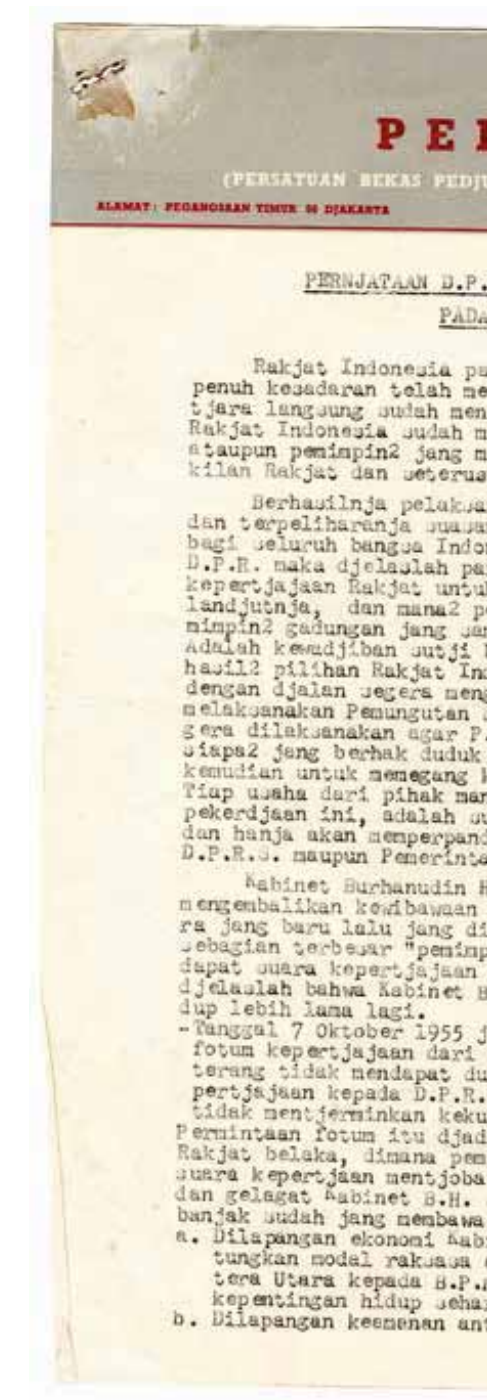
D. Dampak Pemilu 1955

Setelah hasil perolehan suara anggota DPR diketahui oleh masyarakat luas maka muncul desakan dari berbagai organisasi massa agar Kabinet Burhanudin Harahap segera mengembalikan mandatnya. Mereka berharap agar DPR yang baru dapat membentuk kabinet secepatnya dan roda pemerintahan segera berjalan.

Pada tanggal 3 Oktober 1955, Dewan Pusat Perbepbsi mengeluarkan pernyataan tentang hasil pemungutan suara DPR tanggal 29 September 1955. Berdasarkan berita surat kabar dapat diketahui hasil perolehan suara Pemilu DPR di mana orang-orang yang duduk di Kabinet Burhanudin Harahap tidak memperoleh kepercayaan dari rakyat. Oleh karena itu, Dewan Pusat Perbepbsi menginginkan agar Kabinet Burhanudin Harahap segera mengembalikan mandatnya. Selain itu, Dewan Pusat Perbepbsi juga mengecam manuver politik yang dilakukan oleh Kabinet Burhanudin Harahap untuk memperpanjang kekuasaannya dengan meminta dukungan pada DPRS.

Pernyataan Dewan Perbepbsi yang menginginkan Kabinet Burhanudin Harahap segera mengembalikan mandatnya, 30 Oktober 1955

Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 No. 993 a



AM D.P. PERBEPBSI TENTANG HASIL PEMUNGUTAN-SUARA
PADA TANGGAL 29 SEPTEMBER 1955.

usia pada tanggal 29 September 1955 dengan bangga dan
lah melakukan tugas nasionalnya sebagai hakim. Ia se-
lah menjatuhkan vonnisnya: dengan bebas dan rahasia
sudah memberikan suaranya kepada partai2, organisasi2
yang mereka pertajjai untuk duduk dalam Dewan Perwa-
seteruanja pemimpin negara Republik Indonesia.

melaksanaan Pemungutan Suara dengan gemilang, tertib
suasana aman dan tenang merupakan kebanggaan nasional
Indonesia. Dengan selesainya Pemungutan Suara untuk
ah partai2 mana atau pemimpin2 mana, yang mendapat
t untuk memimpin Negara Republik Indonesia kita ini se-
ana2 pemimpin2 atau partai2 yang hanya merupakan pe-
ang samasekali tidak mendapat kepertajajaan dari Rakjat.
utji bagi kita semua untuk se-tjepatnja melaksanakan
jat Indonesia pada tanggal 29 September j.b.l. itu
ra mengadakan penghitungan suara di daerah2 yang sudah
gutan suara. Penghitungan suara ini penting sekali se-
agar P.P.I. segera dapat mengumumkan hasil2 yang resmi,
duduk di Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia
egang kendali Pemerintahan di Negara kita ini.
hak manapun djuga datangnya yang menghambat pelaksanaan
alah suatu sabotase terhadap kehendak Rakjat banjak,
perpendjang umur pemimpin2 palau bertjokol di dalam
erintah B.H. sekarang.

udin Haruhap katanja mempunyai salah satu program
bawaan Pemerintah. Dari sementara hasil Pemungutan Sua-
yang diumumkan di beberapa surat kabar ternjata bahwa
"pemimpin2" dalam Kabinet B.H. sekarang ini tidak men-
jajaan dari Rakjat Indonesia. Dengan demikian semakin
abinet B.H. ini sebenarnya sudah tidak mempunyai hak hi-

1955 j.a.d. Kabinet B.H. masih akan mentjoba meminta
dari D.P.R. sementara. Apa faedahnja "abinet B.H. yang
apat dukungan yang luas dari Rakjat, meminta fotum ke-
D.P.R. sementara yang nota-bene kini sudah samasekali
in kekuatan2 yang hidup dalam masyarakat ?
u djadinja hanya merupakan permainan mengelabui mata
na pemimpin2 dalam Kabinet B.H. yang tidak mendapat
ntjoba memperpendjang kekuasaannya. melihat tindakan2
B.H. selama hidupnya yang singkat itu, maka sangat
embawa kerugian bagi Rakjat antara lain:
ni Kabinet B.H. merugikan ekonomi nasional dan mengun-
kusa asing. Usaha2 mengembalikan tambang minyak Sum-
a B.P.M., tak dapat mengendalikannya memuntjaknja harga
p sehari-hari, dll.

nan antara lain ada usaha untuk memberikan amnesti umum
kepada.....

- 2 -

kepada pengatjau D.I./T.I.I. dll., sedang mereka ini sudah didekrit-
kan oleh Kepala Negara sebagai musuh2 Negara.
c. Pelanggaran2 terhadap prinsip2 demokrasi parlementer a.l. menambah
anggota P.P.I. hanja dengan suatu Undang2 Darurat sadja. Tindakan
ini dengan tegas mendemonstrasikan keserakahhan partai2 pendukung
Kabinet B.H., karena sebelum penambahan pun perbandingan anggota
dalam P.P.I. sudah menguntungkan partai2 dalam Kabinet B.H.
-Djurutjara Kabinet B.H. pernah menjatakan bahwa Kabinet B.H. masih
akan hidup 1/2 tahun lagi. Besar kemungkinan, bahwa Kabinet B.H. akan
bertambah menjalankan tindakan2 yang lebih2 merugikan Rakjat. Kita
terpantjang kepada peristiwa2 di Pakistan Timur, Guatamala, dll. dima-
na pihak2 anti demokrasi menghantjurkan pihak2 demokrasi, hasil Pem-
ilihan Umum dengan djalan kekerasan sendjata.

Karena itu, untuk menghindari tindakan2 yang sangat merugikan
terus menerus bagi Negara dan Demokrasi di Indonesia, sudah sewadjar-
nja Presiden Kepala Negara Republik Indonesia menjatakan demisioner-
nja Kabinet B.H. sekarang djuga.

Dewan Pusat PERBEPBSI mengadjak kepada semua Bekas Pedjuang Ber-
sendjata dan semua golongan demokratis yang tjinta Tanah Air untuk
lebih bersatu dan waupada dalam menjelamatkan hasil2 kemenangan demo-
krasi dalam Pemilihan Umum j.b.l.

Hidup Republik Indonesia !

Hidup Demokrasi !

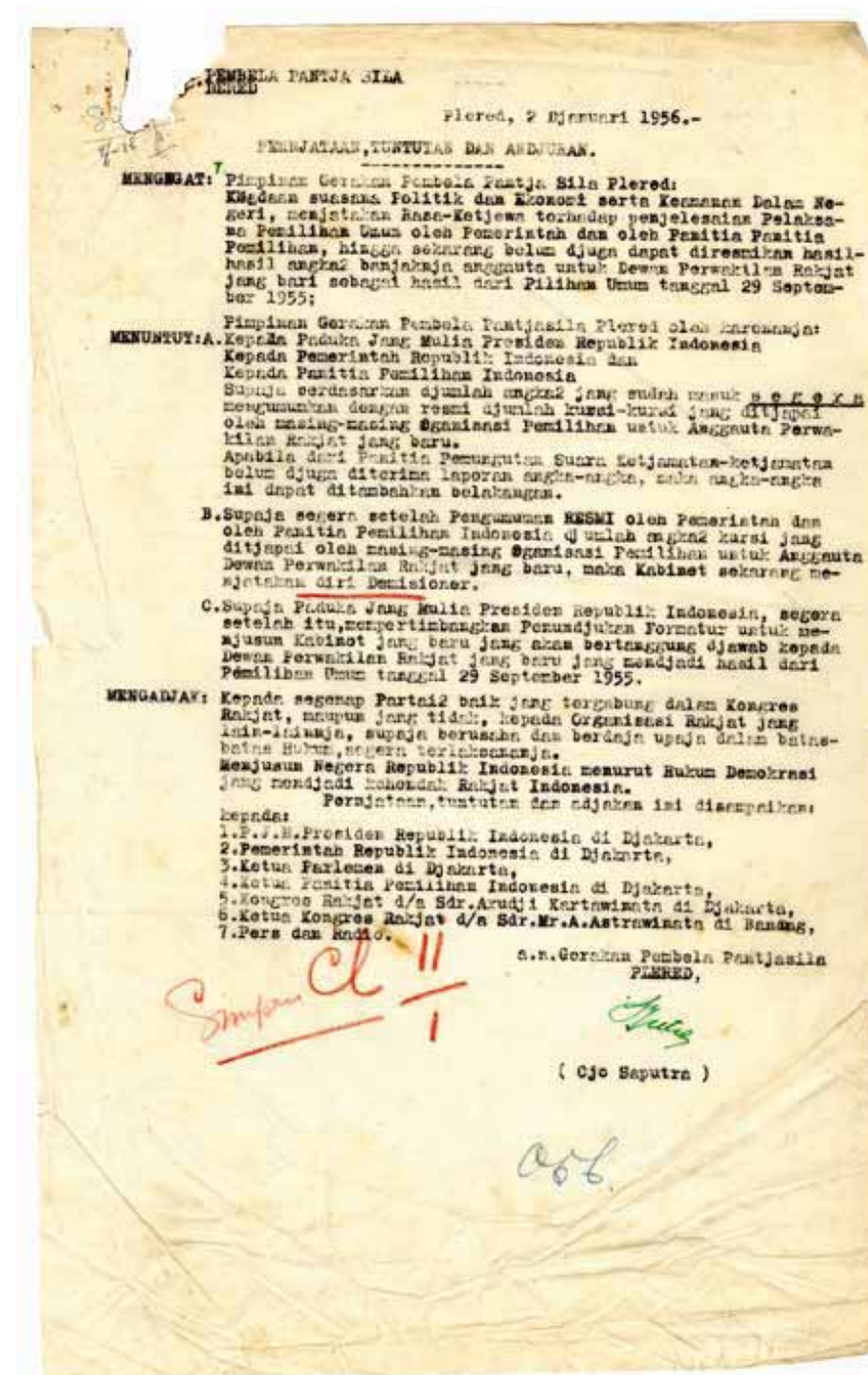


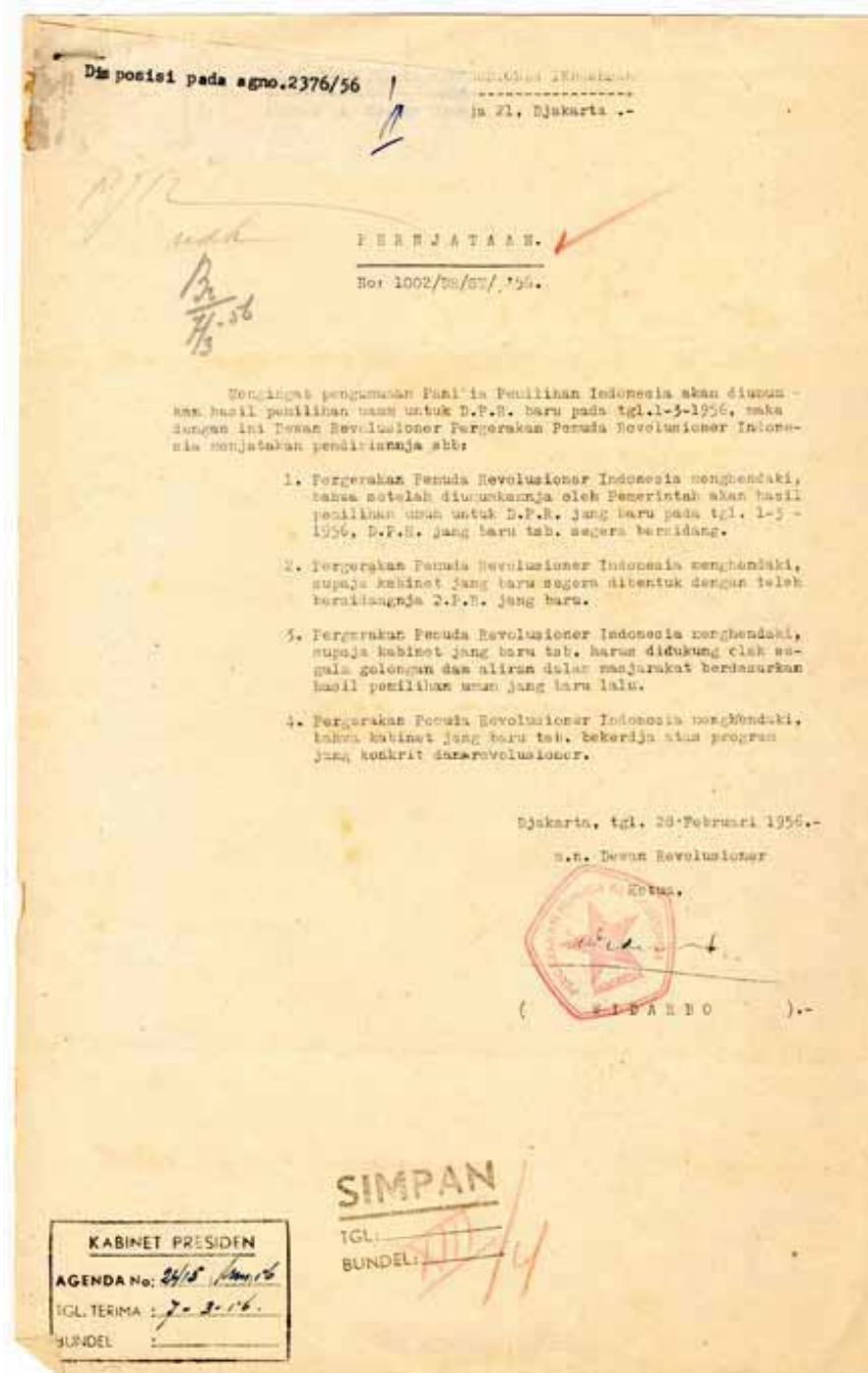
DJAKARTA, 3 Oktober 1955.

DEWAN PUSAT PERBEPBSI .

Pada tanggal 2 Januari 1956, Pimpinan Gerakan Pembela Pancasila Plered mengirimkan pernyataan, tuntutan, dan anjuran kepada Presiden Republik Indonesia, pemerintah, Ketua Parlemen, Ketua PPI, Kongres Rakyat, dan media massa. Dalam surat tersebut Pimpinan Gerakan Pembela Pancasila Plered meminta agar Kabinet Burhanudin Harahap segera menyatakan demisioner dan pemerintah segera mengangkat formatur untuk membentuk kabinet baru. Selain itu Pimpinan Gerakan Pembela Pancasila Plered mengajak partai-partai dan organisasi massa baik yang bergabung dengan Kongres Rakyat maupun tidak untuk aktif terlibat dalam menyusun negara Republik Indonesia yang demokratis.

Pernyataan, tuntutan, dan anjuran dari Gerakan Pembela Pancasila Plered pasca Pemilu 1955, 2 Januari 1956
 Sumber: ANRI, Arsip KPM No. 1131 a





Dewan Revolusioner Pergerakan Pemuda Revolusioner Indonesia pada tanggal 28 Februari 1956 sehari sebelum PPI mengumumkan hasil pemilu DPR mengeluarkan pernyataan sikap. Pergerakan Pemuda Revolusioner Indonesia menginginkan agar DPR yang terpilih melalui Pemilu 1955 segera bersidang untuk membentuk kabinet yang baru. Organisasi tersebut juga berharap semua golongan dan aliran yang ada di masyarakat mendukung kabinet yang dibentuk oleh DPR. Pergerakan Pemuda Revolusioner Indonesia menghendaki agar kabinet yang terbentuk tersebut segera melaksanakan program yang konkret dan revolusioner.

- ◀ Surat pernyataan No. 1002/DR/ST/56 dari Pergerakan Pemuda Revolusioner Indonesia tanggal 28 Februari 1956 tentang keinginan untuk diadakan segera sidang dan pembentukan kabinet baru setelah diumumkan hasil Pemilu 1955
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI 1950-1959 No. 993 b



Setelah menghadapi desakan dari berbagai pihak, akhirnya Perdana Menteri Burhanudin Harahap mengembalikan mandatnya pada tanggal 3 Maret 1956. Presiden Sukarno kemudian menunjuk formatur Ali Sastroamidjojo untuk menyusun kabinet yang baru. Kabinet Ali Sastroamidjojo dilantik oleh Presiden Sukarno pada tanggal 24 Maret 1956. Setelah upacara pelantikan, seluruh anggota Kabinet Ali Sastroamijojo berfoto bersama Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.





◀ Suasana pada upacara pelantikan di Istana Merdeka, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo sedang diangkat sumpahnya secara agama Islam, Jakarta 24 Maret 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560324 FG 5-1

▲ Anggota Kabinet Ali Sastroamidjojo II berfoto bersama Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, Jakarta 24 Maret 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560324 FG 1-4





BAB V *Penutup*

Pemilu 1955 telah berhasil dilaksanakan dan berlangsung cukup demokratis. Hal itu ditunjukkan dari animo masyarakat yang sangat besar untuk memberikan hak suaranya. Pada hari pemungutan suara para pemegang hak pilih berbondong-bondong mengantre di TPS. Sedikit sekali atau bisa dibayangkan tidak ada tekanan ketika seorang pemilih mencoblos tanda gambar kontestan pemilu di bilik suara.

Meski di beberapa daerah muncul gangguan keamanan yang turut mempengaruhi jalannya pemilu, namun hal itu tidak mengurangi nilai demokrasi yang ada. Sebab teror tersebut tidak dilakukan pihak pemerintah sebagai penyelenggara atau partai politik kontestan pemilu, namun dari gerombolan pengacau yang sejak sebelum pemilu direncanakan telah eksis.

Pemilu 1955 merupakan pembuktian bagi partai politik mengenai seberapa besar ideologi dan gagasannya diterima dan didukung oleh masyarakat. Berdasarkan perolehan suara muncul empat besar pemenang pemilu, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Keempat partai tersebut mencerminkan ideologi utama yang berkembang di masyarakat Indonesia pada saat itu, yaitu Islam, nasionalis, dan komunis. Memang sejak sebelum era kemerdekaan tiga ideologi tersebut yang mendominasi partai-partai politik yang ada di Indonesia. Sedangkan pada tataran gagasan, ideologi nasionalis yang dibawa oleh PNI diterima secara luas di kalangan birokrat dan kaum terpelajar. Pada daerah-daerah yang penduduk Islamnya mayoritas, menjadi medan perebutan pengaruh dua partai besar Islam tersebut. Kalangan Islam modern di perkotaan lebih cenderung menyalurkan aspirasi politiknya ke Masyumi, sedangkan Islam tradisional di pedesaan terutama di Pulau Jawa lebih cenderung ke NU. PKI tampil memanfaatkan celah-celah ideologi yang ada antara Islam



dan nasionalis. Partai ini secara berimbang menyebarkan pengaruhnya di perkotaan dan pedesaan, di perkotaan PKI menyoar kaum buruh dan di pedesaan menyoar para petani miskin. Kader-kader PKI yang militan terlihat lebih agresif mengkampanyekan program-program partainya dibanding partai-partai yang lain.

Karena pada Pemilu 1955 tidak satupun partai politik memperoleh kursi mayoritas di DPR maka dalam pembentukan kabinet dilakukan koalisi. Melalui berbagai negosiasi akhirnya terbentuk Kabinet Ali Sastroamidjojo-Moh. Roem-Idham Chalid. Kabinet tersebut merepresentasikan unsur PNI, Masyumi, dan NU. Pemerintahan yang dibentuk oleh DPR hasil Pemilu 1955 itu ternyata tidak dapat melaksanakan programnya juga. Pada awal tahun 1957, Masyumi menarik menteri-menternya dari Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kemudian menyebabkan kabinet tersebut jatuh. Artinya pemerintahan yang didukung oleh DPR hasil pemilu yang demokratis tidak menjamin tercapainya stabilitas politik.

Pada kenyataannya meski Pemilu 1955 berhasil dilaksanakan dan menghasilkan DPR dan Konstituante yang *legitimate*, namun tujuan utama pemilu tidak tercapai. DPR yang terbentuk melalui Pemilu 1955 tidak dapat berfungsi dengan baik dan kemudian dibubarkan pada tanggal 4 Juni 1960 karena menolak RAPBN yang diajukan oleh pemerintah. Demikian pula dengan Konstituante yang gagal merumuskan undang-undang dasar sehingga Presiden Sukarno merasa perlu mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan berlakunya kembali UUD 1945. Dengan kata lain, Pemilu 1955 tidak bisa memperbaiki keadaan politik Indonesia seperti yang diharapkan oleh rakyat.



Meskipun demikian sebagai suatu pendidikan politik, Pemilu 1955 telah memberikan pelajaran yang berharga kepada masyarakat tentang bagaimana menggunakan hak politiknya. Bagi partai politik mereka belajar bagaimana cara efektif menarik simpati rakyat dan memetakan basis pendukungnya. Sedangkan bagi pemerintah, Pemilu 1955 tersebut merupakan pengalaman yang dapat dijadikan panduan untuk pelaksanaan pemilu selanjutnya. Semua kendala-kendala yang muncul pada Pemilu 1955 dikaji dan dicarikan solusinya agar pada pemilu selanjutnya hal tersebut tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. *Guide Arsip*

Guide Arsip Pemilu 1955-1999. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia

B. *Buku*

Amal, Ichlasul (ed). 1988. *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Fahmi, Khairul. 2011. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Feith, Herbert. 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

____ dan Lance Castles (ed). 1988. *Pemikiran Politik Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Haboddin, Muhtar. 2016. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Malang: UB Press.

Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. 2017. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Maksudi, Beddy Iriawan. 2015. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Miriam, Budihardjo. 2007. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Rivai, Afif. 2012. *Etika Politik Catatan Kritis Berpolitiknya Parpol di Indonesia*. Tangerang Selatan: PAM Press.

Sjamsuddin, Nazaruddin. 1993. *Dinamika Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sundhaussen, Ulf. 1986. *Politik Militer Indonesia 1945 – 1967*. Jakarta: LP3ES.

Yamin, Muhammad. 1955. *Rakyat Memilih: Parlemen dan Konstituante*. Bukittinggi.

..... 1985. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950 – 1964*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.



Arsip Nasional Republik Indonesia

Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560

Telp. 62-21-7805851, Fax.62-21-7810280, 7805812

<http://www.anri.go.id>, e-mail: info@anri.go.id